



Center for Economics and
Development Studies

2023

LAPORAN AKHIR

KAJIAN INDEKS
PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA

NOVEMBER 2023

Untuk :

KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Penelitian/Kajian dengan judul:

“KAJIAN INDEKS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA”

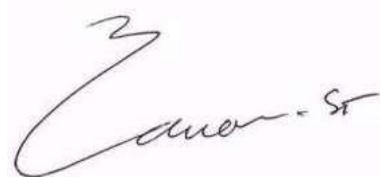
adalah hasil karya Tim Peneliti **Pusat Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran.**

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Penelitian/Kajian ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang diambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang kami akui seolah-olah sebagai tulisan kami sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang kami salin, tiru, atau yang kami ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila Tim Peneliti melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja atau tidak, dengan ini kami menyatakan siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bandung, 22 November 2023

Yang Memberi Pernyataan,
Ketua Tim



Prof. Dr. Maman Setiawan, S.E., M.T.
NIP. 197809202005021007

Anggota:

1. Rudi Kurniawan, S.E., M.Sc., Ph.D (Tim Peneliti)
2. Teguh Santoso, S.E., M.Sc. (Tim Peneliti)
3. Adhadian Akbar, S.E., M.Sc (Tim Peneliti)
4. Berliana Anggun Septiani, S.E., M.E (Tim Peneliti)
5. Reza Galih Renaldi, S.E (Asisten Peneliti)
6. Maisa Az-Zahra, S.E (Asisten Peneliti)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini merupakan survei dan analisis tahunan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diperoleh dari pengukuran persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di setiap provinsi di Indonesia. Pengukuran indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan survei persepsi terhadap pelaku usaha, pengambil kebijakan dan akademisi dengan menggunakan dimensi dan indikator dalam persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan lima indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan. Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas. Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input. Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan memfasilitasi monopoli. Sementara, dimensi terakhir yakni dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

Penelitian ini melakukan survei terhadap 34 provinsi dengan responden yang mewakili institusi seperti Kadin, Akademisi, Bank Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan baik bobot sama maupun bobot dari *principal component analysis*. Proses penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan metode *Additive Aggregation Method* (AAM).

Hasil survei menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4,91 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,87. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha

yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2023. Secara lebih detail, skor dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha yang mengalami kenaikan, adalah dimensi perilaku, kinerja, regulasi, dan penawaran. Dimensi SCP tahun ini memiliki kontribusi sebesar 38,4 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 10 (sepuluh) daerah yang memiliki persaingan usaha tertinggi terdiri menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA adalah atas Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, 10 (sepuluh) daerah dengan persaingan usaha terendah berada pada Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, dan Papua Barat.

Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah terdapat juga perubahan. Pada tahun 2023, berikut merupakan 10 (sepuluh) sektor yang memiliki persaingan usaha tertinggi menggunakan bobot PCA, yaitu Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan Real Estate; dan Industri Pengolahan. Sedangkan, 3 (tiga) sektor dengan persaingan usaha terendah berada pada sektor Pertambangan dan Penggalan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan Kajian..... | 4 |
| BAB II KAJIAN LITERATUR | 5 |
| 2.1. Kompetisi dan Pengukurannya | 5 |
| 2.1.1. Paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP)..... | 5 |
| 2.1.2. Pengukuran Kompetisi Terkini | 7 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 8 |
| 3.1. Identifikasi indikator-indikator Utama Pengukuran Indeks Persaingan Usaha..... | 8 |
| 3.2. Sumber Data dan Sampel | 9 |
| 3.3. Metode Perhitungan..... | 12 |
| 3.3.1 Sistem Pembobotan dan Skoring Daya Saing | 12 |
| 3.3.2 Perhitungan Skor, Peringkat, dan Neraca Persaingan | 13 |
| 3.3.3 Pemilihan Dimensi dan Indikator Untuk Indeks Persaingan Usaha Berbasis Data Primer | 14 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 18 |
| 4.1 Indeks Persaingan Usaha Secara Nasional..... | 18 |
| 4.1.1 Bobot Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP dan Dimensi Keseluruhan..... | 18 |
| 4.1.2 Hasil Indeks Persaingan Usaha Nasional Dimensi SCP dan Dimensi Nasional | 20 |
| 4.2. Analisis Persaingan Usaha Per Provinsi | 33 |
| 4.2.1. Provinsi Aceh..... | 33 |
| 4.2.2. Provinsi Sumatera Utara | 40 |
| 4.2.3. Provinsi Sumatera Barat..... | 48 |
| 4.2.4. Provinsi Riau..... | 56 |
| 4.2.5. Provinsi Jambi..... | 64 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 4.2.6. | Provinsi Sumatera Selatan | 72 |
| 4.2.7. | Provinsi Bengkulu..... | 80 |
| 4.2.8. | Provinsi Lampung..... | 88 |
| 4.2.9. | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 96 |
| 4.2.10. | Provinsi Kepulauan Riau..... | 104 |
| 4.2.11. | Provinsi DKI Jakarta | 112 |
| 4.2.12. | Provinsi Jawa Barat..... | 120 |
| 4.2.13. | Provinsi Jawa Tengah | 128 |
| 4.2.14. | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 136 |
| 4.2.15. | Provinsi Jawa Timur | 144 |
| 4.2.16. | Provinsi Banten | 153 |
| 4.2.17. | Provinsi Bali..... | 161 |
| 4.2.18. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 169 |
| 4.2.19. | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 177 |
| 4.2.20. | Provinsi Kalimantan Barat | 185 |
| 4.2.21. | Provinsi Kalimantan Tengah..... | 193 |
| 4.2.22. | Provinsi Kalimantan Selatan | 201 |
| 4.2.23. | Provinsi Kalimantan Timur..... | 209 |
| 4.2.24. | Provinsi Kalimantan Utara..... | 217 |
| 4.2.25. | Provinsi Sulawesi Utara | 225 |
| 4.2.26. | Provinsi Sulawesi Tengah..... | 233 |
| 4.2.27. | Provinsi Sulawesi Selatan | 240 |
| 4.2.28. | Provinsi Sulawesi Tenggara..... | 248 |
| 4.2.29. | Provinsi Gorontalo | 256 |
| 4.2.30. | Provinsi Sulawesi Barat | 264 |
| 4.2.31. | Provinsi Maluku | 272 |
| 4.2.32. | Provinsi Maluku Utara | 280 |
| 4.2.33. | Provinsi Papua Barat | 288 |
| 4.2.34. | Provinsi Papua..... | 295 |

| | |
|---|------------|
| BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN | 302 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 302 |
| 5.2 Implikasi Kebijakan..... | 304 |
| REFERENSI..... | 306 |

BAB I

PENDAHULUAN

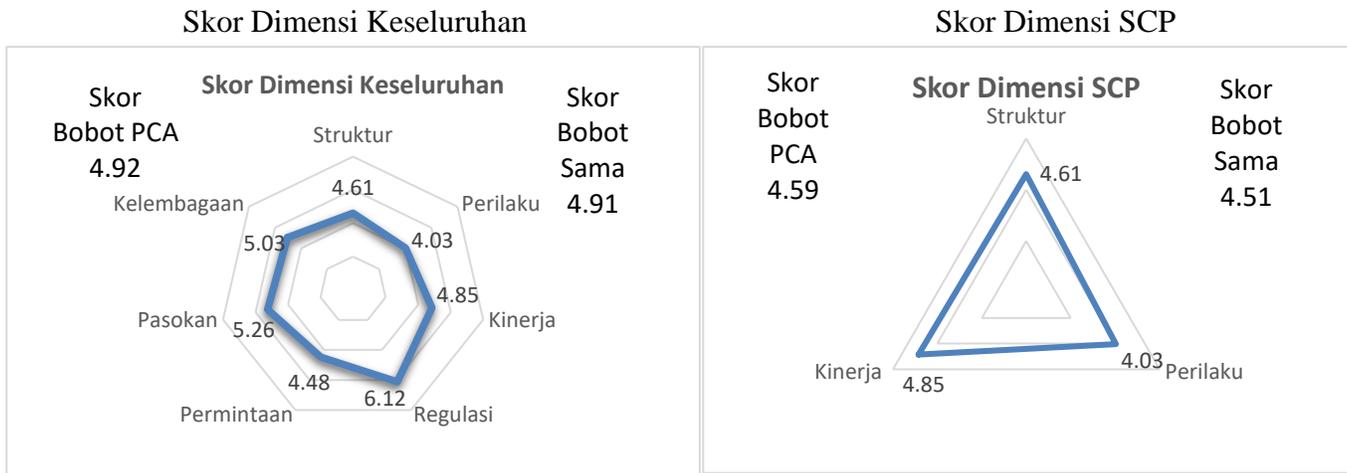
1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menggunakan suatu ukuran persaingan usaha yang komprehensif untuk mengukur intensitas persaingan usaha di Indonesia. Ukuran persaingan usaha tersebut terus diperbaiki menggunakan konsep dan metode yang relevan hingga tahun 2023. Ukuran persaingan usaha tersebut merupakan indeks persaingan usaha nasional yang dapat diturunkan menjadi indeks persaingan usaha pada tingkat provinsi dan sektor ekonomi. Selain menjadi indikator kinerja KPPU dalam menjalankan tugasnya, pengukuran indeks persaingan tersebut cukup penting karena dapat memberikan indikasi apakah daya saing dan produktivitas serta efisiensi sektor ekonomi di Indonesia tersebut semakin baik atau tidak. Pemikiran dan hipotesis ini didasarkan pada berbagai teori ekonomi dan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menemukan lingkungan yang kompetitif di suatu negara akan mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi yang kemudian akan berdampak kepada daya saing suatu negara. Lebih jauh, daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa indikator daya saing Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura dan ketiga negara ASEAN tersebut memiliki intensitas kompetisi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Terkait dengan pentingnya indikator persaingan usaha tersebut, sejak sepuluh tahun terakhir KPPU terus mengembangkan ukuran persaingan usaha dalam bentuk ukuran parsial pengukuran persaingan usaha nasional untuk setiap sektor industri seperti industri manufaktur dan industri perbankan. Lima tahun sebelumnya, indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi juga

dikembangkan. Setelah pengembangan indeks persaingan usaha yang bersifat sektoral tersebut, indeks persaingan usaha yang lebih komprehensif dibuat untuk setiap daerah untuk melihat persaingan usaha di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang dimulai pada tahun 2016. Sebagai proyek awal, survei indeks persaingan usaha dimulai untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Indeks persaingan usaha KPPU di daerah Jawa Barat tersebut kemudian dijadikan pijakan untuk membangun indeks persaingan usaha secara nasional meliputi berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi penyusunan indeks persaingan usaha pada tahun 2019, KPPU kemudian melakukan survei untuk mendapatkan indeks persaingan usaha KPPU secara nasional pada tahun 2019.

Gambar 1.1 merupakan hasil Indeks Persaingan Usaha menggunakan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP (*Structure-Conduct-Performance*) pada tahun 2022. Dimensi keseluruhan terdiri dari dimensi Struktur (*Structure*), Kinerja (*Performance*), Perilaku (*Conduct*), Regulasi, Penawaran dan Permintaan. Berdasarkan hasil survei dan analisis menggunakan dimensi keseluruhan, skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama adalah masing-masing sebesar 4.92 dan 4.91. Berdasarkan survei dan analisis terhadap dimensi SCP saja, skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama ialah masing-masing sebesar 4.59 dan 4.51. Dari nilai skor Indeks Persaingan Usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih terkategori sedikit tinggi.



Gambar 1.1 Hasil Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Persepsi 2023

Hasil pengukuran indeks persaingan usaha di Indonesia sudah mulai dipublikasikan KPPU dan CEDS sejak tahun 2015. Dari hasil perhitungan tersebut didapat kesimpulan bahwa seluruh indeks persaingan di sektor manufaktur, perbankan, daerah, dan berdasarkan regulasi menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih stagnan dan belum relatif baik. Hasil ini sesuai dengan perhitungan indikator intensitas kompetisi yang umum di Indonesia menurut Global Competitiveness Index yang masih belum terlalu baik terutama jika dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

Dalam perkembangan persaingan usaha di Indonesia termasuk adanya digitalisasi ekonomi, terdapat beberapa perubahan di dalam indikator agar benar-benar merefleksikan kinerja persaingan saat ini. Hasil pengukuran indeks persaingan usaha secara nasional yang diagregasi dari indeks persaingan usaha untuk setiap provinsi yang berubah-ubah juga memberikan catatan terhadap perankingan hasil indeks persaingan usaha yang terkait dengan provinsi yang diduga masih perlu didalami. Catatan tersebut terkait dengan beberapa daerah yang memiliki ranking yang dinamis setiap tahunnya dan ada beberapa daerah yang dianggap memiliki banyak kasus pelanggaran persaingan usaha tetapi masuk dalam salah satu provinsi dengan skor indeks

persaingan usaha paling tinggi.

Metode kajian dalam pengukuran indeks persaingan usaha ini mengalami perubahan bukan hanya pada beberapa indikator yang disesuaikan atau ditambahkan, tetapi mengalami perubahan metode survei pada masa pandemic Covid-19. Terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh tim selama masa pandemik tersebut untuk melaksanakan survei secara langsung. Untuk tetap mendapatkan data yang valid, tim menggunakan enumerator lokal dan tetap bersama-sama memantau jalannya proses wawancara yang dilakukan enumerator lokal melalui *platform* daring seperti *zoom meeting*. Untuk terus memperbaiki kualitas dari survei, dilakukan evaluasi dan pendalaman kembali terhadap beberapa pertanyaan dari survei-survei sebelumnya. Sejak tahun 2020, perkembangan dan dampak ekonomi digital terhadap persaingan usaha juga dibahas dalam penelitian ini agar seluruh faktor terakomodasi dalam indeks persaingan usaha. Selain itu, dampak pandemik Covid-19 juga dilihat untuk mengukur dampaknya terhadap persaingan usaha saat ini.

1.2. Tujuan Kajian

Sebagaimana sudah diuraikan pada latar belakang penelitian, penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk mengukur ukuran indeks persaingan usaha yang komprehensif di setiap sektor ekonomi dan setiap provinsi di Indonesia dengan tujuan penelitian secara spesifik, yaitu:

1. Memberikan identifikasi indikator-indikator apa saja yang valid untuk mengukur indeks persaingan usaha untuk sektor ekonomi di daerah provinsi di Indonesia.
2. Memberikan urutan/ranking indeks kompetisi di sektor ekonomi di daerah provinsi dilihat dari berbagai indikator yang ada.
3. Memberikan neraca persaingan atau kinerja persaingan sektor ekonomi di daerah provinsi dilihat dari berbagai indikator persaingan yang ada.
4. Memberikan indeks persaingan usaha secara nasional yang diturunkan dari indeks persaingan usaha daerah.

BAB II

KAJIAN LITERATUR¹

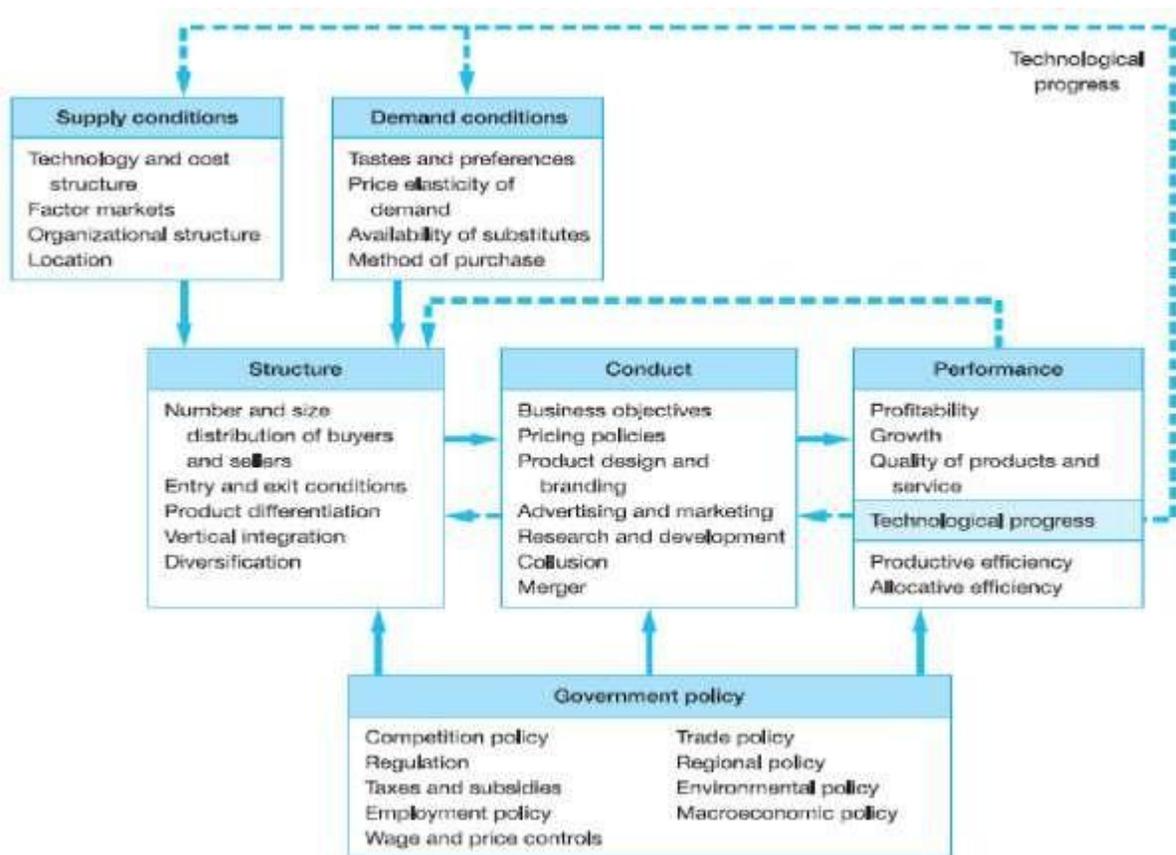
2.1. Kompetisi dan Pengukurannya

Konsep persaingan usaha sudah banyak dibahas dalam literatur ekonomi dasar dan secara lebih spesifik kemudian dibahas dalam konsep-konsep di ekonomi industri. Konsep-konsep tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai dimensi dan indikator yang tepat baik untuk indeks persaingan usaha berbasis data sekunder atau indeks persaingan usaha berbasis data primer. Basis konsep berdasarkan paradigma Struktur-Perilaku-Kinerja dan berbagai pemikiran ekonomi industri terkini dapat digunakan sebagai referensi dasar membangun indeks persaingan usaha tersebut.

2.1.1. Paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP)

Pengukuran persaingan usaha terus berkembang dari mulai pengukuran yang bersifat tradisional hingga pengukuran yang dianggap lebih modern. Kerangka pengukuran kompetisi selalu dimulai dari paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP). Kerangka SCP tersebut ditulis pertama kali oleh Mason (1939) dan kemudian oleh Bain (1942). Paradigmanya telah melalui analisis yang signifikan sejak Bain menjalankan serangkaian riset empiris pada tahun 1956 untuk mengestimasi hubungan antara struktur pasar dan kinerja yang kemudian didokumentasikan dalam bukunya *Barriers to New Competition*. Buku tersebut kemudian menjadi pedoman terkait diskusi dan pengembangan fondasi teoritis dari analisis kompetisi dan kinerja pasar. Kerangka SCP tersebut telah diuji oleh beberapa peneliti secara dinamis (Lihat Clarke dan Davies, 1982; Lipszinky dan Wilson, 2000).

¹ Kajian Literatur ini menggunakan kajian literatur yang sama dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1 Paradigma *Structure-Conduct-Performance*

Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana paradigma dari SCP yang diilustrasikan oleh Bain (1956) dan Lipszinky dan Wilson (2000) dapat menjelaskan konsep persaingan usaha. Berdasarkan Gambar 2.1, struktur pasar akan mempengaruhi perilaku yang kemudian mempengaruhi kinerja pasar. Umpan balik yang mungkin terjadi juga dijelaskan dalam kerangka ini. Dengan kata lain, di bawah struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi seperti oligopoli/monopoli, perilaku dari para oligopoli dan/ atau monopoli cenderung menjadi kolusif atau tanpa aturan melalui kekuatan pasar. Kemudian, perilaku ini akan memberikan rendahnya efisiensi, kurangnya produktivitas atau persaingan dan kinerja pasar yang buruk pada umumnya. Skema tersebut

menyatakan bahwa kondisi ini akan cukup berbeda jika struktur pasar yang kurang terkonsentrasi atau lebih kompetitif. Dengan cara lain, perusahaan dengan kinerja yang tinggi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dan secara berkelanjutan meningkatkan pangsa pasar mereka. Oleh karena itu, kinerja yang tinggi dari perusahaan dapat juga mengurangi kompetisi.

Dalam paradigma SCP, konsentrasi empat perusahaan terbesar (CR4), Herfindahl-Hirschman Index(HHI), *turnover*, dan *net entry* biasanya digunakan untuk merepresentasikan ukuran kompetisi yang mengindikasikan struktur pasar dari suatu industri. Struktur pasar yang kompetitif akan mendorong perilaku yang kompetitif sehingga akan menciptakan efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Sebaliknya struktur pasar yang terkonsentrasi akan mendorong perilaku kolusif sehingga menciptakan inefisiensi produksi dan alokatif.

2.1.2. Pengukuran Kompetisi Terkini

Pengukuran persaingan usaha saat ini berkembang tidak hanya pengukuran pada struktur pasar tetapi lebih jauh lagi kompetisi diukur dari dampak yang ditimbulkan oleh struktur pasar yang ada. Demsetz(1973) berargumen bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi belum tentu akan menciptakan kolusi tetapi perusahaan-perusahaan yang efisien yang menciptakan struktur pasar tersebut. Dari konsep yang dikemukakan Demsetz tersebut kemudian berkembang hipotesis *efficient-structure-hypothesis*. Kemudian konsep lain yang berkembang berasal dari Bresnahan (1982), Azzam (1997) dan Lopez at al. (2002) yang menggunakan ukuran perilaku dan *market power* untuk menaksir kompetisi di pasar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN²

3.1. Identifikasi indikator-indikator Utama Pengukuran Indeks Persaingan Usaha

Pada kajian indeks persaingan usaha tahun 2022, untuk identifikasi indikator-indikator utama yang mengukur tingkat kompetis, diambil dari literatur sebelumnya dan meminta pendapat ahli melalui berbagai cara seperti *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam kajian ini, berbagai indikator persaingan usaha diperoleh dengan mengadopsi beberapa pengukuran persaingan usaha dan konsep persaingan usaha dari literatur ekonomi industri. Dari hasil identifikasi tersebut, Tabel 3.1 menggambarkan indikator-indikator dari setiap dimensi pembentuk indeks persaingan usaha dengan menggunakan data primer (indeks persaingan usaha nasional). Untuk lebih menguatkan, mencari serta menambahkan indikator-indikator tersebut, maka dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan ahli untuk mendapatkan indikator dan dimensi yang tepat. Tabel 3.1 menggambarkan berbagai dimensi dan indikator yang digunakan untuk membangun indeks persaingan usaha nasional berdasarkan persepsi yang diagregasi dari indeks persaingan usaha sektoral ekonomi dan provinsi.

Tabel 3.1. Variabel, Dimensi dan Indikator persaingan usaha berbasis data persepsi

| Variabel | Indikator | Konsep Persaingan yang Tinggi | Sumber data |
|----------------------------------|----------------------|--|-------------|
| Dimensi struktur industry | | | |
| 1 | Jumlah perusahaan | <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perusahaan relatif banyak• Jumlah perusahaan dinamis atau semakin meningkat (entry)• Dampak Ekonomi Digital | Persepsi |
| 2 | Konsentrasi industry | <ul style="list-style-type: none">• Dominasi perusahaan di setiap daerah | Persepsi |
| 3 | Produk differensiasi | <ul style="list-style-type: none">• Variasi produk sejenis di setiap daerah | Persepsi |

² Metode Penelitian ini tidak berbeda dengan Metode Penelitian Tahun sebelumnya.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| 4 | Hambatan masuk | <ul style="list-style-type: none"> Hambatan modal rendah. Hambatan masuk seperti hambatan investasi dan peraturan tidak ada. | Persepsi |
| Dimensi Perilaku Industri | | | |
| 1 | Kolusi/kartel | Koordinasi antar perusahaan di daerah | Persepsi |
| 2 | <i>Pricing</i> | Penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar | Persepsi |
| 3 | Iklan dan <i>branding</i> | Tingkat intensitas promosi, iklan di daerah | Persepsi |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan (R&D) | Aktivitas R&D perusahaan-perusahaan di daerah | Persepsi |
| Dimensi Kinerja Industri | | | |
| 1 | Efisiensi perusahaan dan industri | <ul style="list-style-type: none"> Tingkat efisiensi perusahaan dan industri semakin tinggi Dampak Ekonomi Digital terhadap efisiensi | Persepsi |
| 2 | Mark-up | Profitabilitas perusahaan di daerah tidak berlebih | Persepsi |
| 3 | Produktivitas | Produktivitas perusahaan di daerah | Persepsi |
| 4 | Pertumbuhan output | Pertumbuhan output perusahaan terus meningkat | Persepsi |
| 5 | Progres penggunaan Teknologi | Adopsi teknologi terus meningkat di daerah | |
| Dimensi Regulasi | | | |
| 1 | Undang-undang persaingan usaha | UU No. 5 tahun 1999 mendorong persaingan usaha | Persepsi |
| 2 | Kebijakan persaingan Usaha | Kebijakan mendorong persaingan usaha | Persepsi |
| 3 | Kebijakan perdagangan dan Investasi | Kebijakan perdagangan dan investasi mendorong persaingan usaha. | Persepsi |
| 4 | Kontrol terhadap harga | Kebijakan pemerintah terkait dengan harga produk tidak membatasi persaingan usaha | Persepsi |
| 5 | Kebijakan ekonomi Makro | Kebijakan ekonomi makro tidak membatasi persaingan usaha | Persepsi |
| Dimensi Faktor Permintaan | | | |
| 1 | Elastisitas harga permintaan | Responsitas penjualan produk terhadap harga yang tinggi | Persepsi |
| 2 | Substitusi barang dan jasa | Tingkat substitusi antara produk cukup tinggi | Persepsi |
| 3 | Pertumbuhan pasar | Pertumbuhan penjualan total di pasar cukup besar | Persepsi |
| Dimensi Faktor Penawaran | | | |
| 1 | Teknologi | Penggunaan teknologi perusahaan cukup merata | Persepsi |
| 2 | Lokasi | Lokasi perusahaan/industri terjangkau | Persepsi |
| 3 | Akses dan harga input | Kemudahan mendapatkan akses input dengan harga terjangkau | Persepsi |
| Dimensi Kelembagaan | | | |
| 1 | UU No. 5 tahun 1999 | Pengetahuan tentang UU No. 5 tahun 1999 | Persepsi |
| 2 | KPPU | Pengetahuan tentang lembaga KPPU | Persepsi |
| 3 | Pengarusutamaan | Pengarusutamaan Prinsip Persaingan Usaha di daerah | Persepsi |

Sumber: berbagai sumber

3.2. Sumber Data dan Sampel

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan ialah data primer. Data primer digunakan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional dan daerah dengan data berbasis persepsi. Dalam

penyusunan indeks persaingan usaha berbasis persepsi, survei dilakukan terhadap para stakeholder yang dinilai dapat memberikan persepsi berdasarkan pengetahuan dan penguasaan terhadap kondisi dan indikator persaingan usaha di Daerah. Adapun stakeholder yang akan menjadi responden survei antara lain:

1. Kepala Dinas Perindustrian/Perdagangan Provinsi, atau yang mewakili
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi, atau yang mewakili
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang melingkupi seluruh 34 provinsi.
4. Akademisi Lokal

Survei akan dilakukan pada 4 stakeholder di atas untuk setiap Provinsi. Pemilihan 4 stakeholder tersebut dengan pertimbangan bahwa 4 stakeholder tersebut merepresentasikan elemen yang kompeten dalam menilai persaingan usaha di daerah, yakni elemen Akademisi, Pelaku Usaha, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah (Academic, Business and Government/ABG). *Kepala kantor wilayah KPPU akan jugadimintai keterangan terkait dengan hasil survei dari para responden untuk mengkonfirmasi terkait dengan validasi data di masing-masing daerah yang menjadi cakupan wilayahnya.* Responden akan diberi daftar pertanyaan baik bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka mencakup pandangan dan persepsi responden terhadap kondisi persaingan usaha. Sedangkan pada pertanyaan tertutup, responden akan diminta untuk memberikan persepsi dengan melakukan scoring dari 1-7 untuk setiap sektor ekonomi sesuai sektor usaha dalam PDRB¹. *Dari 17 sektor ekonomi, hanya 15 sektor yang dimasukkan dalam perhitungan indeks persaingan usaha ini karena sektor administrasi pemerintah secara umum tidak masuk ke dalam sektor bisnis dan sektor lainnya dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam mempersepsikannya.* Skor 1 menunjukkan persaingan yang rendah, sementara skor 7 menunjukkan persaingan yang tinggi. (Daftar kuesioner terlampir)

Sementara itu, wilayah objek survei adalah Provinsi-Provinsi yang berada dalam cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU. Saat ini, KPPU memiliki 1 Kantor Pusat dan 7 Kantor Wilayah, yakni Kantor Wilayah Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Yogyakarta. Rincian wilayah sampel survei disajikan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sampel Penelitian

| Kantor Wilayah | Wilayah Kerja | Sampel |
|-----------------------|---|----------------|
| Kanwil I Medan | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau | Semua Provinsi |
| Kanwil II Lampung | Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung | Semua Provinsi |
| Kanwil III Bandung | Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta | Semua Provinsi |
| Kanwil IV Surabaya | Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur | Semua Provinsi |
| Kanwil V Balikpapan | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara | Semua Provinsi |
| Kanwil VI Makassar | Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat | Semua Provinsi |
| Kanwil VII Yogyakarta | Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta | Semua Provinsi |
| Kantor Pusat | Semua wilayah yang tidak tercakup dalam wilayah kerja KPD | DKI Jakarta |

Dari Tabel 3.2, seluruh Provinsi di wilayah kerja akan diambil sebagai sampel sedangkan untuk wilayah kerja kantor pusat, sampel yang diambil hanya DKI Jakarta. Sampel yang diambil dinilai dapat merepresentasikan keseluruhan populasi daerah di Indonesia. Tabel 3.3 menunjukkan provinsi-provinsi yang menjadi sampel survei dalam pengukuran indeks persaingan usaha, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sampel Survei Provinsi

| No | Provinsi | No | Provinsi |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Aceh | 14 | Kalimantan Selatan |
| 2 | Bali | 15 | Kalimantan Tengah |
| 3 | Bangka-Belitung | 16 | Kalimantan Timur |
| 4 | Banten | 17 | Kalimantan Utara |
| 5 | Bengkulu | 18 | Kepulauan Riau |
| 6 | DIY | 19 | Lampung |
| 7 | Gorontalo | 20 | Maluku |
| 8 | Jakarta | 21 | NTB |
| 9 | Jambi | 22 | NTT |
| 10 | Jawa Barat | 23 | Papua |
| 11 | Jawa Tengah | 24 | Riau |
| 12 | Jawa Timur | 25 | Sulawesi Selatan |
| 13 | Kalimantan Barat | 26 | Sulawesi Tenggara |

| No | Provinsi |
|----|------------------|
| 27 | Sulawesi Tengah |
| 28 | Sulawesi Utara |
| 29 | Sumatera Barat |
| 30 | Sumatera Selatan |
| 31 | Sumatera Utara |
| 32 | Sulawesi Barat |
| 33 | Maluku Utara |
| 34 | Papua Barat |

3.3. Metode Perhitungan

3.3.1 Sistem Pembobotan dan Skoring Daya Saing

Hasil keluaran utama dari kajian ini adalah indeks kompetisi setiap tahun beserta ranking indeks kompetisi untuk setiap sektor usaha, daerah dan nasional. Terdapat dua pokok utama yang diperlukan untuk membuat peringkat kompetisi, yaitu variabel-variabel yang mampu menunjukkan dan mengindikasikan tingkat persaingan di industri dan suatu sistem pembobotan dan skoring yang dapat mentransformasi variabel-variabel atau indikator-indikator tersebut menjadi sistem pemeringkatan dan pengklasifikasian. Penentuan, penjaringan, serta penseleksian variabel-variabel kinerja industri dilakukan melalui penelusuran literatur dan diskusi dengan berbagai ahli. Pada bagian ini akan dijelaskan teknik pembobotan dan penilaian (skoring) persaingan usaha yang dipergunakan pada penelitian ini sebagaimana pernah digunakan oleh LP3E FEB UNPAD (2001).

Metode pembobotan yang digunakan ialah menggunakan *Principal Component Analysis (PCA)*. Metode pembobotan dengan PCA dapat dilakukan dalam perhitungan bobot yang sesuai untuk indikator-indikator yang mengukur elemen-elemen kinerja dan skor kinerja secara keseluruhan. Metode PCA ini merupakan metode untuk mereduksi berbagai indikator menjadi indikator yang lebih sedikit dengan tidak menghilangkan esensi keberadaan indikator-indikator tersebut.

Dalam kaitannya dengan mereduksi indikator-indikator menjadi satu atau beberapa elemen, teknik PCA yang digunakan ialah *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Teknik CFA digunakan ketika peneliti sudah mengetahui secara teori tentang indikator-indikator yang membentuk suatu elemen. Oleh karena itu,

penentuan yang akurat terkait dengan indikator-indikator yang akan membentuk suatu elemen ialah salah satu syarat penting. Seluruh indikator-indikator dalam CFA ini nantinya dikhususkan untuk membuat suatu elemen. CFA tersebut memiliki persamaan dasar *Principal Component Analysis* (PCA) yang sama, sebagai berikut:

$$Z_1 = \pi_1 * F_1 + \dots + \pi_k * F_k + v_1 \quad (1)$$

⋮

$$Z_n = \pi_n * F_1 + \dots + \pi_n * F_n + v_n \quad (n)$$

Di mana n dan k menunjukkan masing-masing jumlah indikator dan jumlah faktor atau elemen yang terbentuk, π ialah factor loading, Z ialah indikator, dan F ialah faktor atau elemen.

Secara umum, teknik pembobotan dengan metode PCA dilakukan dengan tahapan-tahapan yang runtut, sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi indikator-indikator untuk setiap elemen.
2. Melakukan analisis korelasi antara indikator untuk mengetahui apakah metode PCA ini *valid* untuk digunakan pembobotan.
3. Analisis PCA dengan menentukan validitas faktor yang terbentuk (CFA).
4. Melakukan pembobotan dengan jumlah faktor yang terbentuk berdasarkan *factor loading*. *Factor loading* yang terbentuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan bobot indikator dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Hitung *squared loading factor* dan kemudian nilai tersebut dinormalisasi sehingga penjumlahannya satu.
 - b. Hasil normalisasi dari *squared loading factor* akan membentuk bobot untuk masing-masing indikator di setiap elemen.

3.3.2 Perhitungan Skor, Peringkat, dan Neraca Persaingan

Dengan metode *Additive Aggregation Method* (AAM), Perhitungan skor kinerja persaingan usaha dalam satu tahun dilakukan dengan menghitung jumlah tertimbang (*weighted sum*) dari semua variabel/indikator. Jumlah tertimbang yang tinggi mengindikasikan tingkat kinerja persaingan yang lebih

tinggi pula. Pemingkatan kinerja persaingan usaha dilakukan dengan membandingkan skor jumlah tertimbang variabel yang telah dinormalisasi (*normalized variable*) ini untuk seluruh industri yang diamati. Selain peringkat persaingan usaha, penelitian ini juga membahas indeks kompetisi untuk setiap indikator. Perhitungan skor pada level indikator dan sub indikator pada prinsipnya sama dengan perhitungan skor pada level industri hanya perbedaannya, perhitungan ini melibatkan jumlah variabel yang lebih sedikit. Dengan perkataan lain skor pada level indikator merupakan ‘*subset*’ skor pada level industri dan skor pada level sub indikator merupakan ‘*subset*’ skor pada level indikator.

Perhitungan skor untuk pemeringkatan kinerja industri dengan menggunakan metode AAM dilakukan dengan pendekatan penjumlahan (OECD, 2008), yaitu metode penjumlahan dengan bobot tertimbang. Metode ini menjumlah skor tiap indikator yang membentuk elemen dengan suatu bobot tertimbang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode penjumlahan tersebut dilakukan dengan formula:

$$RCI_q = \sum_{I=1}^{NW} I_i$$

Di mana RCI ialah indeks persaingan, q ialah elemen atau faktor kinerja yang akan dibentuk, w ialah bobot tertimbang, I ialah skor dari indikator, dan i menunjukkan indikator ke-1..., N. Ranking antara industri dilakukan dengan melihat skor masing-masing elemen dan kemudian dilihat secara keseluruhan dengan menjumlahkan skor elemen setiap industri untuk pemeringkatan industri berdasarkan kinerja persaingannya.

3.3.3 Pemilihan Dimensi dan Indikator Untuk Indeks Persaingan Usaha Berbasis Data Primer

Dalam laporan sementara ini akan dijelaskan bagaimana pemilihan kembali variabel-variabel untuk persaingan usaha berdasarkan hasil survei. Kemudian realisasi survei juga dipaparkan di dalam Bab IV ini. Table 3.5 menunjukkan dimensi struktur yang merupakan bagian dari *paradigm structure-conduct-performance* (SCP) yang digunakan untuk mengukur persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri dan diferensiasi produk. Masing-masing indikator diukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan.

Tabel 3.4. Dimensi struktur dan indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|----------|--------------------------------|
| Struktur | Jumlah Perusahaan |
| | Hambatan Keluar/Masuk Industri |
| | Konsentrasi Industri |
| | Differensiasi Produk |

Tabel 3.5. menunjukkan dimensi perilaku dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi perilaku terdiri dari harga dan advertising. Setiap indikator dalam dimensi kemudian diukur dengan pertanyaan yang dijabarkan dalam kuesioner.

Tabel 3.5. Dimensi Perilaku dan Indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|----------|-------------|
| Perilaku | Harga |
| | Advertising |

Tabel 3.6. menunjukkan dimensi kinerja dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi kinerja terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan Produktivitas. Masing-masing indikator akan diturunkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner.

Tabel 3.6. Dimensi Kinerja dan Indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|---------|-----------------------------------|
| Kinerja | Efisiensi produksi dan distribusi |
| | Pengembangan teknologi |
| | Profitabilitas |
| | Produktivitas |

Tabel 3.7. menunjukkan dimensi permintaan dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi permintaan terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Masing-masing indikator akan dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.7. Dimensi permintaan dan Indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|------------|------------------------------|
| Permintaan | Elastisitas harga permintaan |
| | Barang substitusi |
| | Pertumbuhan pasar |

Tabel 3.8 menunjukkan dimensi penawaran dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi penawaran terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan, dan input. Masing-masing indikator akan

dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.8. Dimensi penawaran dan Indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|------------|------------------------------|
| Permintaan | Jaminan ketersediaan pasokan |
| | Input |

Tabel 3.9 menunjukkan dimensi regulasi dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi regulasi yang memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha. Indikator tersebut akan dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.9. Dimensi regulasi dan indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|----------|--|
| Regulasi | Kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha |
| | - Terkait hambatan masuk |
| | - Memfasilitasi monopoli |

Tabel 3.10 menunjukkan dimensi kelembagaan dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha. Indikator tersebut akan dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.10. Dimensi Kelembagaan dan Indikatornya

| Dimensi | Indikator |
|-------------|--|
| Kelembagaan | Pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha |
| | Kesadaran terhadap adanya KPPU |
| | Pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha |

3.3.4 Pengelompokan Tingkat Persaingan Usaha Berdasarkan Skor Indeks Persaingan Usaha

Untuk mengelompokan tingkat persaingan usaha pada skala semantik yang digunakan untuk mengukur persaingan usaha, pengukuran indeks persaingan usaha ini menggunakan konsep yang digunakan oleh Heise (1970) yang membagi penilaian menjadi beberapa kelompok sehingga menjadi, sebagai berikut:

- Persaingan usaha sangat tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)
- Persaingan usaha cukup tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)
- Persaingan usaha sedikit tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)

- Persaingan usaha moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)
- Persaingan usaha sedikit rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)
- Persaingan usaha cukup rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)
- Persaingan usaha sangat rendah (Skor Indeks 1.00-1.50)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep dan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bagian ini membahas hasil perhitungan indeks persaingan usaha per daerah dan per sektor dari 34 provinsi sampel penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan menyajikan bobot indeks persaingan usaha untuk seluruh dimensi dan hanya dimensi S-C-P. Tahap selanjutnya analisis dilakukan dengan menganalisis indeks persaingan usaha secara keseluruhan kemudian per provinsi dan per sektor.

4.1 Indeks Persaingan Usaha Secara Nasional

4.1.1 Bobot Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP dan Dimensi Keseluruhan

Tabel 4.1 memberikan data terkait dengan skor bobot hanya dari dimensi SCP. Pembobotan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan yang sama dan pembobotan dengan metode *principal component analysis* (PCA). Hasil perhitungan bobot dari setiap dimensi akan digunakan untuk membentuk indeks persaingan usaha berdasarkan data rata-rata dimensi yang ada. Dari Tabel 4.1. tersebut diketahui bahwa dimensi yang memiliki bobot terbesar dari pembentukan indeks persaingan usaha dengan hanya menggunakan indeks S-C-P adalah dimensi kinerja diikuti oleh dimensi struktur dan dimensi perilaku industri. Dimensi kinerja pasar memiliki kontribusi yang terbesar dalam pembentukan indeks S-C-P dengan masing-masing bobot untuk SCP ialah sebesar 0.360, 0.222 dan 0.418. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kinerja pasar memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan iklim persaingan usaha. Sementara dimensi perilaku memberikan andil yang paling kecil dalam indeks persaingan usaha yang hanya menggunakan tiga dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dimensi struktur industri tidak lagi dominan di dalam menjelaskan pembentukan persaingan usaha seperti dipredikasi paradigm SCP. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, skor bobot persaingan usaha dimensi SCP ini mengalami perubahan pada bobot PCA. Dari skor bobot PCA terdapat peningkatan pada dimensi struktur dan dimensi kinerja. Sedangkan, untuk dimensi perilaku terdapat penurunan apabila dibandingkan tahun 2021.

Tabel 4.1 Skor Bobot Persaingan Usaha Dimensi S-C-P

| Dimensi | Bobot PCA 2022 | Bobot Sama 2022 | Bobot PCA 2023 | Bobot Sama 2023 |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Struktur | 0.371 | 0.333 | 0.360 | 0.333 |
| Perilaku | 0.209 | 0.333 | 0.222 | 0.333 |
| Kinerja | 0.420 | 0.333 | 0.418 | 0.333 |

Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan bobot setiap dimensi keseluruhan. Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan metode PCA, dimensi yang memiliki bobot terbesar dari pembentukan indeks persaingan usaha untuk seluruh dimensi adalah dimensi perilaku yang diikuti oleh dimensi kelembagaan, dimensi regulasi, dimensi permintaan, dimensi penawaran, dimensi struktur dan dimensi kinerja. Dari hasil pembobotan ini diketahui bahwa dimensi S-C-P memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan indeks persaingan usaha dengan kontribusi sekitar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur pasar, perilaku industri dan kinerja industri memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan iklim persaingan usaha. Dimensi regulasi, kelembagaan dan permintaan menjadi faktor lingkungan yang penting dalam mendorong persaingan usaha yang lebih tinggi. Hal ini dilihat dari hasil bobot dimensi-dimensi tersebut yang cukup besar. Dimensi kelembagaan dan regulasi memiliki peran cukup besar dalam penciptaan persaingan usaha yang tinggi, dalam hal ini pemahaman tentang UU No.5 Tahun 1999, pemahaman tentang keberadaan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pengambilan kebijakan yang mengarusutamakan persaingan usaha. Sementara itu skor bobot kinerja memiliki kontribusi sebesar 6.7% dan merupakan dimensi dengan bobot paling terkecil dibandingkan dengan seluruh dimensi lainnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kinerja pasar dianggap tidak banyak berubah dan sama di setiap provinsi di Indonesia sehingga tidak banyak memberikan kontribusi terhadap iklim persaingan usaha dilihat dari persepsi responden.

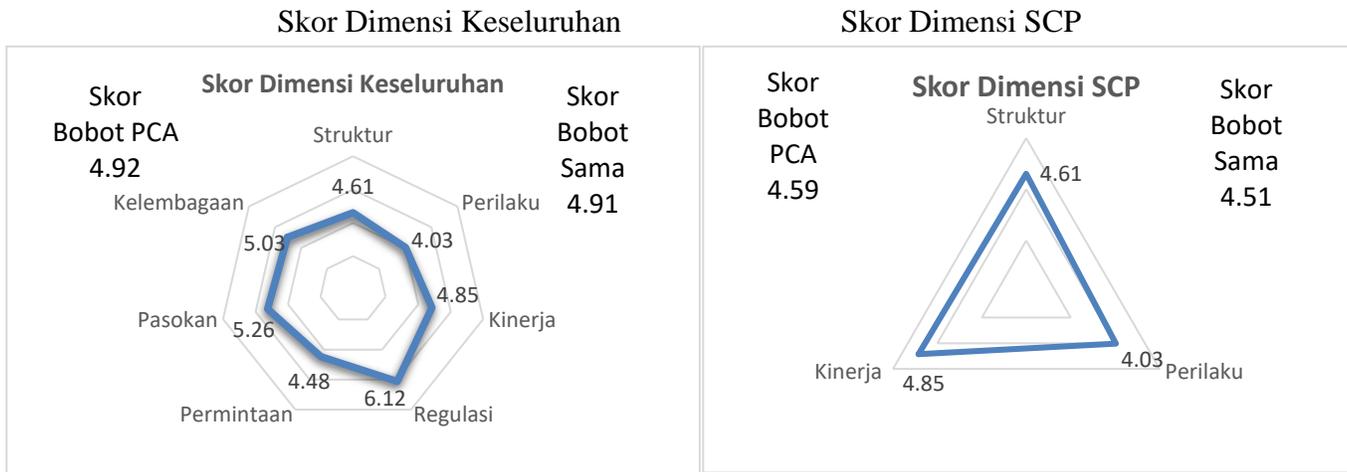
Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat perubahan pada bobot dimensi yang mana menunjukkan peningkatan atau penurunan pada tahun 2022. Dimensi struktur, regulasi dan permintaan merupakan dimensi yang mengalami peningkatan bobot atau kontribusi terhadap variasi indeks persaingan usaha. Sedangkan dimensi perilaku, kinerja, penawaran dan kelembagaan mengalami penurunan bobot atau mengalami penurunan kontribusi dalam membentuk variasi indeks persaingan usaha.

Tabel 4.2 Skor Bobot Persaingan Usaha Semua Dimensi

| Dimensi | Bobot PCA 2022 | Bobot Sama 2022 | Bobot PCA 2023 | Bobot Sama 2023 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Struktur | 0.116 | 0.143 | 0.127 | 0.143 |
| Perilaku | 0.187 | 0.143 | 0.171 | 0.143 |
| Kinerja | 0.081 | 0.143 | 0.067 | 0.143 |
| Regulasi | 0.166 | 0.143 | 0.189 | 0.143 |
| Permintaan | 0.149 | 0.143 | 0.169 | 0.143 |
| Penawaran | 0.127 | 0.143 | 0.125 | 0.143 |
| Kelembagaan | 0.174 | 0.143 | 0.151 | 0.143 |

4.1.2 Hasil Indeks Persaingan Usaha Nasional Dimensi SCP dan Dimensi Nasional

Indeks persaingan usaha nasional berdasarkan rata-rata indeks persaingan usaha daerah dan seluruh sektor ekonomi ditunjukkan oleh Gambar 4.1. Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa indeks persaingan usaha berada di rentang 4.50 - 4.92 berdasarkan dimensi SCP maupun dimensi keseluruhan baik menggunakan bobot PCA maupun bobot yang sama. Berdasarkan dimensi SCP, persaingan usaha dikategorikan ke dalam persaingan usaha moderat hingga sedikit tinggi. Persaingan usaha dikategorikan menjadi persaingan usaha sedikit tinggi ketika menggunakan dimensi secara keseluruhan. Kemudian aspek perilaku merupakan dimensi yang dipersepsikan memiliki skor paling kecil yaitu 3.96. Masalah perilaku industri menjadi faktor yang mendorong indeks persaingan usaha ke arah moderat. Beberapa indikasi perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kartel terjadi pada tahun 2022-2023. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi KPPU dan pengambil kebijakan untuk mendorong agar tercipta perilaku industri yang lebih kompetitif baik di daerah maupun di nasional.



Gambar 4.1. Indeks Persaingan Usaha Nasional

Tabel 4.3 menunjukkan perbandingan skor indeks persaingan usaha baik menggunakan dimensi keseluruhan maupun dimensi SCP. Dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.87 pada tahun 2022 menjadi 4.91 pada tahun 2023. Kemudian, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.48 pada tahun 2022 menjadi sebesar 4.51 pada tahun 2023. Kemudian indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan dan bobot PCA mengalami kenaikan dari sebesar 4.85 pada tahun 2022 menjadi 4.92 pada tahun 2023. Selanjutnya, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot PCA, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.58 pada tahun 2022 menjadi 4.59 pada tahun 2023. Dari hasil tersebut terlihat bahwa secara umum indeks persaingan usaha mengalami kenaikan baik menggunakan indikator SCP maupun indikator keseluruhan.

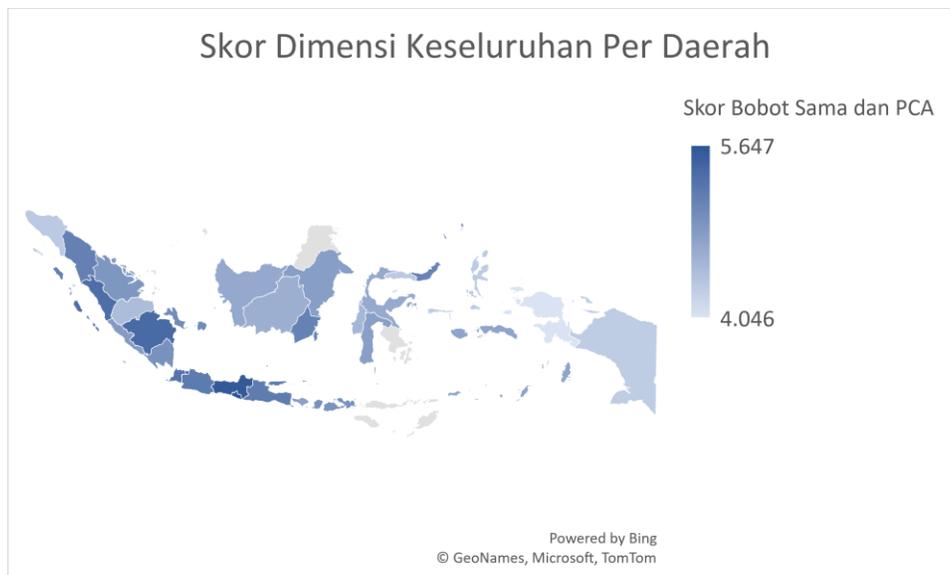
Tabel 4.3. Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usaha Periode 2019-2023

| Dimensi | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Skor A | Skor B |
| Struktur | 4.24 | 4.24 | 4.34 | 4.34 | 4.49 | 4.49 | 4.66 | 4.66 | 4.61 | 4.61 |
| Perilaku | 3.90 | 3.90 | 3.58 | 3.58 | 3.73 | 3.73 | 3.96 | 3.96 | 4.03 | 4.03 |
| Kinerja | 4.70 | 4.70 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.81 | 4.81 | 4.85 | 4.85 |
| Regulasi | 5.95 | | 6.12 | | 6.30 | | 5.69 | | 6.12 | |
| <i>Demand</i> | 4.35 | | 4.06 | | 4.15 | | 4.55 | | 4.48 | |
| <i>Supply</i> | 5.14 | | 4.94 | | 5.16 | | 5.16 | | 5.26 | |
| Kelembagaan | 4.74 | | 4.61 | | 4.96 | | 5.23 | | 5.03 | |
| Skor Bobot Sama | 4.72 | 4.23 | 4.65 | 4.26 | 4.81 | 4.36 | 4.87 | 4.48 | 4.91 | 4.50 |
| Skor PCA | 4.75 | 4.28 | 4.50 | 4.39 | 4.67 | 4.44 | 4.85 | 4.58 | 4.92 | 4.59 |

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan mengalami kenaikan pada indikator perilaku, kinerja, regulasi, permintaan dan kelembagaan pada tahun 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sudah mulai kembali kepada normal kecuali pada aspek perilaku. Dimensi perilaku menjelaskan sekitar 18.7% variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA.

a. Indeks Pesaingan Usaha Daerah dan Sektoral Menggunakan Seluruh Dimensi

Skor Rata-Rata Dimensi Persaingan Usaha Per Daerah



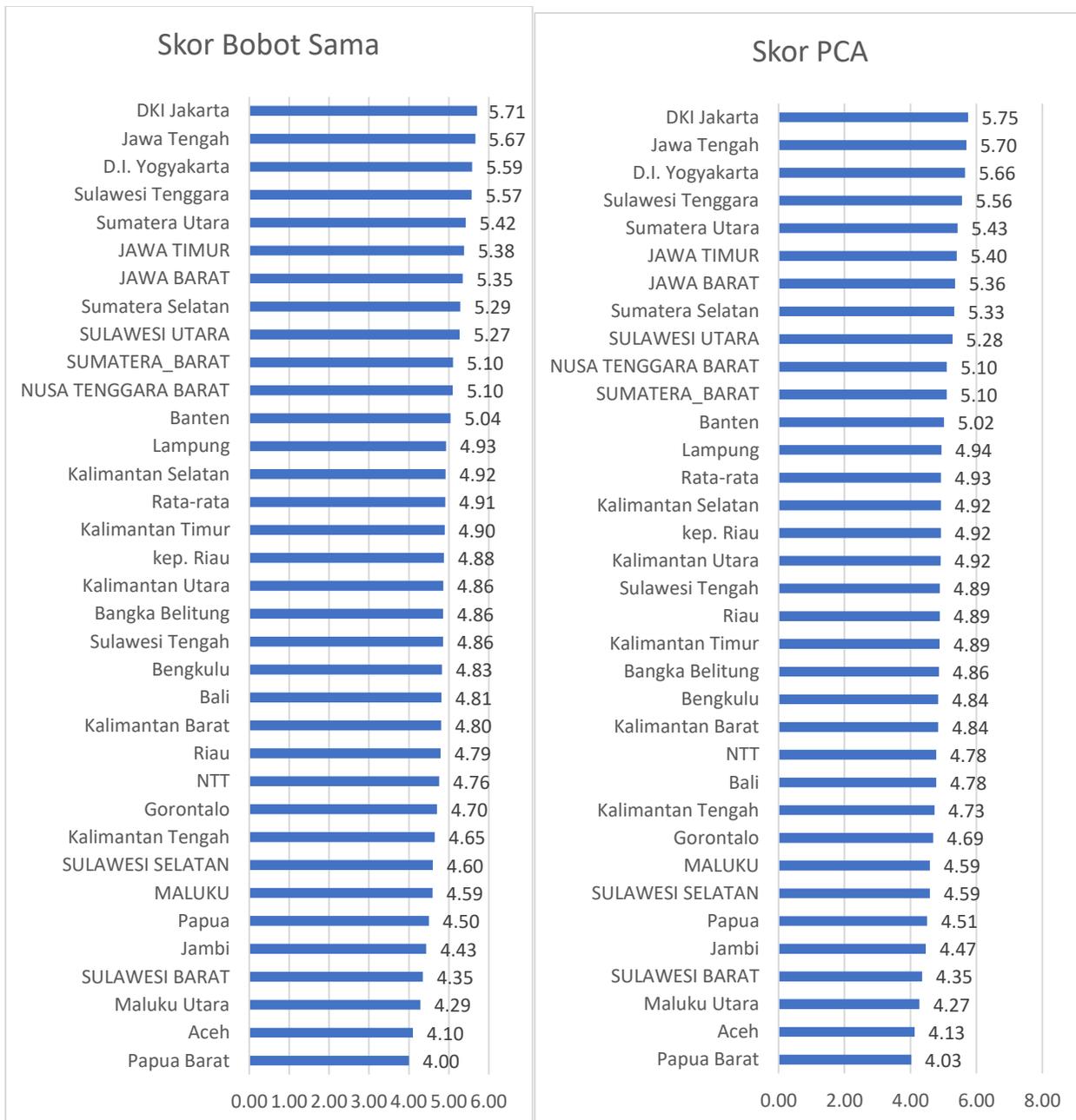
Gambar 4.2. Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia

Gambar 4.2 dan Grafik 4.1 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha berdasarkan provinsi menurut persepsi para pemangku kepentingan (stakeholder) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat. Dari hasil skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- **Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)**
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- **Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)**
Terdapat 4 provinsi dengan persaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama dan bobot PCA meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara
- **Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)**
Terdapat 24 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Selatan.
- **Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)**
Terdapat sekitar 6 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh dan Papua Barat.
- **Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)**
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah
- **Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)**
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.
- **Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)**
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA memberikan kesimpulan yang sama meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara sebagai 5 provinsi dengan skor persaingan usaha tertinggi seluruh dimensi, baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama. Kemudian, dari Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA menghasilkan 13 provinsi yang berada diatas skor rata-rata dan 21 provinsi yang berada dibawah skor rata-rata.

Provinsi yang memiliki skor diatas rata-rata meliputi Provinsi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Banten dan Lampung. Sedangkan, provinsi yang berada dibawah skor rata-rata meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, NTT, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh dan Papua Barat.

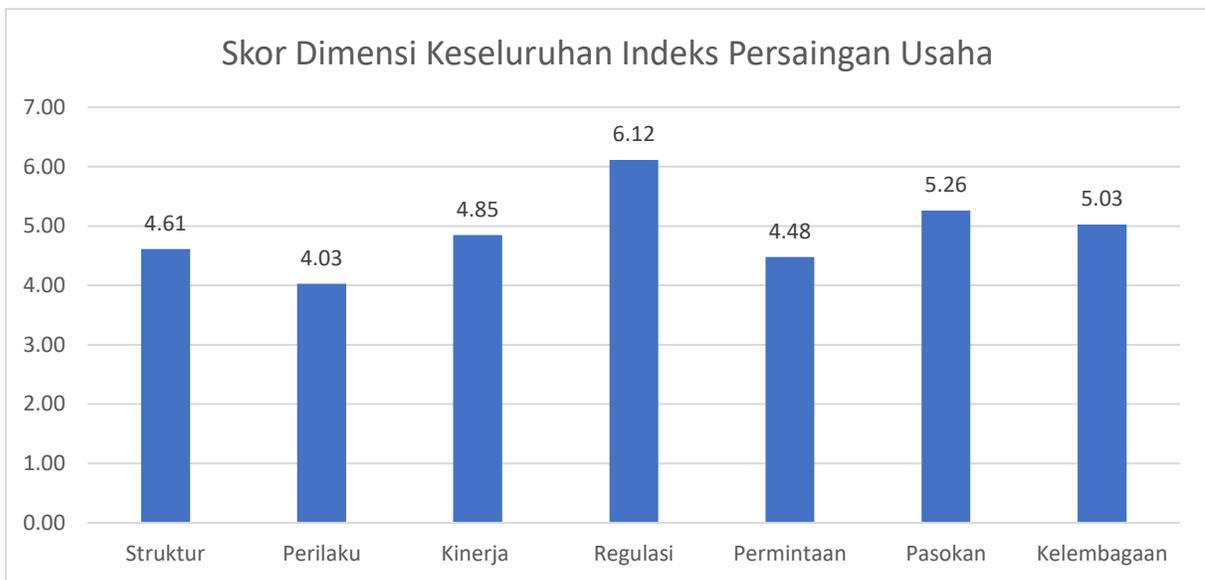


Grafik 4.1 Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot sama

Skor Rata-Rata Dimensi Persaingan Usaha Per Dimensi

Jika dilihat dari masing-masing dimensi (Grafik 4.2), dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi bukan terbesar dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi

persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.61, 4.03 dan 4.85. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat menguasai pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 6.12 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.

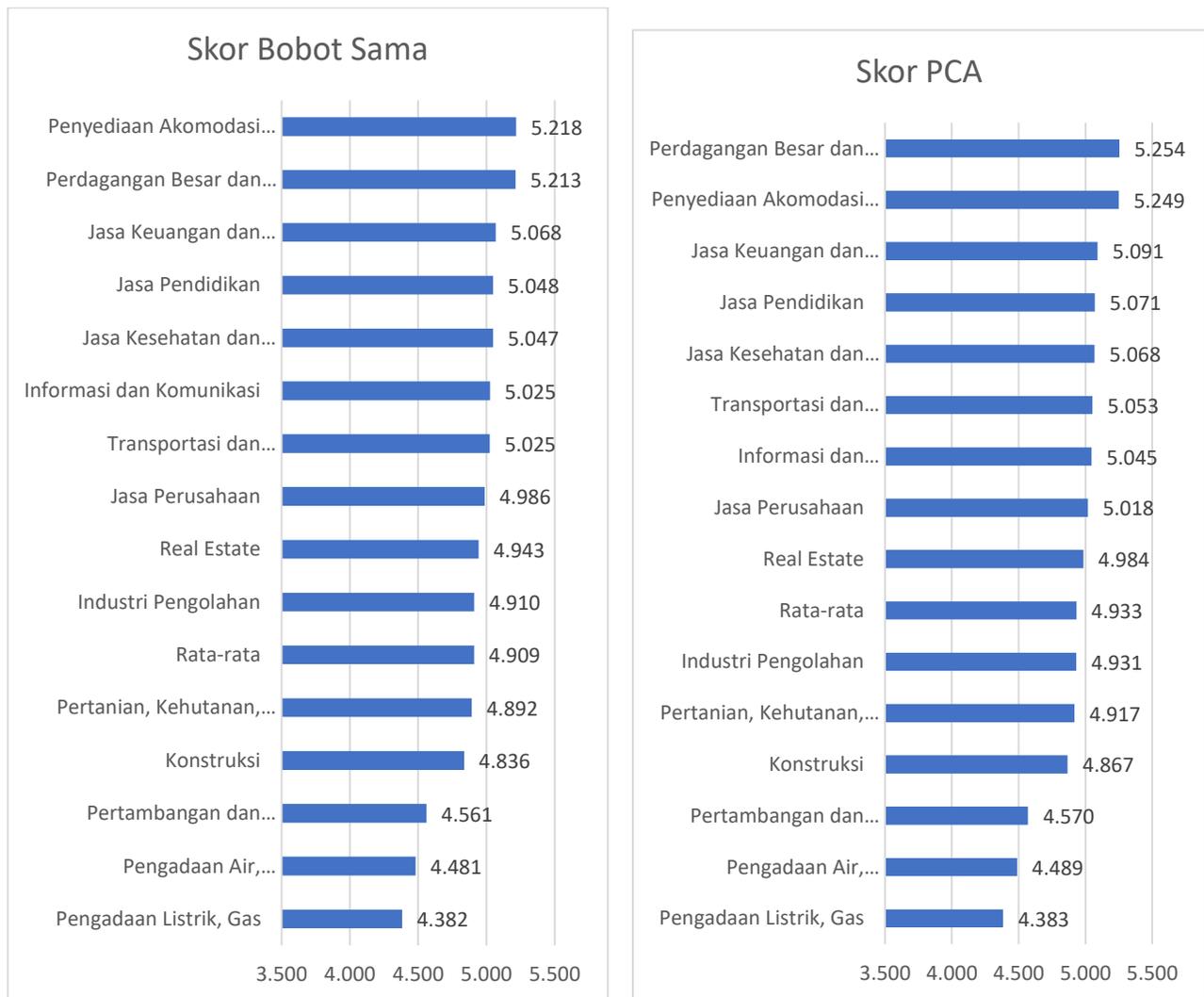


Grafik 4.2. Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha

Hasil Indeks Persaingan Usaha Per Sektor

Berdasarkan Grafik 4.3 diketahui bahwa terdapat 9 sektor yang berada di atas rata-rata indeks dan 6 sektor yang berada dibawah rata-rata indeks. Berdasarkan kategori yang ada, indeks persaingan usaha sektoral hanya memiliki 2 kategori yakni berada dalam kategori sedikit tinggi dan moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor yang memiliki persaingan yang sangat tinggi dan cukup tinggi, serta tidak terdapat juga sektor dengan persaingan yang sedikit rendah, cukup rendah dan sangat rendah. Sektor-sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha di atas rata-rata (menggunakan bobot sama dan PCA) di antaranya perdagangan besar dan eceran reparasi

mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; real esate. Kemudian sektor-sektor yang berada konsisten di bawah nilai rata-rata adalah sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, limbah dan daur ulang, dan pengadaan listrik dan gas.

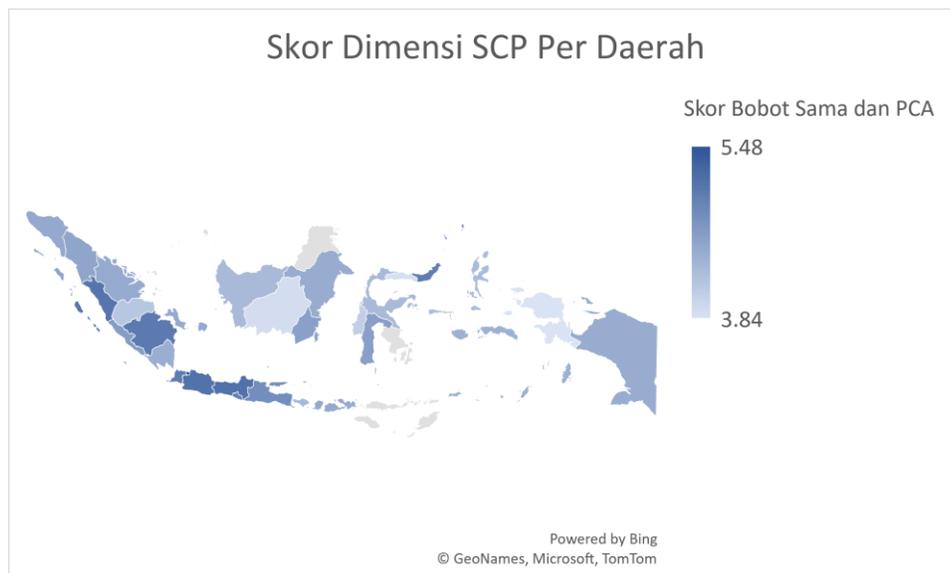


Grafik 4.3 Indeks Persaingan Usaha Sektoral

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 5.22 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 5.21. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.

b. Analisis Indeks Persaingan Usaha berdasarkan Dimensi S-C-P

Indeks Persaingan Usaha Per Daerah



Gambar 4.3. Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia Berdasarkan S-C-P

Gambar 4.3 dan Grafik 4.4 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha hanya berdasarkan dimensi S-C-P untuk seluruh Provinsi yang menjadi objek studi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi S-C-P ialah sekitar 4.03-4.85 (bobot sama dan PCA) atau terkategori berada dalam kondisi persaingan yang moderat menuju persaingan cukup tinggi. Dari skor tersebut menunjukkan dari sisi struktur pasar, perilaku dan

kinerja industri, secara umum persaingan usaha saat ini belum mengarah berada pada kondisi persaingan yang tinggi. Dari hasil skor indeks persaingan usaha dimensi SCP dengan bobot sama, diketahui kategori persaingan usaha untuk setiap Provinsi sebagai berikut:

Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.

- Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)

Tidak ada provinsi dengan persaingan usaha cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama.

- Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)

Terdapat 12 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat

- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)

Terdapat sekitar 22 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bali, Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Papua Barat

- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)

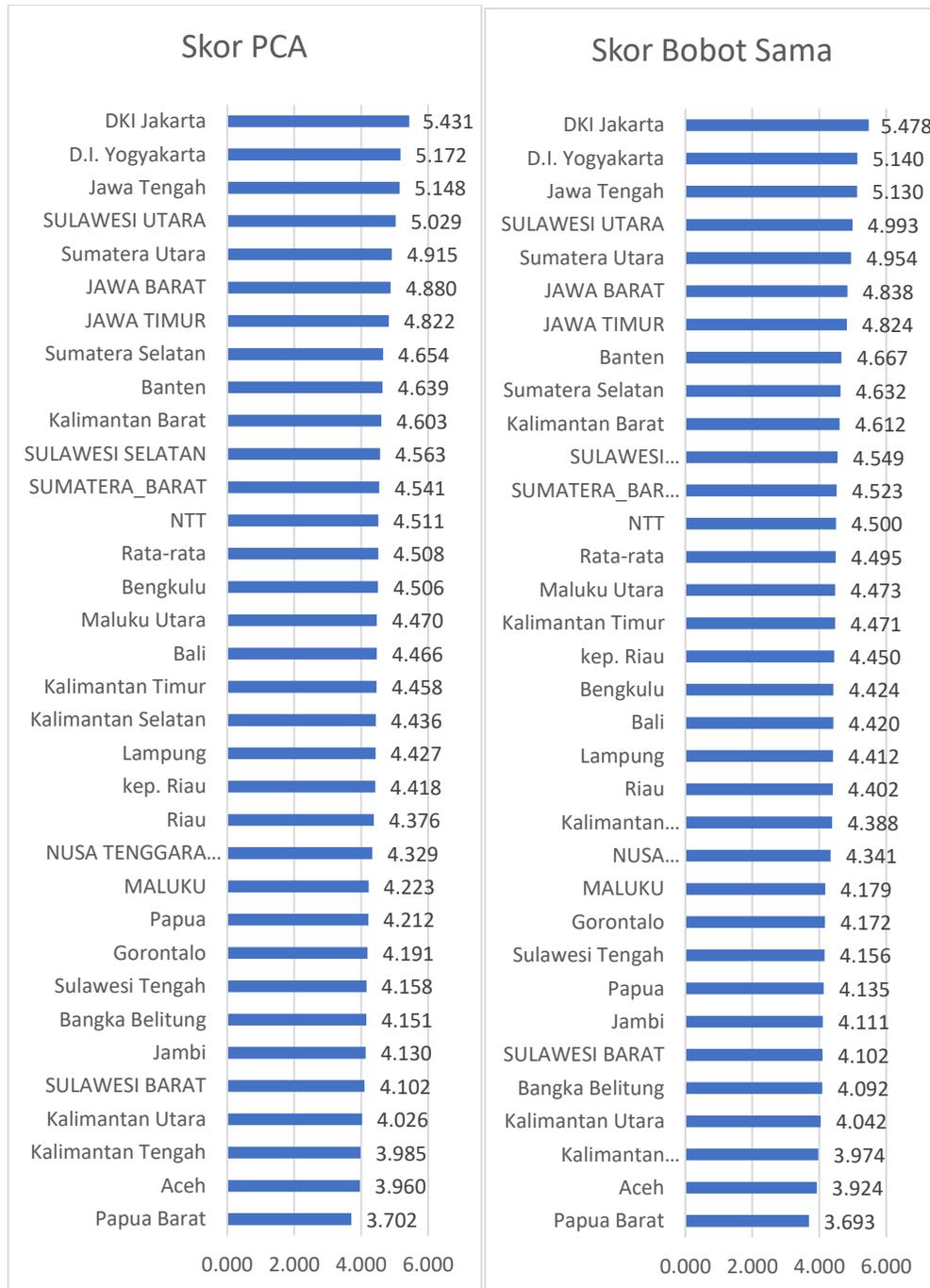
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah.

- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.

- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

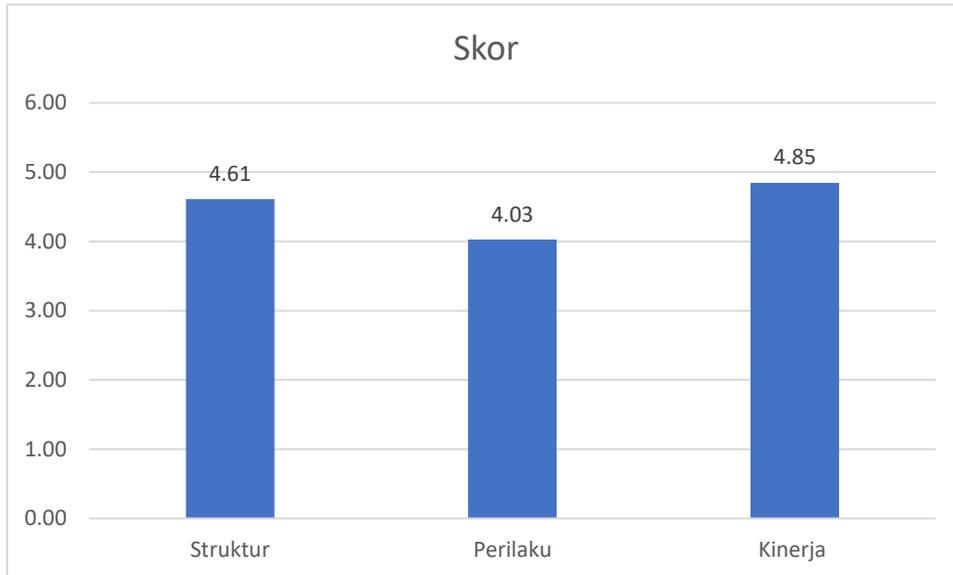


Grafik 4.4 Skor Indeks Persaingan Usaha Per Provinsi Dimensi SCP Bobot PCA dan Bobot Sama

Indeks Persaingan Usaha Daerah per Dimensi

Dari sisi dimensi S-C-P, dimensi perilaku industri memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur pasar dan kinerja industri dengan masing-masing dimensi SCP memiliki skor sebesar 4.61, 4.03 dan 4.85. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha,

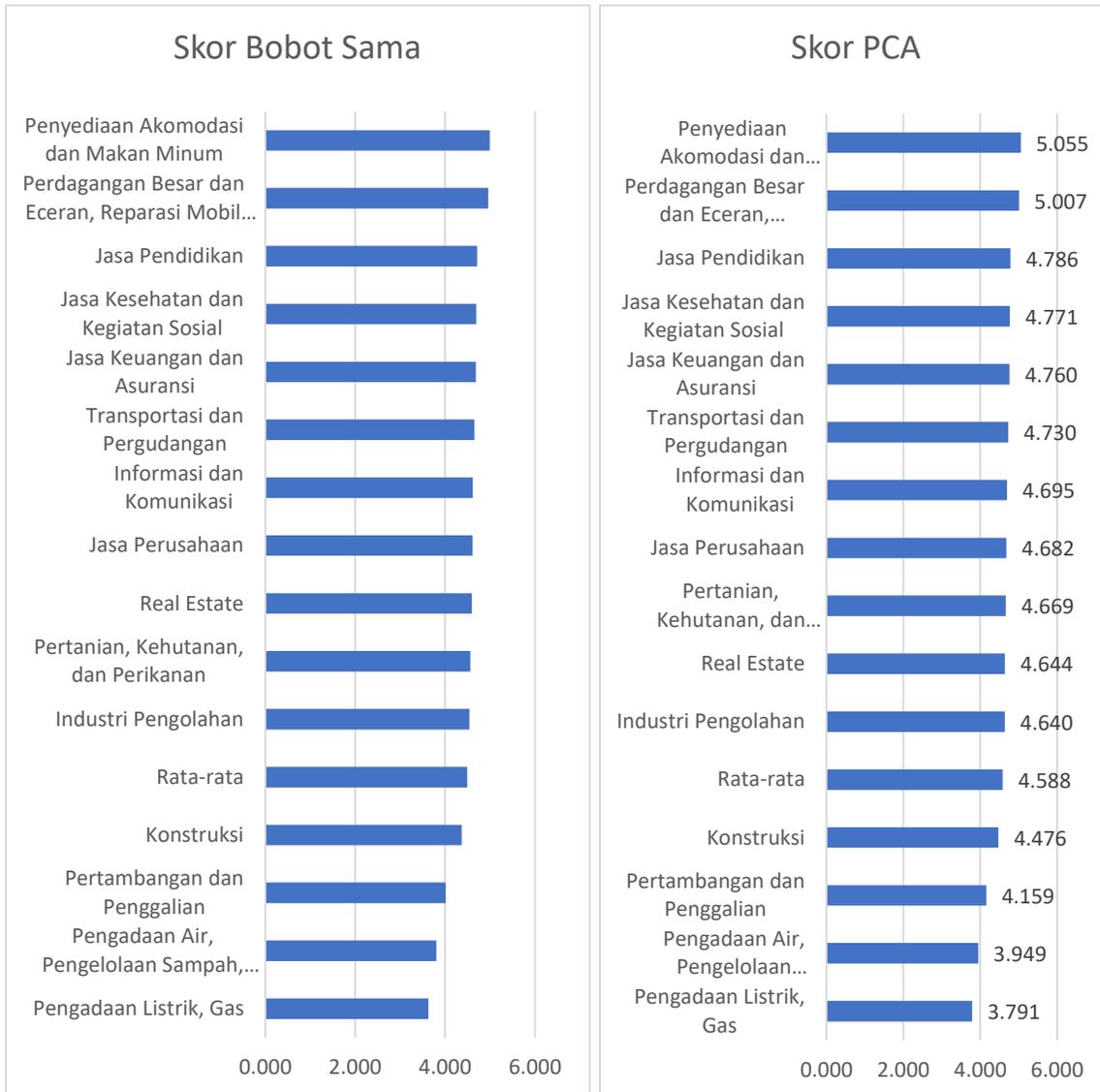
persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.



Grafik 4.5 Rata-rata dimensi persaingan usaha berdasarkan S-C-P

Berdasarkan Grafik 4.6, sektor yang memiliki persaingan tertinggi di atas rata-rata adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman (berdasarkan bobot PCA (5.05) dan bobot yang sama (5.00)). Meski memiliki skor terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi untuk masing-masing sektor tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pelaku usaha di sektor ini dan berkembangnya sektor lain seperti sektor pariwisata. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor dengan indeks tertinggi kedua tidak lepas dari perkembangan bisnis perdagangan yang meningkat dan jumlah pelaku usaha yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sama dengan tahun 2022 dan tahun 2021, Sektor yang pada umumnya dikuasi atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas dengan skor indeks sekitar 3.79 (bobot PCA) dan 3.63 (bobot sama), serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah dengan skor 3.95 (bobot PCA) dan 3.80 (bobot sama). Sektor pertambangan dan penggalan juga memiliki skor yang relatif rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena hambatan masuk dalam industri pertambangan dan penggalan relatif tinggi, utamanya dari sisi regulasi, permodalan dan teknologi.

Indeks Persaingan Usaha Daerah per Sektor



Grafik 4.6 Indeks Persaingan Usaha Sektoral berdasarkan S-C-P

4.2. Analisis Persaingan Usaha Per Provinsi

4.2.1. Provinsi Aceh

4.2.1.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.4 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Aceh berdasarkan persepsi responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Aceh terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan akomodasi makan dan minum; 2) Transportasi dan pergudangan; dan 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas; 2) Pertambangan dan penggalian dan 3) Informasi dan komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Industri Pengolahan. Kemudian terdapat 10 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan listrik dan gas 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) Kontruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Jasa keuangan dan asuransi; 8) Real estate; 9) Jasa Pendidikan; dan 10) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan 4 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, perhutanan, dan perikanan; 2) Transportasi dan pergudangan; 3) Informasi dan komunikasi; dan 4) Jasa perusahaan.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Aceh. Sementara itu dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan seperti kesepakatan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.

Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian besar responden menyatakan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki keuntungan terbesar. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Aceh relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya. Kemudian, sebagian responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Aceh.

Terkait kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menjawab ada kasus persaingan usaha, khususnya kesepakatan tender antar perusahaan. Kemudian, sebagian responden turut menyatakan bahwa ada aturan atau kebijakan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Aceh. Peraturan tersebut salah satunya adalah mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang membatasi layanan dan transaksi. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.4 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Aceh

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Aceh tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum 2) Transportasi dan pergudangan 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan listrik dan gas 2) Pertambangan dan pernggalian 3) Informasi dan komunikasi | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Khususnya hambatan mengenai aturan Qanun. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa masih terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki keuntungan terbesar. | |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. | |

| | |
|---|--|
| Hambatan investasi | 50% responden terdapat hambatan investasi di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah ketidaksiapan aturan pemerintah, infrastruktur dan pengusaha lokal. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab ada kasus persaingan usaha yaitu kesepakatan tender antar perusahaan. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 50% responden menyatakan ada peraturan dan kebijakan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Aceh. Peraturan tersebut salah satunya adalah mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang membatasi layanan dan transaksi. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.1.2. Indeks Persaingan Usaha

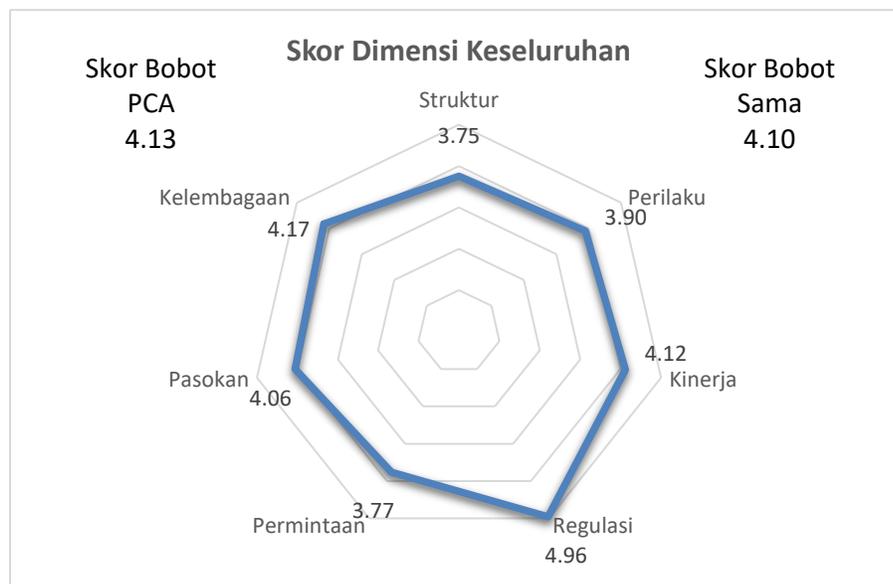
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023 indeks persaingan usaha di Provinsi Aceh dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,10 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,51. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi regulasi,

struktur, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.7 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Aceh dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Aceh tahun 2023 ini sebesar 4,13 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,10 dengan kategori yang sama. Grafik 4.7 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,96. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,75. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Aceh terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

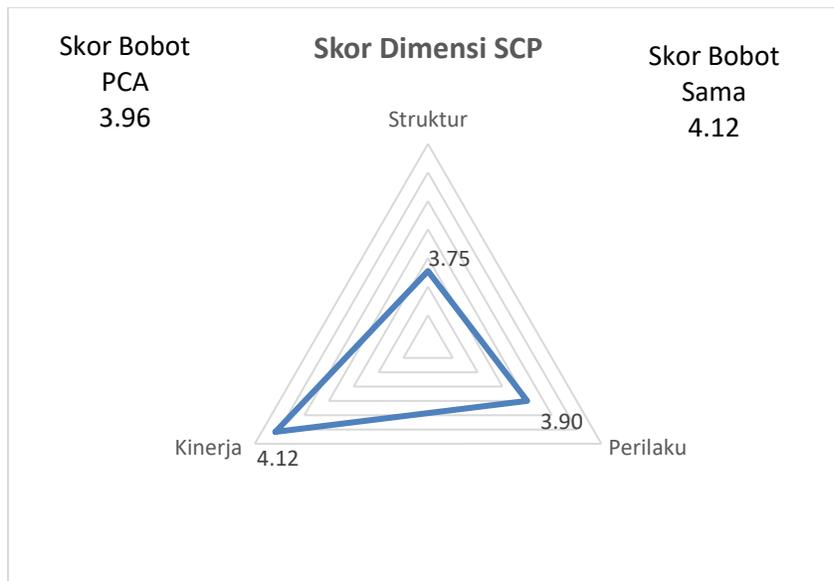
Grafik 4.7. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Aceh Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.8 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Aceh hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Aceh tahun 2023 ini sebesar 3,96 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,12 atau terkategori yang sama. Grafik 4.8 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,12. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,75. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Aceh ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara itu, rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar yang ada di Provinsi ini kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.8. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Aceh Dimensi SCP



4.2.2. Provinsi Sumatera Utara

4.2.2.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.5 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara terkategori tinggi, yang didapatkan dari penyimpulan persepsi seluruh responden. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Industri pengolahan, dan 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas, 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, dan 3) Informasi dan komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang memiliki jumlah pelaku usaha yang sedikit dan sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara atau daerah.

Dilihat dari konsentrasi industri, tidak terdapat sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi. Kemudian terdapat 12 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Industri pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,

dan Daur Ulang; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Informasi dan Komunikasi; 8) Jasa Keuangan dan Asuransi; 9) Real estate; 10) Jasa perusahaan; 11) Jasa pendidikan; dan 12) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan 3 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalan dan 3) Transportasi dan Pergudangan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa jasa keuangan dan asuransi, pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keuntungan terbesar.

Sebagian besar responden juga menyatakan adanya hambatan investasi di Provinsi Sumatera Utara. Terkait kasus persaingan usaha, seluruh responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.5 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2. Industri Pengolahan 3. Penyediaan akomodasi dan makan minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan listrik dan gas 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3. Informasi dan komunikasi | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kesepakatan harga. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Masing-masing responden menyatakan bahwa jasa keuangan dan asuransi, pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan | |

| | |
|---|---|
| | makan minum, serta industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena Sumatera Utara. |
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Sumatera Utara. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara. |

4.2.2. Indeks Persaingan Usaha

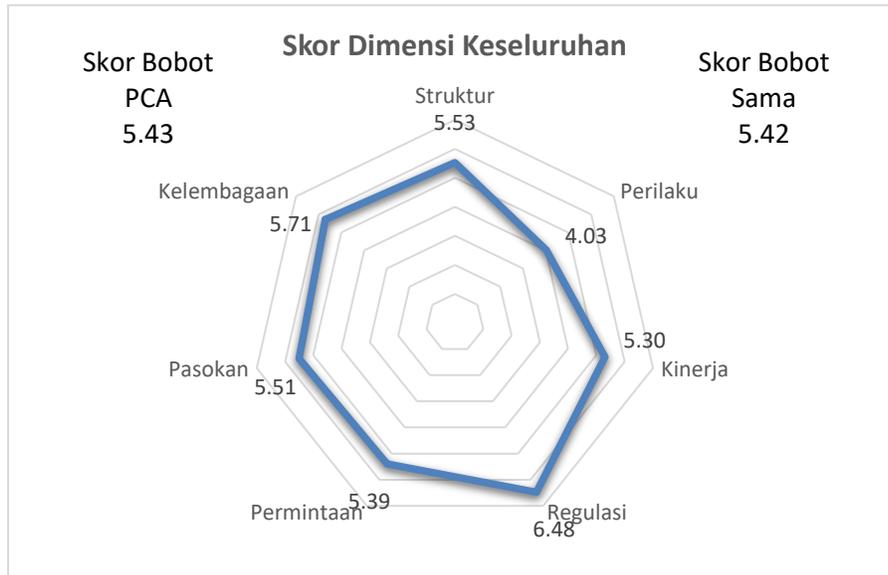
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,42 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,18. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.9 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sumatera Utara tahun 2023 ini sebesar 5,43 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,42 dengan kategori yang sama. Grafik 4.9 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan.

Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,48. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek regulasi regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.9. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara Dimensi Keseluruhan



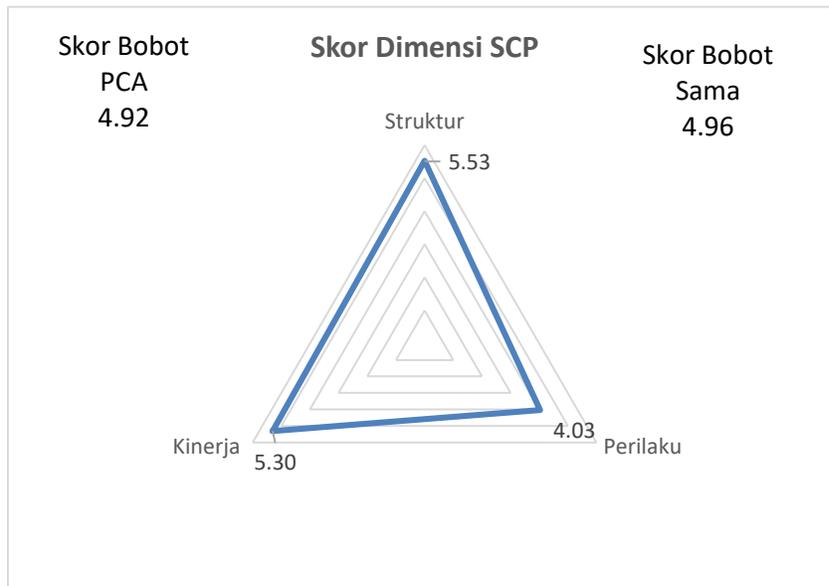
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.10 menunjukkan indeks persaingan usaha di Sumatera Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Utara tahun 2023 ini sebesar 4,92 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,95 dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.10 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,53. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Sumatera Utara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Utara

masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.10. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara Dimensi SCP



4.2.3. Provinsi Sumatera Barat

4.2.3.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.6 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan persepsi responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sumatera Barat terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden menyatakan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah; 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik dan gas, 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan 3) Pertambangan dan penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 12 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan; 4) Pengadaan listrik, gas; 5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 6) Kontruksi; 7) Transportasi dan pergudangan; 8) Informasi dan komunikasi; 9) Real

estate; 10) Jasa perusahaan 11) Jasa pendidikan; 12) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, seperti Perda yang tidak mengizinkan retail besar beroperasi di Sumatera Barat. Sementara itu dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan sebagian responden lain menyatakan sektor transportasi & pergudangan dan penyediaan akomodasi & makan minum memiliki keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga sebagian besar responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Barat relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar, tetapi ada produk tertentu yang harganya lebih murah seperti hasil pertanian dan pakaian. Sebagian besar responden juga menyatakan terdapat hambatan investasi di Sumatera Barat, dikarenakan adanya Tanah Ulayat yang menghambat perkembangan investasi. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.

Sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sumatera Barat. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat Perda yang membahas perlindungan terhadap usaha kecil. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya pada *fashion*.

Tabel 4.6 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Barat

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sumatera Barat tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi Mobil dan sepeda motor 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum 3) Jasa keuangan dan asuransi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan listrik dan gas 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3. Pertambangan dan penggalian | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, seperti perizinan peraturan retail besar seperti Alfamart dan Indomaret dan budaya yaitu tanah ulayat. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan dalam menentukan kesepakatan harga. | |

| | |
|---|---|
| <p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p> | <p>50% responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan dua responden lain menyatakan sektor transportasi & pergudangan dan penyediaan akomodasi & makan minum memiliki keuntungan terbesar.</p> |
| <p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p> | <p>75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar, tetapi ada produk tertentu yang harganya lebih murah seperti hasil pertanian dan pakaian.</p> |
| <p>Hambatan investasi</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Sumatera Barat, dikarenakan adanya resistensi masyarakat dan Tanah Ulayat yang menghambat perkembangan investasi.</p> |
| <p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p> | <p>50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, dua responden menjawab ada kasus persaingan usaha yaitu kesepakatan tender antar perusahaan.</p> |

| | |
|---|--|
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sumatera Barat. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat Perda yang membahas perlindungan terhadap usaha kecil. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya pada <i>fashion</i> . |

4.2.3. Indeks Persaingan Usaha

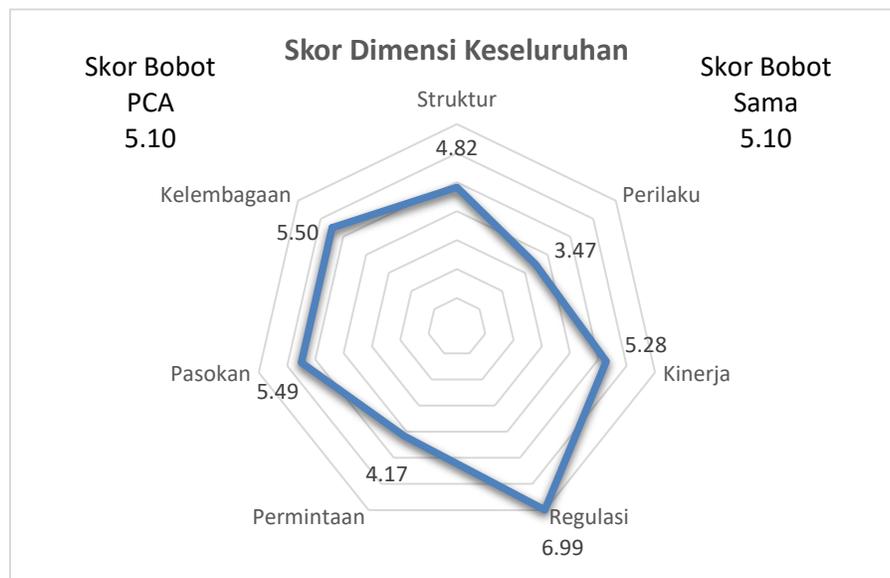
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,10 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,20. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.11 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Barat tahun 2023 ini sebesar 5,10 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,10 dengan kategori yang sama. Grafik 4.11 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum

dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,99. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,47. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.11. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Barat Dimensi Keseluruhan



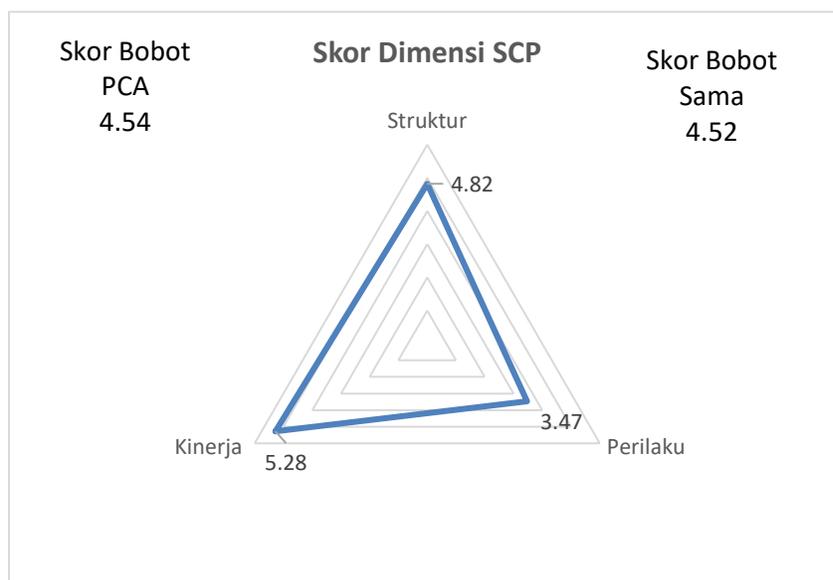
- **Indeks Dimensi SCP**

Grafik 4.12 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Barat tahun 2023 ini sebesar 4,54 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,52 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.12 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin

besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,28. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,47. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sumatera Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.12. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Barat Dimensi SCP



4.2.4. Provinsi Riau

4.2.4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.7 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Riau berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Riau terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan 3) Informasi dan komunikasi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya variasi produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian, dan 3) Informasi dan komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pertambangan dan penggalian. Kemudian, terdapat 10 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Kontruksi; 4) Transportasi dan pergudangan; 5) Informasi dan komunikasi; 6) Jasa keuangan dan asuransi; 7) Real estate; 8) Jasa perusahaan; 9) Jasa pendidikan; dan 10) Jasa kesehatan dan

kegiatan sosial. Sedangkan, 4 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Industri pengolahan; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan 4) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Riau. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, Seluruh responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Riau relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian besar responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Riau, dikarenakan adanya masalah perizinan. Sebagian besar responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha di Riau. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Riau. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sektor kuliner dan *fashion*.

Tabel 4.7 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Riau

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Riau tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Informasi dan komunikasi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertanian, perkebunan, dan perikanan 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolahan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Tinggi |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Rendah |
| 6 | Konsentrasi Moderat | |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Seluruh responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 100% responden tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Riau. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Riau. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di bidang kuliner dan <i>fashion</i> . |

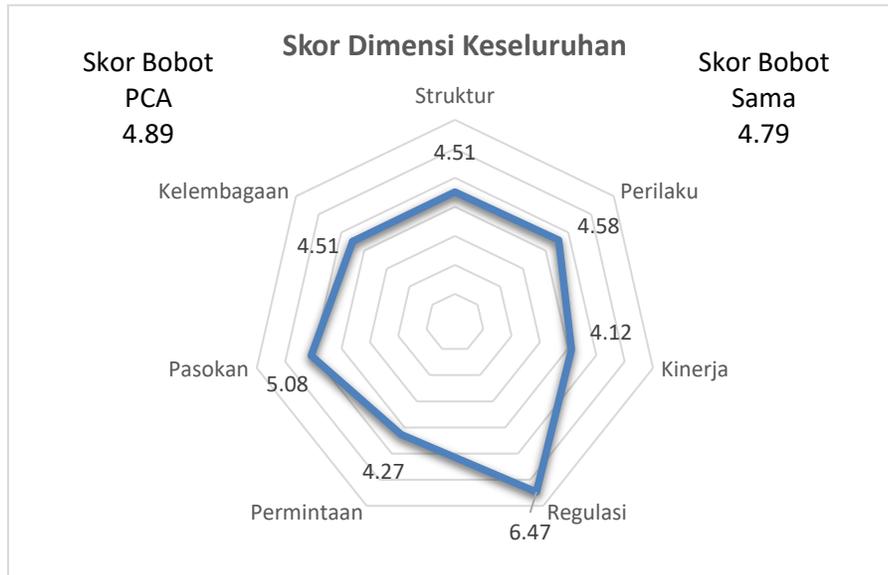
4.2.4. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Riau dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,79 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,65. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja dan perilaku.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.13 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Riau dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Provinsi Riau tahun 2022 ini sebesar 4,89 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,79 dengan kategori yang sama. Grafik 4.13 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,47. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,12. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kinerja menunjukkan bahwa kinerja industri yang ada di Riau ini kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.13. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Riau Dimensi Keseluruhan

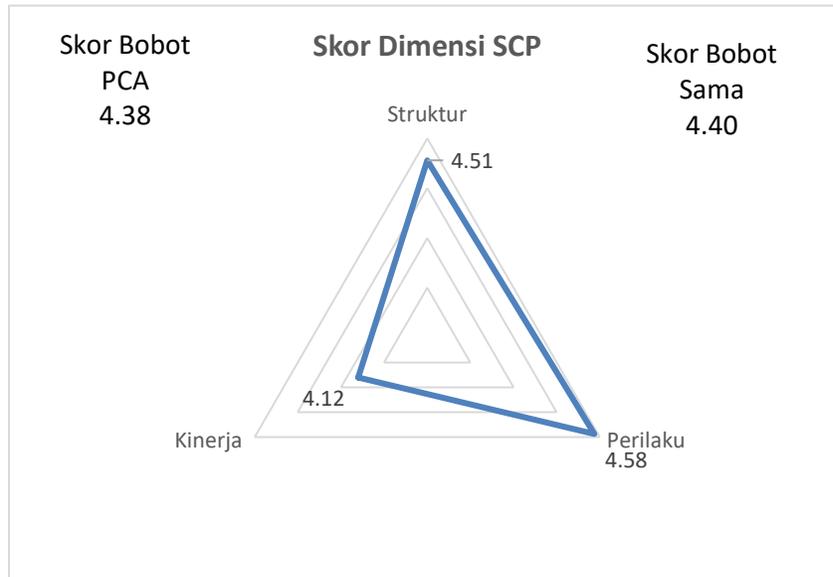


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.14 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Riau hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Riau tahun 2023 ini sebesar 4,38 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,40 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.14 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi perilaku memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,58. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,12. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perilaku industri mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kinerja menunjukkan bahwa kinerja industri yang ada di Provinsi

ini kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.14. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Riau Dimensi SCP



4.2.5. Provinsi Jambi

4.2.5.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.8 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Jambi berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Jambi terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3) Industri pengolahan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang; dan 3) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah dan terdapat hambatan yang tinggi bila memasuki sektor tersebut.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan listrik, gas; dan 2) Pengadaan Air Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat

2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, 1) Jasa keuangan dan asuransi; dan 2) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan 11 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi Pergudangan; 7) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 8) Informasi dan komunikasi; 9) Real Estate; 10) Jasa Perusahaan; dan 11) Jasa Pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jambi. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Sisanya menyatakan bahwa masih adanya kesepakatan harga yang dilakukan asosiasi. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan pertambangan dan penggalian, sebagian responden menyebut pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jambi relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Kemudian, seluruh responden menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Jambi. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.8 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jambi

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|--------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Provinsi Jambi tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum 3) Industri pengolahan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan listrik dan gas 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. 3) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| | dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi. |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan pertambangan dan penggalian, 50% responden menyebut pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar (relatif sama). |
| Hambatan investasi | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Jambi |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Jambi. |

| | |
|---|---|
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |
|---|---|

4.2.5. Indeks Persaingan Usaha

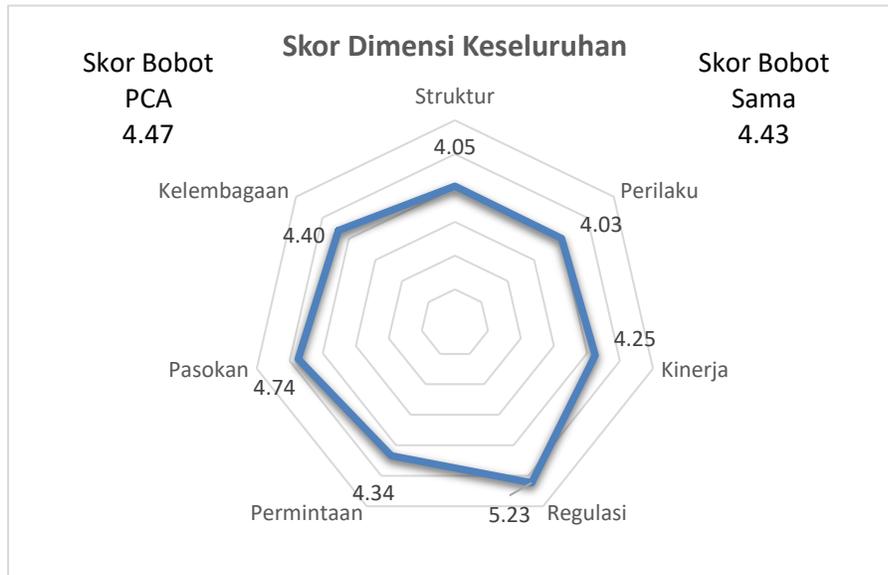
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,43 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,29. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.15 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jambi tahun 2023 ini sebesar 4,47 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,43 dengan kategori yang sama. Grafik 4.15 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,23. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi Jambi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jambi masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang

melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.15. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jambi Dimensi Keseluruhan

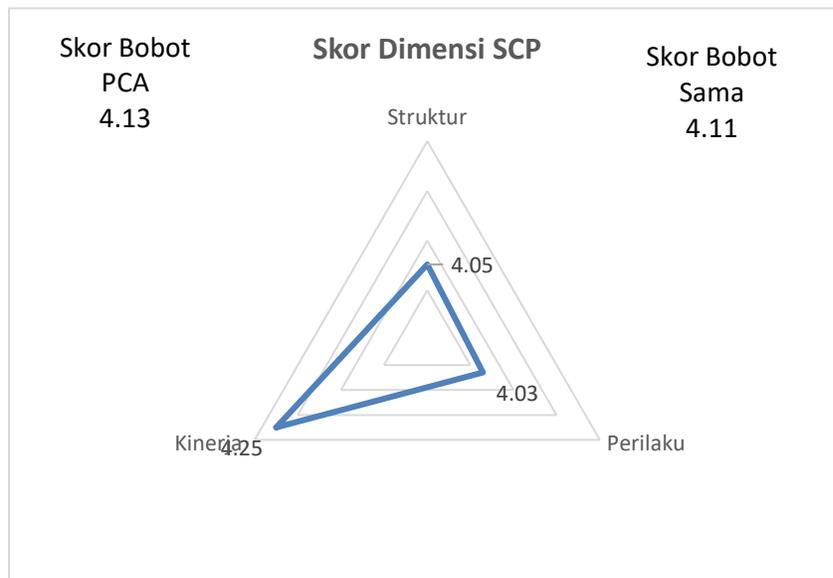


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.16 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Jambi tahun 2023 ini sebesar 4,13 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,11 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.16 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,25. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Jambi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi realtif secara efisien, produktifitas yang baik, mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan keuntungan yang wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jambi masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.16. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jambi Dimensi SCP



4.2.6. Provinsi Sumatera Selatan

4.2.6.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.9 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum sebagian besar responden menyatakan bahwa persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan terkategori tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3) Industri pengolahan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang; dan 3) Pengadaan listrik, gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 7 sektor dipersepsikan terkonsentrasi moderat yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3) Konstruksi; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Informasi dan

Komunikasi. Sedangkan terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni; 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri pengolahan; 3) Pengadaan listrik, gas; 4) Jasa keuangan dan asuransi; 5) Real estate; 6) Jasa perusahaan; 7) Jasa pendidikan; dan 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh asosiasi. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian besar responden menyatakan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan industri pengolahan memiliki keuntungan terbesar. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar, utamanya produk-produk pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah sekitarnya. Kemudian, seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.9 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Selatan

| Pertanyaan | Deskripsi |
|------------------------------------|--|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan tinggi. |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2) Penyediaan akomodasi dan makan 3) Industri pengolahan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan penggalian 2) Pengadaan listrik dan gas 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Rendah |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan industri pengolahan memiliki keuntungan terbesar | |

| | |
|---|--|
| <p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.</p> |
| <p>Hambatan investasi</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.</p> |
| <p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p> | <p>100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.</p> |
| <p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p> | <p>100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan.</p> |
| <p>Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.</p> |

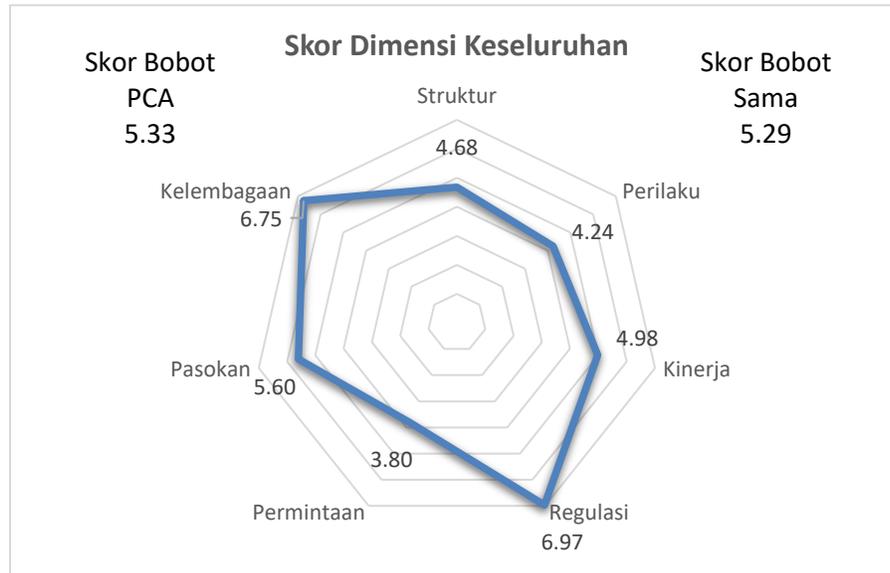
4.2.6. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,29 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,39. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.17 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sumatera Selatan tahun 2023 ini sebesar 5,33 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,29 dengan kategori yang sama. Grafik 4.17 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,97. Sementara dimensi permintaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,80. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi permintaan menunjukkan bahwa dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Sumatera Selatan cenderung bersifat inelastis, relatif kurang memiliki varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif rendah.

Grafik 4.17. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Dimensi Keseluruhan

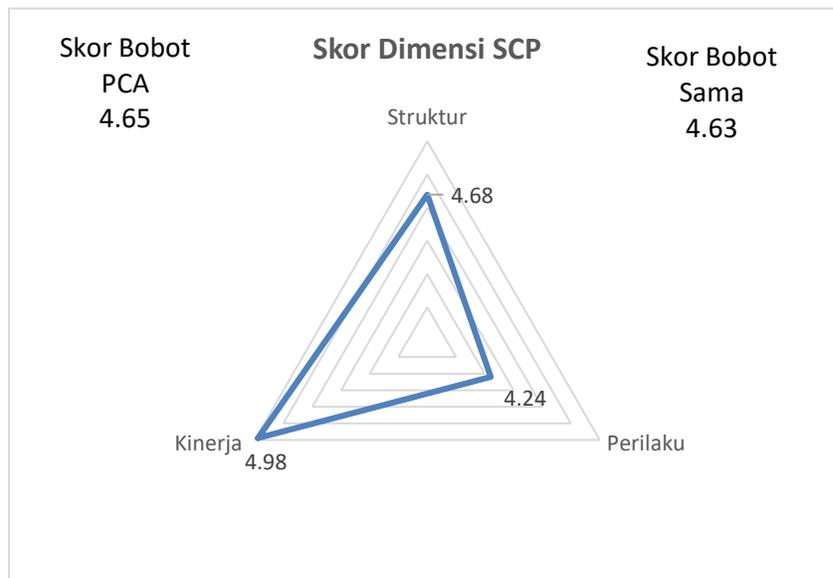


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.18 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Selatan tahun 2023 ini sebesar 4,65 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,63 atau dalam kategori yang sama. Grafik 4.18 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,98. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,24. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sumatera Selatan ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara itu, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Selatan masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.18. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Dimensi SCP



4.2.7. Provinsi Bengkulu

4.2.7.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.10 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Bengkulu terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2 Real estate, dan 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Industri pengolahan; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan 3) Pengadaan listrik, gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Kontruksi. Sedangkan, terdapat 13 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu; 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik, Gas; 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 7) Transportasi dan

Pergudangan; 8) Informasi dan Komunikasi; 9) Jasa keuangan dan asuransi 10) Real Estate; 11) Jasa Perusahaan; 12) Jasa pendidikan; dan 13) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, sebagian besar responden menyatakan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan real estate memiliki keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti beras, cabai, telur, bawang sayur, semen, pakaian serta bahan pokok lainnya. Satu responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Bengkulu, dikarenakan adanya peraturan daerah yang tidak tertulis, dan ketidakpastian pemerintah.

Sebagian besar responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha di Bengkulu. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bengkulu. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sektor kuliner.

Tabel 4.10 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Bengkulu

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisipersaingan usaha di Bengkulu tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2) Real estate 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri pengolahan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. 3) Pengadaan listrik dan gas | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Tinggi |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang terindikasi dari TBS kelapa sawit. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan real estate memiliki keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti beras, cabai, telur, bawang, sayur, semen, pakaian serta bahan pokok lainnya |
| Hambatan investasi | 75% responden tidak terdapat hambatan investasi di Bengkulu. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bengkulu. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya kuliner. |

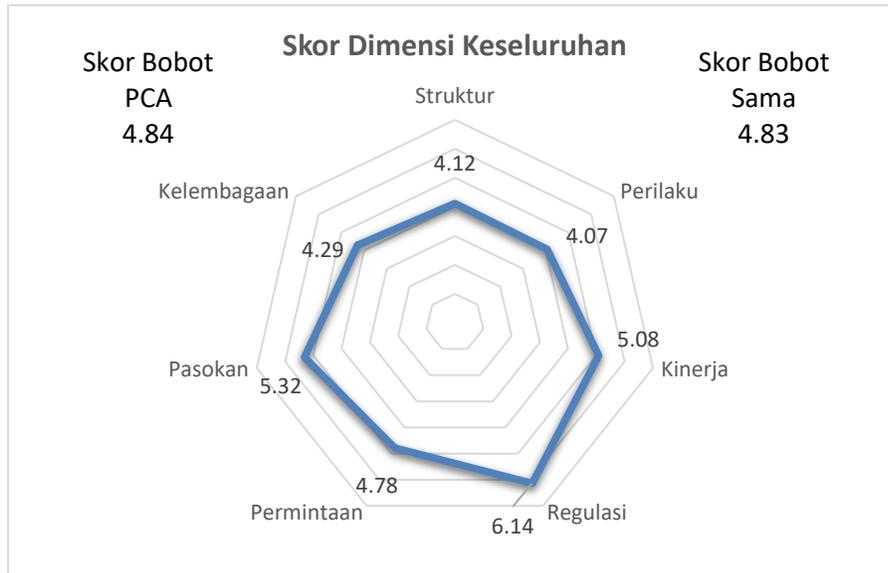
4.2.7. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,83 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,88. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan, struktur dan perilaku.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.19 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Bengkulu tahun 2022 ini sebesar 4,84 atau sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,83 atau dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.19 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,14. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,07. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bengkulu masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.19. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bengkulu Dimensi Keseluruhan

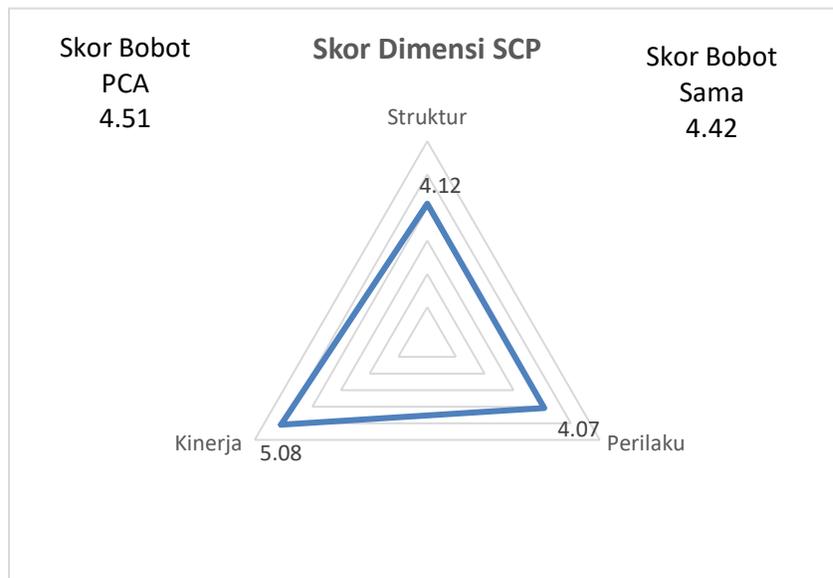


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.20 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bengkulu hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Bengkulu tahun 2023 ini sebesar 4,51 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,42 atau dalam kategori moderat. Grafik 4.20 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,08. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,07. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Bengkulu ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bengkulu masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.20. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bengkulu Dimensi SCP



4.2.8. Provinsi Lampung

4.2.8.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.11 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Lampung berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Lampung terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden merepresentasikan hal tersebut. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan 3) Kontruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Pengadaan Listrik, Gas; 4) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan

akomodasi dan makan minum; dan 8) Real estate. Kemudian, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Konstruksi; 3) Informasi dan Komunikasi; 4) Jasa Keuangan dan Asuransi; 5) Jasa Perusahaan; 6) Jasa Pendidikan; dan 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Lampung. Sedangkan, satu responden menyatakan bahwa terdapat hambatan berupa regulasi dan birokrasi di daerah lebih kaku dan rumit. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar, sisanya masing-masing responden menyatakan bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum, dan konstruksi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga sebagian responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Lampung relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Lampung. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat hambatan berupa regulasi dan fasilitas umum. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.

Sebagian responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Lampung. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya pada *fashion*.

Tabel 4.11 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Lampung

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Lampung tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Kontruksi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas. 2) Pertambangan dan Penggalian. 3) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, satu responden menyatakan bahwa terdapat hambatan berupa regulasi dan birokrasi di daerah lebih kaku dan rumit. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan bahwa pertanian, kehutanan, perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar, sisanya masing-masing responden menyatakan bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum serta kontruksi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Lampung berupa regulasi dan fasilitas umum. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 50% responden menyatakan ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Lampung. |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di bidang kebutuhan dasar. |

4.2.8. Indeks Persaingan Usaha

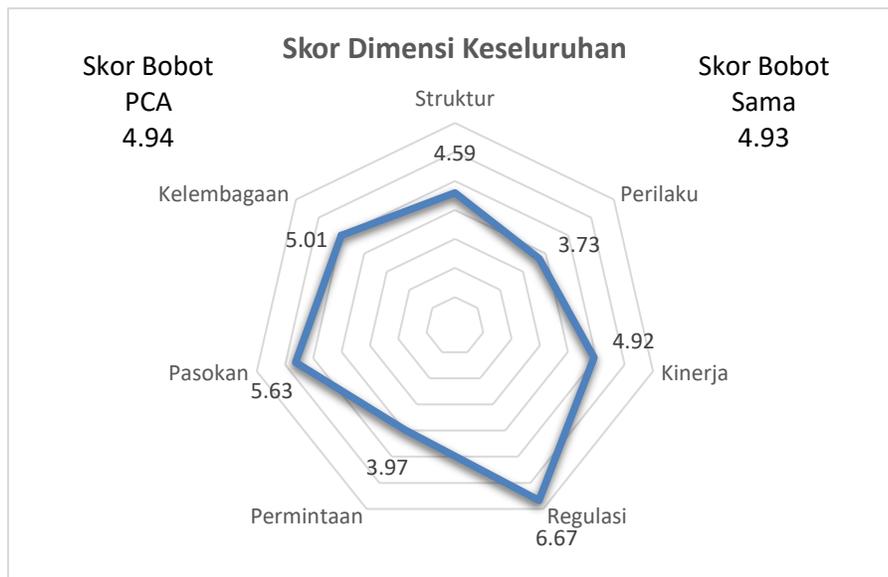
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Lampung dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,93 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,99. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.21 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Lampung dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Lampung tahun 2023 ini sebesar 4,94 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,93 dengan kategori yang sama. Grafik 4.21 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,67. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,73. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Lampung ini telah mendorong terciptanya persaingan

usaha yang tinggi Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Lampung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.21. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Lampung Dimensi Keseluruhan



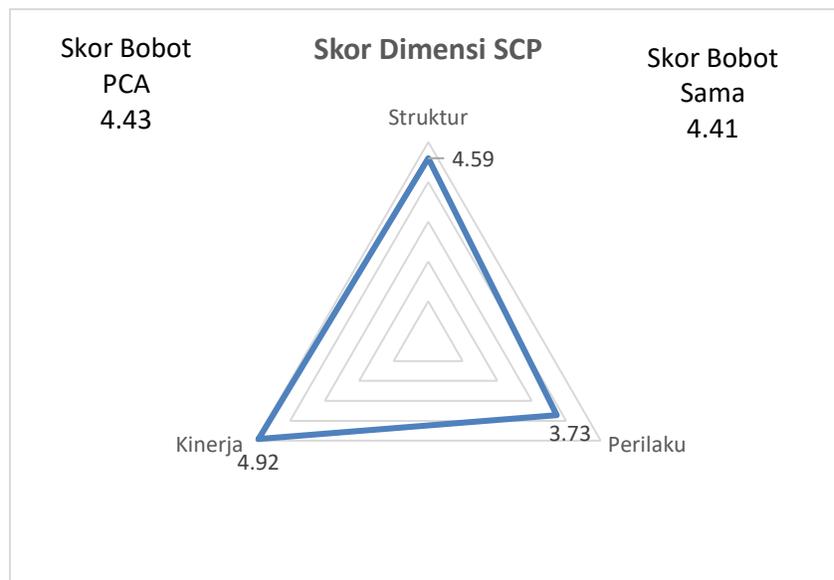
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.22 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Lampung hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usahadi Lampung tahun 2023 ini sebesar 4,43 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,41 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.22 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rataskor tertinggi sebesar 4,92. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,73. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Lampung ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Lampung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.22. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Lampung Dimensi SCP



4.2.9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.2.9.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.12 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Bangka Belitung berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Bangka Belitung terkategori tinggi, di mana seluruh responden merepresentasikan hal tersebut. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 3) Jasa perusahaan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik Dan Gas; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan 3) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pengadaan listrik, gas; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan 3) Informasi dan komunikasi. Kemudian, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Jasa keuangan dan asuransi; dan 2) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk

sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah ada 10, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; dan 10) Jasa Pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan melalui asosiasi. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sebagian responden menyebut konstruksi, dan responden lainnya menyebut industri pengolahan dan pertambangan & penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Bangka Belitung relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Seluruh responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Bangka Belitung, dikarenakan adanya resitensi masyarakat. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.

Seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bangka Belitung. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya UMKM.

Tabel 4.12 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|--------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di bangka belitung tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum 3) Jasa perusahaan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan listrik dan gas 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 3) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Tinggi |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan melalui asosiasi. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 50% responden menyebut konstruksi, dan responden lainnya menyebut industri pengolahan dan pertambangan & penggalian merupakan | |

| | |
|--|--|
| | <p>sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui..</p> |
| <p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkandengan daerah sekitar.</p> |
| <p>Hambatan investasi</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Bangka Belitung, dikarenakan adanya resitensi masyarakat. Sedangkan, sisanya menyatakan bahwa tidak ada hambatan investasi di Provinsi ini.</p> |
| <p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p> | <p>75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.</p> |
| <p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p> | <p>100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bangka Belitung.</p> |
| <p>Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.</p> |

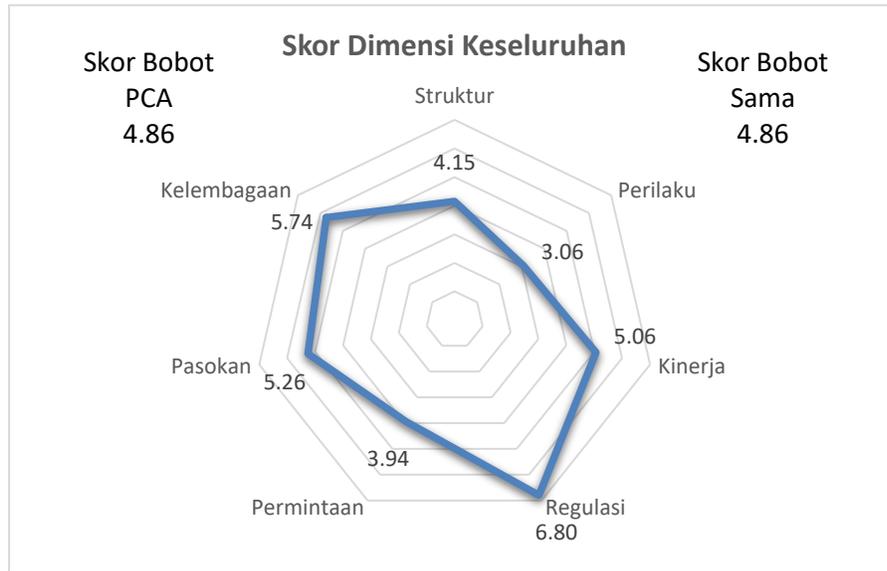
4.2.9. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,86 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,87. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur dan perilaku.

- **Indeks Dimensi Keseluruhan**

Grafik 4.23 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Bangka Belitung tahun 2023 ini sebesar 4,86 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,86 dengan kategori yang sama. Grafik 4.23 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,80. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,06. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Bangka Belitung ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bangka Belitung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.23. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bangka Belitung Dimensi Keseluruhan



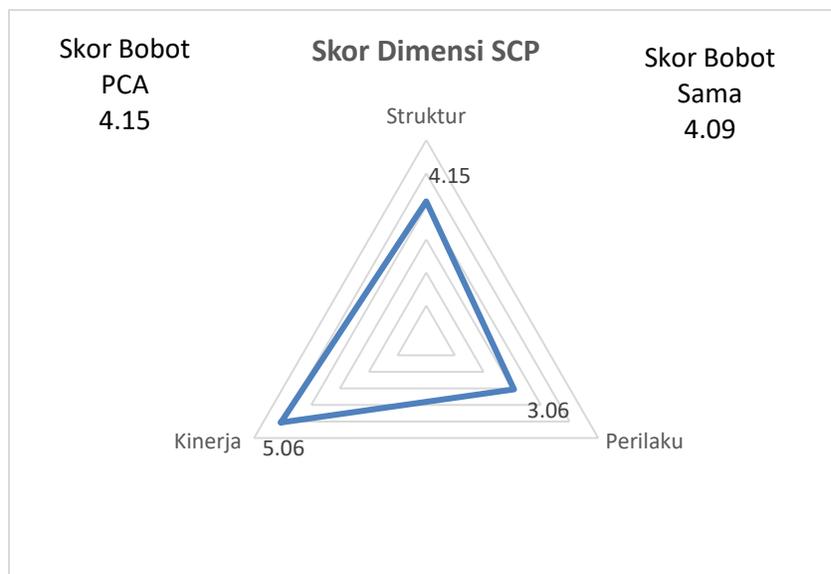
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.24 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bangka Belitung hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Bangka Belitung tahun 2023 ini sebesar 4,15 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,09 atau dengan kategori sama. Grafik 4.24 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,06. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,06. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Bangka Belitung ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien,

memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bangka Belitung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.24. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bangka Belitung Dimensi SCP



4.2.10. Provinsi Kepulauan Riau

4.2.10.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.13 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kepulauan Riau terkategori tinggi, dimana sebagian besar responden merepresentasikan hal tersebut. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Transportasi dan pergudangan, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) Jasa keuangan dan asuransi; 5) Real estate; 6) Jasa

perusahaan; 7) Jasa pendidikan; dan 8) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah ada 7, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 7) Informasi dan komunikasi. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa masing-masing responden menyatakan bahwa transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, dan real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau lebih mahal dibanding daerah sekitar, dikarenakan produk yang disediakan dipasok dari daerah lain, seperti faktor geografis yang menyebabkan tambahan *cost* pengangkutan dan bukan sebagai daerah produksi. Mengenai hambatan investasi, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kep. Riau. Sedangkan, sisanya menyatakan ada konsistensi UU dan peraturan daerah yang berubah-ubah. Seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kepulauan Riau. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya kuliner.

Tabel 4.13 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Riau

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kep. Riau tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan 2) Transportasi dan pergudangan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3) Pertambangan dan penggalian | |
| | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |

| | |
|--|---|
| <p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p> | <p>Masing-masing responden menyatakan bahwa transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, kontruksi, dan real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.</p> |
| <p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p> | <p>75% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain, seperti faktor geografis yang menyebabkan tambahan <i>cost</i> pengangkutan dan bukan sebagai daerah produksi.</p> |
| <p>Hambatan investasi</p> | <p>75% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kep. Riau. Sedangkan, sisanya menyatakan ada konsistensi UU dan peraturan daerah yang berubah-ubah.</p> |
| <p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p> | <p>100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kepulauan Riau.</p> |

| | |
|---|--|
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya kuliner. |
|---|--|

4.2.10. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,88 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,87. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur.

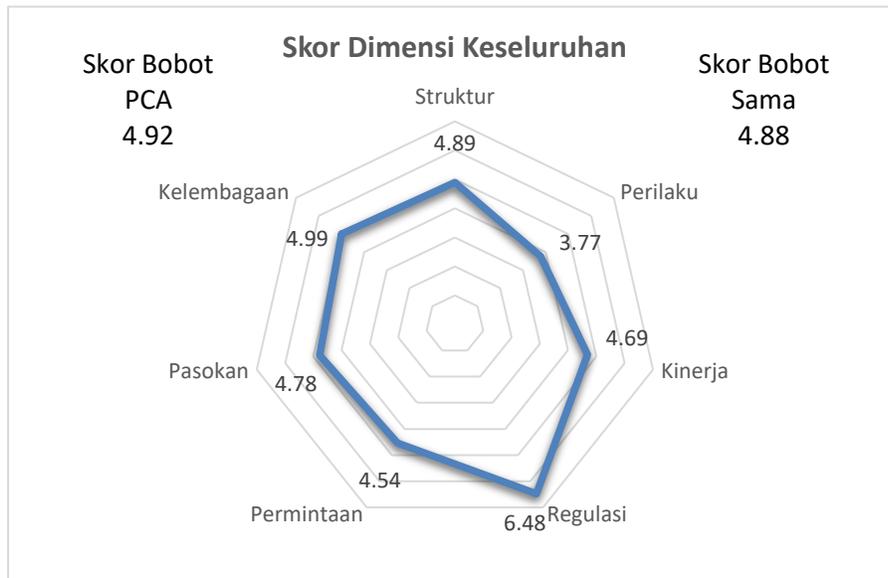
- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.25 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kepulauan Riau tahun 2023 ini sebesar 4,92 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,88 dengan kategori yang sama. Grafik 4.25 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,48. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,77. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kepulauan Riau masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti

pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.25. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Dimensi Keseluruhan



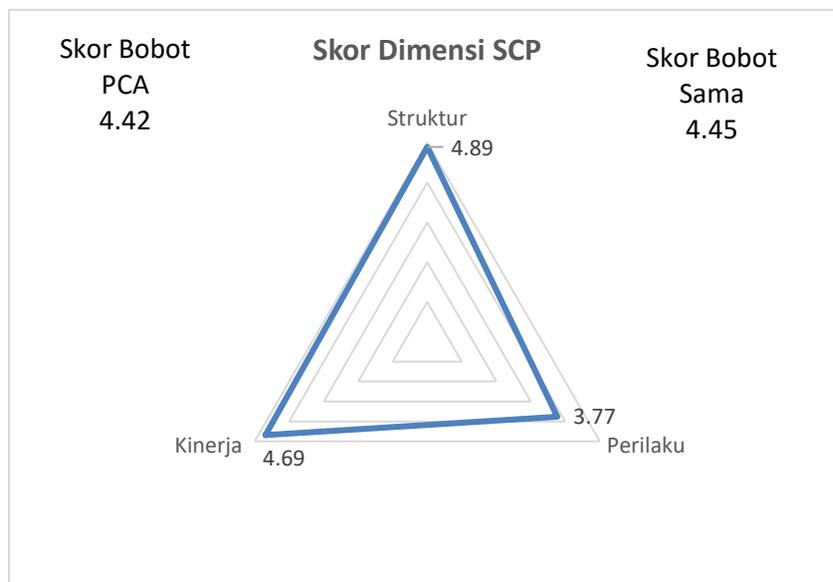
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.26 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kepulauan Riau tahun 2023 ini sebesar 4,42 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,45 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.26 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,89. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,77. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Kepulauan Riau ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana

relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa weweski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kepulauan Riau masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.26. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Dimensi SCP



4.2.11. Provinsi DKI Jakarta

4.2.11.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.14 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Industri pengolahan, dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Pengadaan listrik, gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 15 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Konstruksi. Kemudian terdapat 13 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik; 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6) Kontruksi 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8) Transportasi dan Pergudangan; 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10) Informasi dan Komunikasi; 11) Jasa keuangan dan asuransi; 12) Real Estate; 13) Jasa Perusahaan; 14) Jasa Pendidikan; 15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan di Provinsi DKI Jakarta masih sulit dalam mendapatkan izin dan pembiayaan serta penerimaan modal. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan antar asosiasi dan pemerintah.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Kemudian, sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi terdapat satu responden yang menyatakan bahwa perizinan yang sulit menjadi hambatan dalam berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta.

Selain masing-masing responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Hal ini dikarenakan karena sektor ini menyediakan kebutuhan sehari-hari sehingga dan merupakan sektor yang banyak masyarakat konsumsi selama pandemi Covid-19. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha sementara 1 responden lainnya

menyatakan terdapat kasus permasalahan pengadaan barang perusahaan dan pendidikan. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.14 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi DKI Jakarta

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|--------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di DKI Jakarta tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2) Industri pengolahan 3) Jasa keuangan dan asuransi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2) Pertambangan dan penggalian 3) Pengadaan listrik dan gas | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| | 4 | Konsentrasi Rendah |
| | 5 | Konsentrasi Rendah |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar yaitu dalam perizinan dan pembiayaan serta penyediaan modal. | |

| | |
|---|---|
| <p>Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa masih terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar asosiasi dan pemerintah.</p> |
| <p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p> | <p>Masing-masing responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.</p> |
| <p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p> | <p>100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.</p> |
| <p>Hambatan investasi</p> | <p>75% responden tidak terdapat hambatan investasi di DKI Jakarta.</p> |
| <p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p> | <p>75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha sedangkan satu responden lainnya menjawab terdapat kasus permasalahan pengadaan barang perusahaan dan pendidikan.</p> |

| | |
|---|---|
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di DKI Jakarta. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.12. Indeks Persaingan Usaha

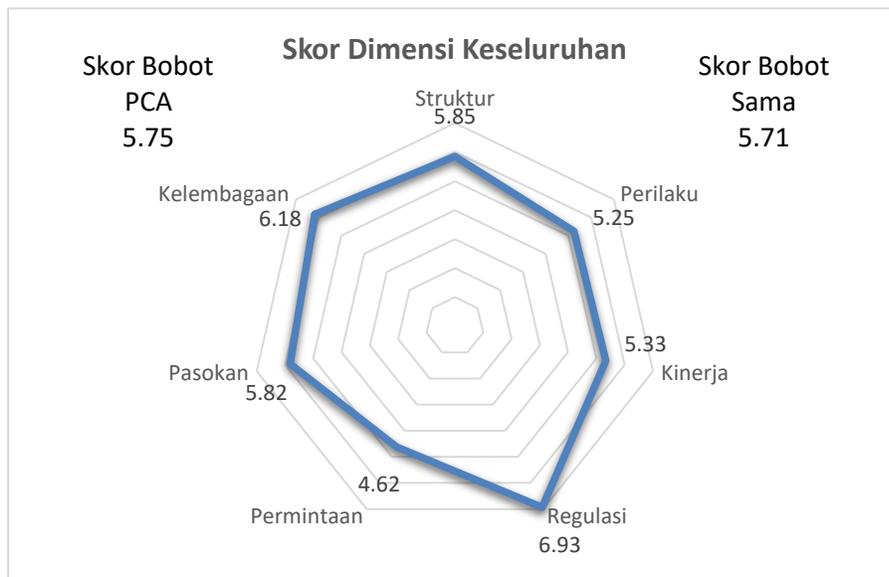
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,71 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,61. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi pasokan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.7 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha DKI Jakarta tahun 2022 ini sebesar 5,75 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,71 dengan kategori yang sama. Grafik 4.7 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,93. Sementara dimensi permintaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,62. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi permintaan menunjukkan bahwa dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi DKI Jakarta cenderung bersifat inelastis, relatif kurang memiliki varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif rendah.

Grafik 4.7. Indeks Persaingan Usaha Provinsi DKI Jakarta Dimensi Keseluruhan



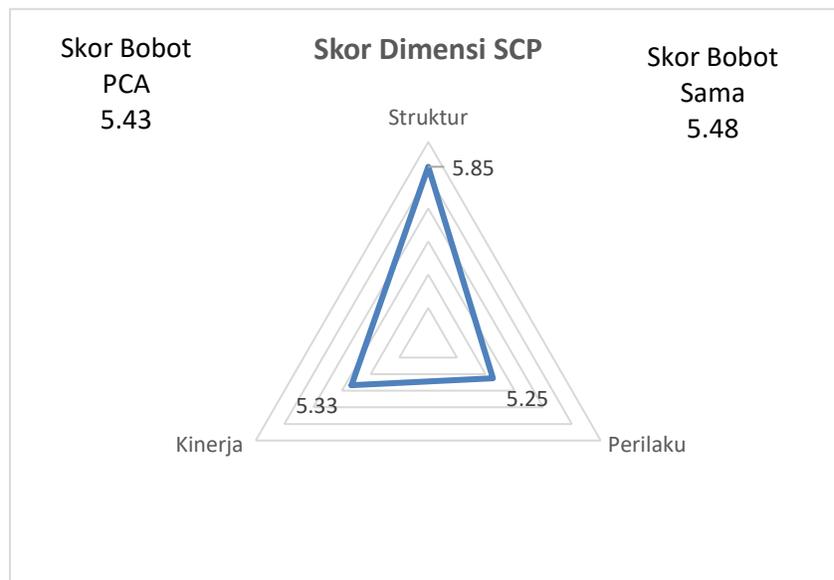
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.8 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di DKI Jakarta tahun 2023 ini sebesar 5,43 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di provinsi ini mencapai 5,48 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.8 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,85. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,25 Hal tersebut

mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di DKI Jakarta ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di DKI Jakarta masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.8. Indeks Persaingan Usaha Provinsi DKI Jakarta Dimensi SCP



4.2.12. Provinsi Jawa Barat

4.2.12. Analisis Deskriptif

Tabel 4.15 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Jawa Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Jawa Barat terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3) Informasi dan komunikasi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Pengadaan Listrik, Gas, dan 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kemudian terdapat 6 sektor

yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalan, 2) Industri pengolahan; 3) Pengadaan listrik, gas; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 6) Informasi dan komunikasi. Sedangkan 8 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Transportasi dan pergudangan; 4) Jasa keuangan dan asuransi; 5) Real estate; 6) Jasa perusahaan; 7) Jasa pendidikan, dan 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan, satu responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komoditas-komoditas yang ditentukan oleh asosiasi antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, dalam arti lain terdapat indikasi penentuan harga jual yang ditentukan oleh sekelompok pihak.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat relatif lebih murah dibanding daerah sekitar menurut sebagian besar responden, utamanya produk pokok dan pangan. Seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Barat.

Selain itu sebagian responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, responden lainnya menyebut sektor konstruksi, dan responden lainnya menyebut bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden

menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.15 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Jawa Barat tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri pengolahan 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum 3) Informasi dan komunikasi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan Penggalian 2) Pengadaan Listrik, Gas 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat karena beberapa komoditas ditentukan oleh asosiasi. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 50% responden menyebut konstruksi, dan responden lainnya menyebut penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Barat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Barat. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.13. Indeks Persaingan Usaha

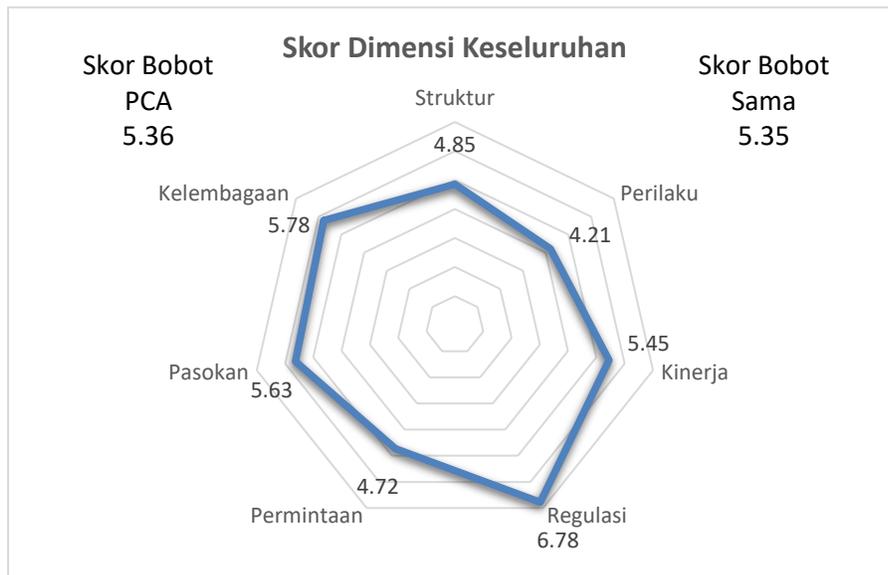
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,35 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,50. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan, pasokan, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.29 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jawa Barat tahun 2023 ini sebesar 5,36 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,35 atau dalam kategori yang sama. Grafik 4.29 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha

sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,78. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,21. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.29. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat Dimensi Keseluruhan



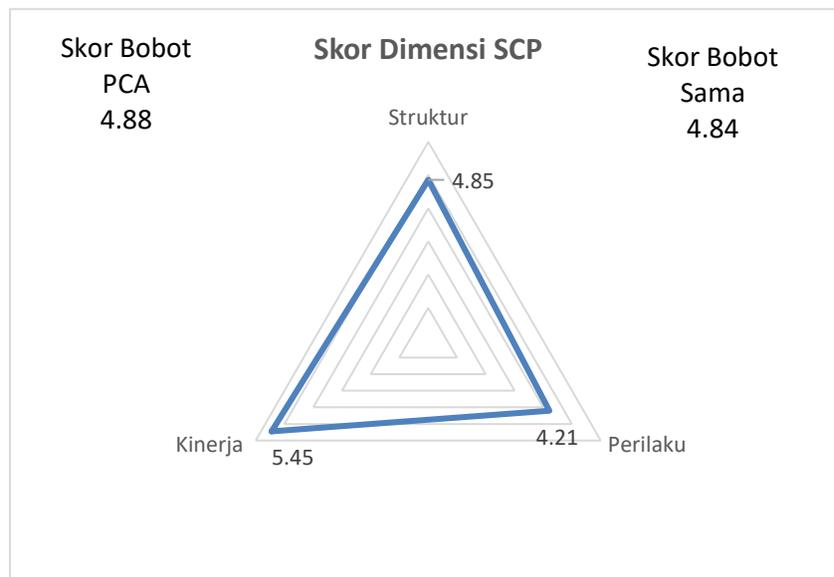
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.30 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ini sebesar 4,88 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,84 atau dalam

kategori yang sama. Grafik 4.30 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,45. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,21. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.30. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat Dimensi SCP



4.2.13. Provinsi Jawa Tengah

4.2.13.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.16 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkankinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Jasa Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan listrik dan gas; dan 3) Informasi dan komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pengadaan listrik, gas; dan 2) Informasi dan komunikasi. Sedangkan 13 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalan; 3) Industri Pengolahan; 4)

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 5) Konstruksi; 6) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 7) Transportasi dan pergudangan; 8) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 10) Real estate; 11) Jasa perusahaan; 12) Jasa pendidikan; dan 13) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius dalam mengundang investor dan Pemda memiliki kinerja bagus. Selain itu prosedur OSS (*Online Single Submission*) dinilai sudah bagus meski masih terdapat beberapa kendala. Selain itu dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat karena harga-harga yang berlaku telah tercipta secara alamiah oleh mekanisme pasar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar menurut seluruh responden. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Jawa Tengah karena regulasi yang diterapkan sudah baik.

Masing-masing responden menyatakan bahwa konstruksi, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, dan penyediaan akomodasi makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut meski biaya produksinya tinggi tetapi terdapat permintaan yang tinggi sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi pula. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan. Seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Tengah. Selain itu seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform

belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.16 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jawa Tengah

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Jawa Tengah tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri pengolahan 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan penggalian 2) Pengadaan listrik dan gas 3) Informasi dan komunikasi | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Masing-masing responden menyatakan bahwa konstruksi, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, dan penyediaan akomodasi makan minum merupakan sektor dengan keuntungan | |

| | |
|---|--|
| | terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Tengah. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Tengah. |

| | |
|--|---|
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |
|--|---|

4.2.14. Indeks Persaingan Usaha

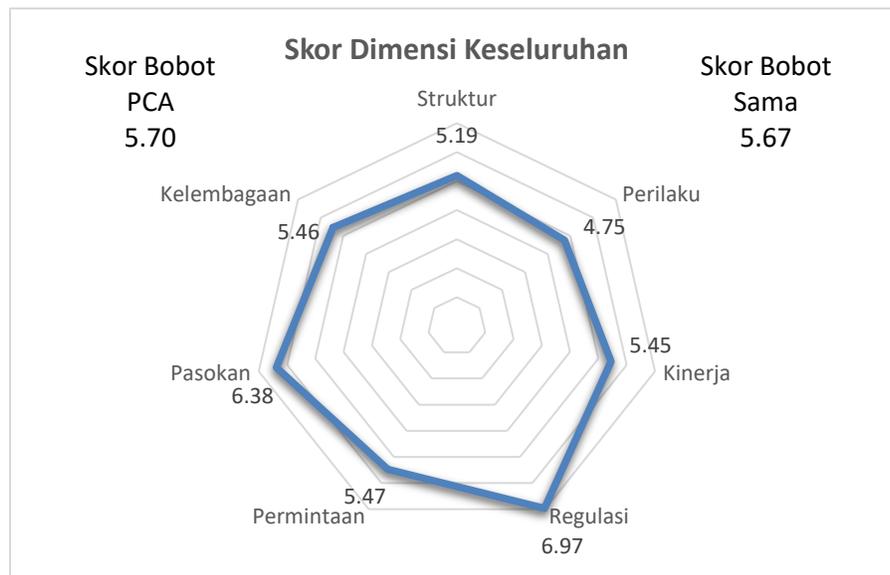
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,67 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,48. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi pasokan, kelembagaan, struktur, dan perilaku.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.31 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jawa Tengah tahun 2023 ini sebesar 5,70 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,67 atau dengan kategori cukup tinggi. Grafik 4.31 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,97. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,75. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi

dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.31. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Tengah Dimensi Keseluruhan

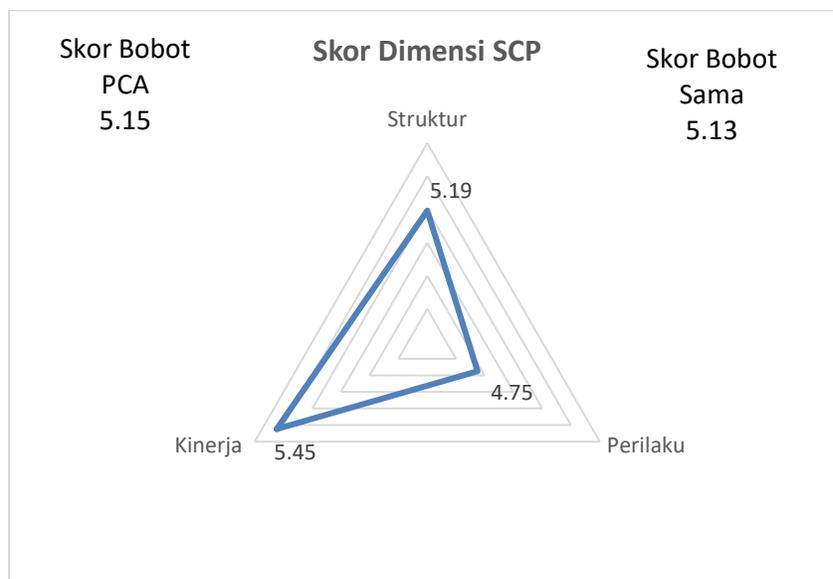


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.32 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Jawa Tengah tahun 2023 ini sebesar 5,15 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,13 atau dalam kategori yang sama. Grafik 4.32 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,45. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,75. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.32. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Tengah Dimensi SCP



4.2.14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.14.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.17 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkategori tinggi, yang didapatkan dari penyimpulan persepsi seluruh responden. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) Industri Pengolahan; dan 3) Jasa pendidikan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang terkonsentrasi tinggi yaitu sektor 1) Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

moderat, yakni 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sedangkan 13 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan pergudangan; 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 8) Informasi dan Komunikasi; 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10) Jasa Keuangan dan Asuransi; 11) Real estate; 12) Jasa perusahaan; dan 13) Jasa pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi terdapat sebagian responden yang menyatakan bahwa meski secara peraturan tidak ada hambatan, terdapat hambatan lain yang dilakukan oleh beberapa oknum di Pemkot Yogyakarta dalam melakukan pengurusan perizinan. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar. Seluruh responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masing-masing responden menjawab sektor berbeda untuk sektor yang memiliki keuntungan besar, yaitu Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum karena melihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah wisata, sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha dan

juga seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu seluruh responden juga menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.17 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|--------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan akomodasi dan makan minum 2. Industri pengolahan 3. Jasa pendidikan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan listrik dan gas 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3. Jasa keuangan dan asuransi | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Pertanyaan | Deskripsi | |

| | |
|---|--|
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kesepakatan harga. |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar karena terdapat fenomena aglomerasi dengan daerah. |
| Hambatan investasi | 100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, karena sangat membantu masyarakat khususnya UMKM dalam meningkatkan hasil penjualan. |

4.2.15. Indeks Persaingan Usaha

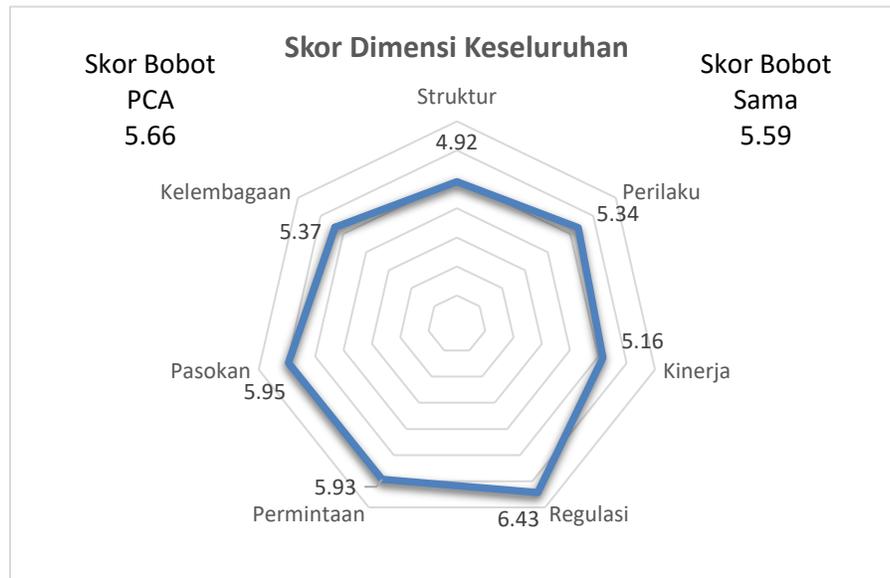
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,59 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,50. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan, perilaku, dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.33 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 ini sebesar 5,66 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,59 dengan kategori yang sama. Grafik 4.33 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,43. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,16. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah

mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kinerja menunjukkan bahwa kinerja industri yang ada di Provinsi ini kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.33. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dimensi Keseluruhan



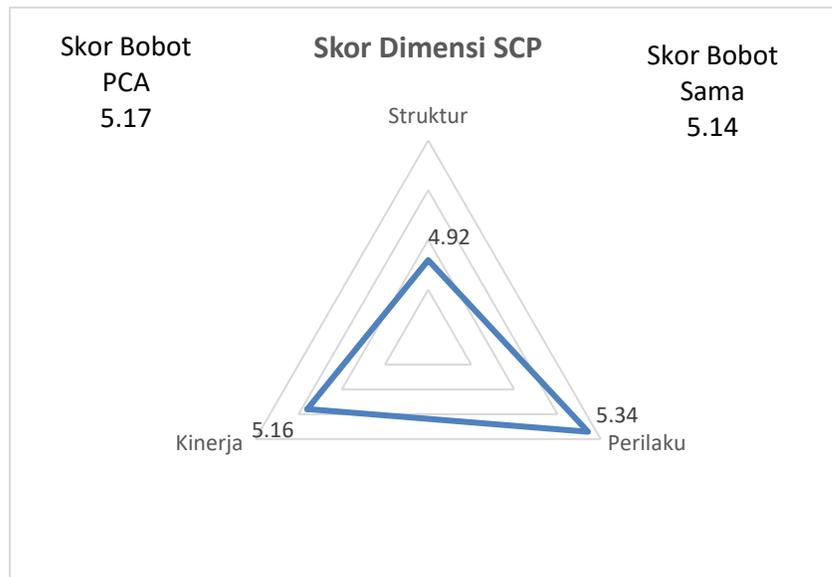
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.34 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 ini sebesar 5,17 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,14 dalam kategori yang sama.

Grafik 4.34 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi perilaku memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,34. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,92. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perilaku industri mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu,

rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

Grafik 4.34. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dimensi SCP



4.2.15. Provinsi Jawa Timur

4.2.15.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.18 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni; 1) Industri pengolahan; 2) Pengadaan listrik, gas; dan 3) Pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Sedangkan 12 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Kontruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 12) Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan adanya peraturan ijin dengan memakai aplikasi OSS yang masih tumpang tindih antara daerah dan nasional. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, utamanya produk-produk pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan dipasok dari daerah sendiri.

Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Jawa Timur. Sementara responden lainnya menyatakan bahwa masih adanya hambatan dalam melakukan investasi dikarenakan masih adanya hambatan pada peraturan OSS, resistensi masyarakat, serta turunan undang-undang yang tidak jelas.

Sebagian besar responden menyatakan industri pengolahan, satu responden menyebut pertambangan dan penggalian, dan satu responden lainnya menyebut pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian responden menjawab pernah ada kasus persaingan usaha terkait kesepakatan

tender, sedangkan sebagian responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha apapun. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.18 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Jawa Timur tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri pengolahan 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan listrik dan gas 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3) Pertambangan dan Penggalian | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| Pertanyaan | Deskripsi | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |

| | |
|--|--|
| Hambatan Berusaha | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan adanya peraturan perizinan pemerintah. |
| Pertanyaan | Deskripsi |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kesepakatan harga. |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan industri pengolahan, 50% responden menyebut pertambangan dan penggalian, dan responden lainnya menyebut pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan kebijakan pemerintah yang mendukung. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah. |
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Timur. |

| | |
|---|---|
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 50% responden menjawab pernah ada kasus persaingan usaha terkait kesepakatan tender. Sedangkan, 50% responden menjawab tidak ada. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Timur. |
| Pertanyaan | Deskripsi |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di komoditas kuliner. |

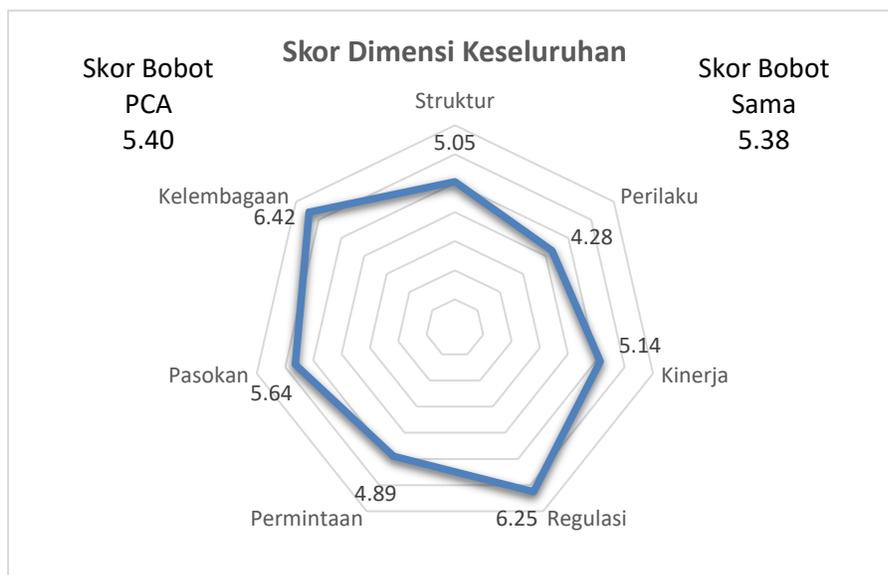
4.2.16. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,38 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,11. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi regulasi, struktur, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.35 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jawa Timur tahun 2023 ini sebesar 5,40 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,38 dengan kategori yang sama. Grafik 4.35 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,25. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,28. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.35. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur Dimensi Keseluruhan



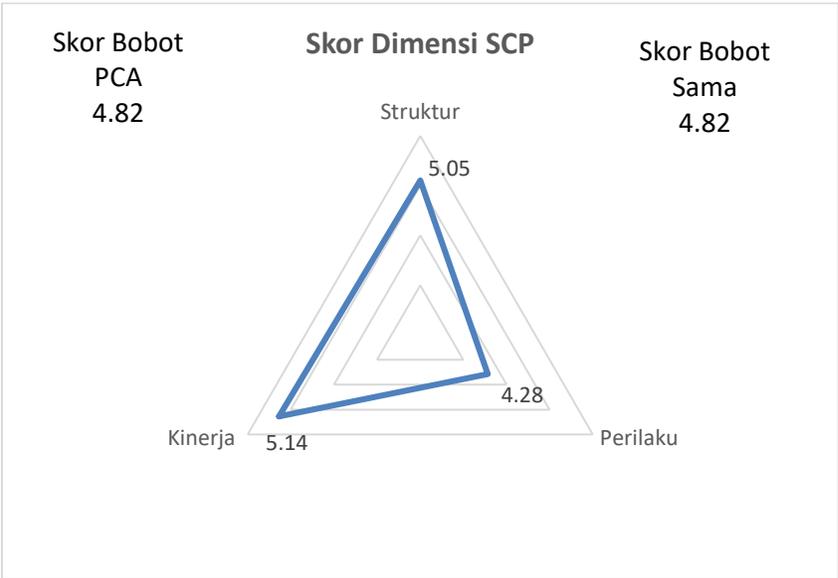
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.36 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Jawa Timur tahun 2023 ini sebesar 4,82 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,82 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.36 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan.

Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,14. Sementara, dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,28. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Jawa Timur ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.36. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur Dimensi SCP



4.2.16. Provinsi Banten

4.2.16.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.19 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Banten berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Banten terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Penyediaan akomodasi makan dan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan 4) Kontruksi. Sedangkan 11 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan pergudangan; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Informasi dan komunikasi; 7) Jasa keuangan dan asuransi; 8) Real estate; 9) Jasa perusahaan; 10) Jasa pendidikan; dan 11) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan adanya masalah jaminan permodalan. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Banten relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian kecil responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Banten, dikarenakan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagian responden menyatakan industri pengolahan, satu responden menyebut pengadaan listrik dan gas, dan satu responden lainnya menyebut real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan menyerap tenaga kerja yang banyak dan optimal. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Banten dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan

persaingan usaha.

Tabel 4.19 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Banten

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Banten tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Penyediaan akomodasi dan makan minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik, Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Pertambangan dan Penggalian | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| Pertanyaan | Deskripsi | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar, hal ini disebabkan jaminan permodalan. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat karena beberapa komoditas ditentukan oleh asosiasi. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan industri pengolahan, 50% responden menyebut pengadaan listrik dan gas, dan responden lainnya menyebut real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar | |

| | |
|---|--|
| | karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi. |
| Pertanyaan | Deskripsi |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 25% responden menjawab terdapat hambatan investasi di Banten, dikarenakan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Banten. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

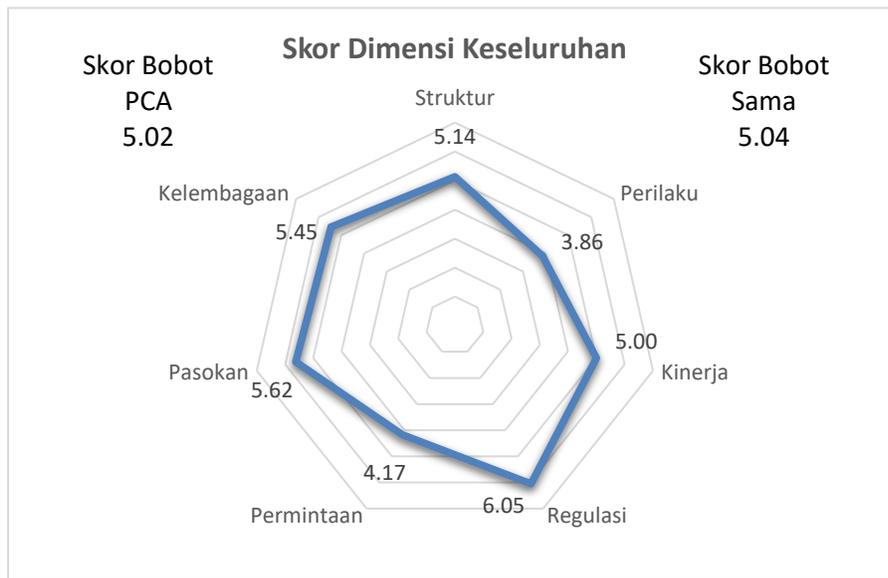
4.2.17. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Banten dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,04 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,49. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan, perilaku, dan permintaan.

- **Indeks Dimensi Keseluruhan**

Grafik 4.37 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Banten dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Banten tahun 2023 ini sebesar 5,02 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,04 atau dengan kategori sama. Grafik 4.37 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,05. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,86. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Banten masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.37. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Banten Dimensi Keseluruhan



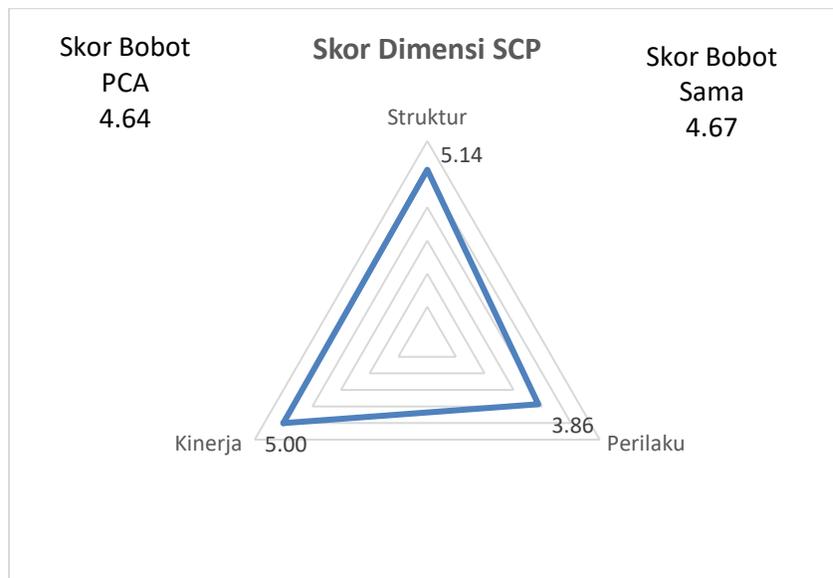
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.38 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Banten hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Banten tahun 2023 ini sebesar 4,64 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,67 atau dalam kategori yang sama. Grafik 4.38 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,14. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,06. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Banten ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki struktur yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usahayang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Banten masih relatif berperilaku

yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.38. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Banten Dimensi SCP



4.2.17. Provinsi Bali

4.2.17.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.20 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Bali berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Bali terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Transportasi dan pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan listrik, gas; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kemudian terdapat 11 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, 1) Pertambangan dan

penggalian; 2) Industri pengolahan; 3) Kontruksi; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Informasi dan komunikasi; 8) Jasa keuangan dan asuransi; 9) Real estate ; 10) Jasa Pendidikan; dan 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 2 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah ,antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan 2) Jasa Perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian kecil responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh masalah peraturan, perizinan, persaingan ketat, dan resistensi masyarakat terkait lingkungan. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Bali relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian kecil responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Bali, dikarenakan adanya peraturan daerah yang belum jelas dan resistensi masyarakat terhadap beberapa rencana pembangunan.

Sebagian responden menyatakan penyediaan akomodasi dan makan minum, satu responden menyebut jasa keuangan dan asuransi, dan satu responden lainnya menyebut informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut merupakan pasar yang memiliki permintaan yang tinggi serta memiliki selisih *cost of fund* dengan *cost of credit* yang cukup besar. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Bali dan seluruh responden menyatakan bahwa penggunaan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.20 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Bali

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Bali tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Transportasi dan pergudangan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan listrik dan gas 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. 3) Pertambangan dan penggalian | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh masalah peraturan, perizinan, persaingan ketat, dan resistensi masyarakat terkait lingkungan. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan penyediaan akomodasi dan makan minum, 50% responden menyebut jasa keuangan dan asuransi, dan responden lainnya menyebut informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan jumlah yang terbatas. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 75% responden tidak terdapat hambatan investasi di Bali. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bali. |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|---|
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.18. Indeks Persaingan Usaha

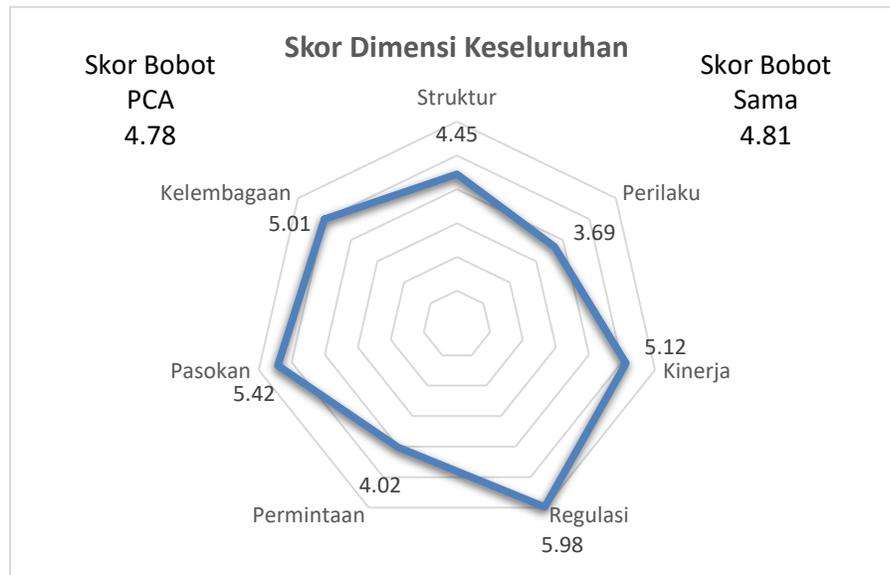
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Bali dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,81 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,76. Peningkatan yang signifikan terjadi pada seluruh dimensi yaitu struktur dan kinerja.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.39 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bali dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Bali tahun 2023 ini sebesar 4,78 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,81 dengan kategori yang sama. Grafik 4.39 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,98. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,69. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bali masih

relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.39 Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bali Dimensi Keseluruhan



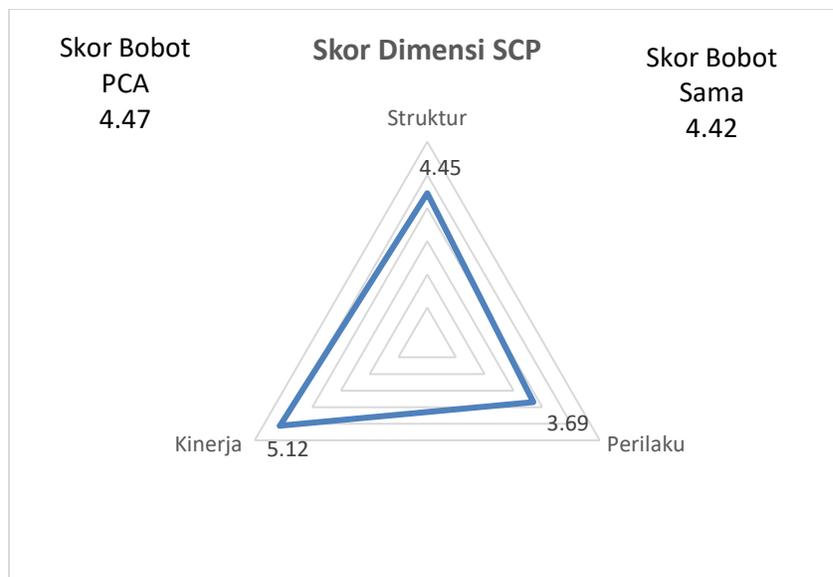
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.40 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bali hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Bali tahun 2023 ini sebesar 4,47 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,42 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.40 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,12. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,69. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Bali ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu

beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bali masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.40. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bali Dimensi SCP



4.2.18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2.18.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.21 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkategori tinggi, dimana sebagian besar responden mempersepsikan terdapat persaingan usaha yang tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 3) Jasa Pendidikan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih. Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat satu sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Informasi dan Komunikasi.

Kemudian, terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan, 3) Konstruksi; 4) Jasa Keuangan dan Asuransi; 5) Jasa Pendidikan; 6) Jasa Kesehatan. Sedangkan, 6 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pengadaan Listrik, Gas dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 5) Jasa Keuangan dan Asuransi; 6) Jasa Perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, khususnya harga komoditas pada sektor pertanian. Sebagian responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikarenakan adanya resistensi masyarakat.

Masing-masing responden menyatakan bahwa Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Jasa Perusahaan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar dikarenakan sektor-sektor tersebut adalah sektor yang paling sering digunakan oleh masyarakat baik. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.21 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di NTB tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3. Jasa Pendidikan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Rendah |
| | 5 | Konsentrasi Rendah |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Tinggi |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh masalah kurangnya modal. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Masing-masing responden menyatakan bahwa Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Jasa Perusahaan. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di NTB, dikarenakan adanya resistensi masyarakat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di NTB. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor makanan. |

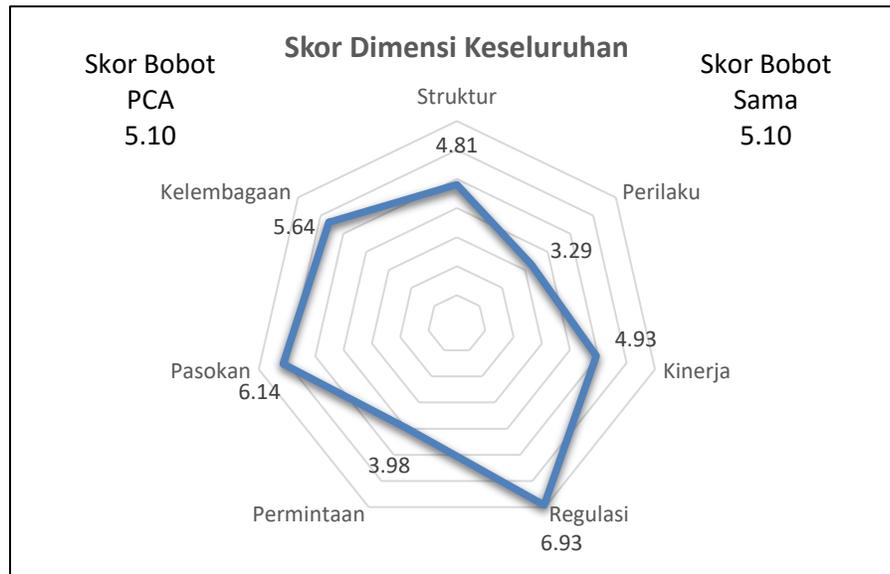
4.2.19. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,10 atau meiningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,84.

- **Indeks Dimensi Keseluruhan**

Grafik 4.41 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Nusa Tenggara Barat tahun 2023 ini sebesar 5.10 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5.10 dengan kategori yang sama. Grafik 4.41 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,93. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,29. Tingginya skor dimensi regulasi mengindikasikan bahwa regulasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.41. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat Dimensi Keseluruhan

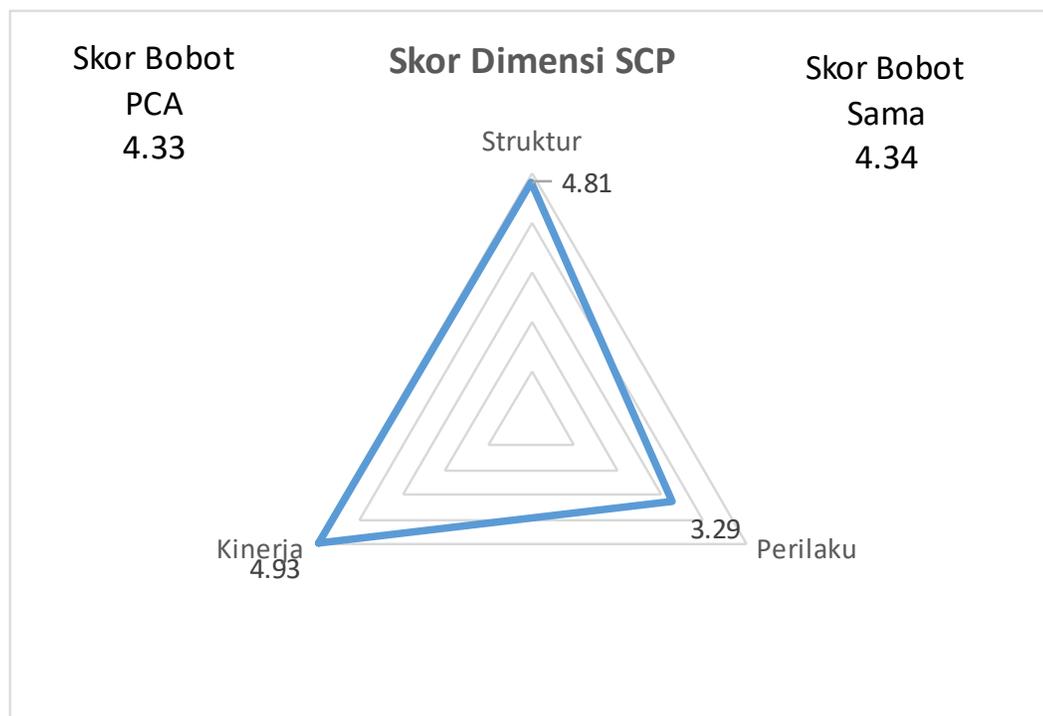


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.42 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Nusa Tenggara Barat tahun 2023 ini sebesar 4,33 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,34 dalam kategori yang sama. Grafik 4.42 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,93. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,29. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Nusa Tenggara telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki

kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usahayang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.42. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat Dimensi SCP



4.2.19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.2.19.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.22 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Informasi dan Komunikasi, 2) Pertambangan dan Penggalan, dan 3) Pengadaan Listrik, Gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas dan 2) Informasi dan Komunikasi. Kemudian terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Industri

Pengolahan; 3) Pengadaan Air; 4) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan. Sedangkan 5 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah antara lain 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4) Jasa Pendidikan; 5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, 3 responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan satu responden menyatakan merasa terhambat karena sistem OSS PBG Perubahan IMB ke PBG belum sinkron dengan pemerintah kota. Sementara itu, dari sisi perilaku, 25% responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tindakan dalam berusaha mengatur harga dan jumlah produksi.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan distribusi dan produksi tidak sama antar daerah. Kemudian, sebanyak sebagian besar responden menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pengurusan IMB dan legalitas lahan, resistensi masyarakat, dan infrastruktur yang belum mendukung.

Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi penyediaan akomodasi dan makan minum; dan informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan

persaingan usaha.

Tabel 4.22 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di NTT tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | 1) Informasi dan Komunikasi 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Pengadaan Listrik, Gas | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| 9 | Konsentrasi Rendah | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 10 | Konsentrasi Tinggi |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar sementara 25% responden merasa terhambat karena sistem OSS PBG Perubahan IMB ke PBG belum sinkron dengan pemerintah kota. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya tindakan dalam berusaha mengatur harga dan jumlah produksi | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum; dan informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |

| | |
|---|--|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena distribusi dan produksi tidak sama antar daerah. |
| Hambatan investasi | 75% responden terdapat hambatan investasi di NTT, dikarenakan adanya hambatan dalam pengurusan IMB dan legalitas lahan, resistensi masyarakat, dan infrastruktur yang belum mendukung. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di NTT. |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.20. Indeks Persaingan Usaha

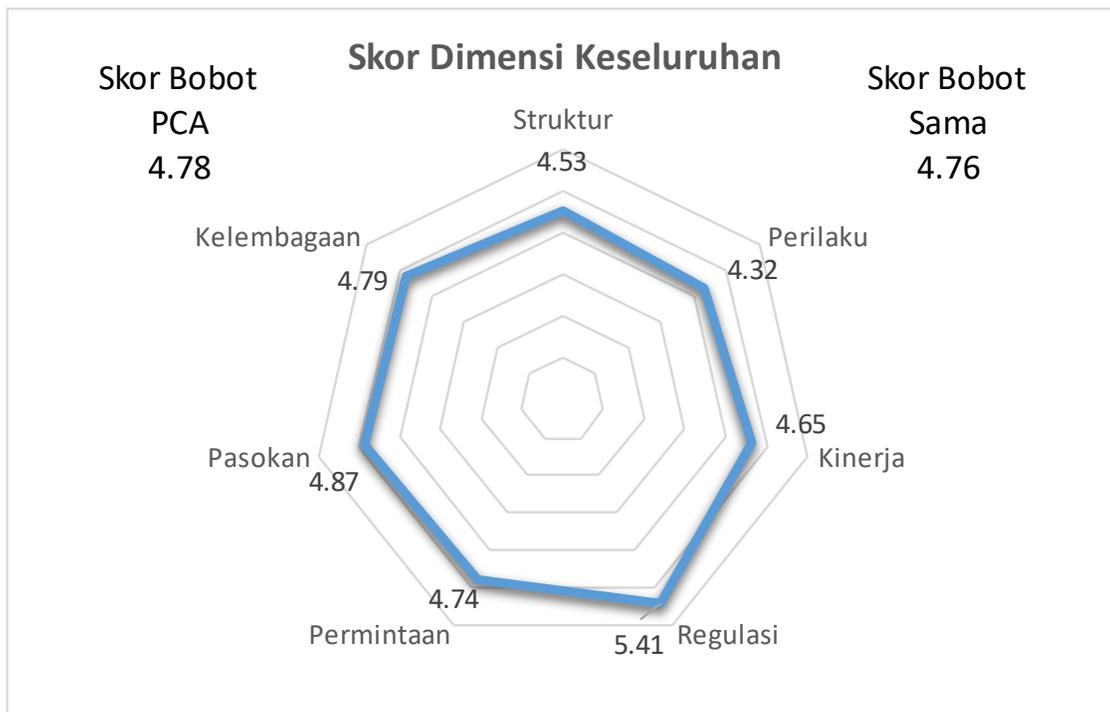
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,76 atau

menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5.02. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, kelembagaan pasokan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.43 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Nusa Tenggara Timur tahun 2023 ini sebesar 4,78 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,76 dengan kategori yang sama. Grafik 4.43 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,41. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,32. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.43. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Dimensi Keseluruhan

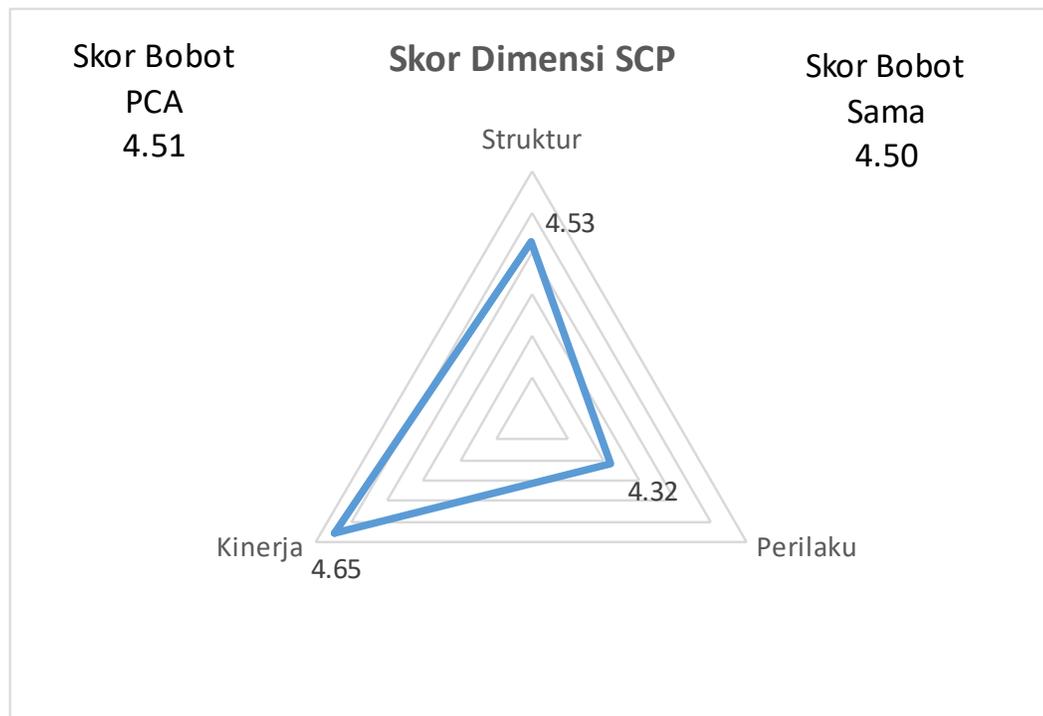


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.44 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Nusa Tenggara Timur tahun 2023 ini sebesar 4,51 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,50 atau terkategori moderat. Grafik 4.44 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,32. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Nusa Tenggara Timur telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.44. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Dimensi SCP



4.2.20. Provinsi Kalimantan Barat

4.2.20.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.23 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Barat terkategori tinggi, di mana tiga dari empat responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 6 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan Listrik, Gas; dan 3) Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Konstruksi; 5) Informasi dan Komunikasi; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi. Sedangkan 9 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Real Estate; 7) Jasa Perusahaan; 8) Jasa Pendidikan; 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya kondisi industri dimana pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat di tingkat asosiasi bagi sebagian sektor.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui sebagian responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Kalimantan Barat.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian kecil responden menjawab terdapat persaingan usaha di sektor real estate. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.23 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Barat

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Barat tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Lisrik, Gas 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|---|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Sebagian besar responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Kalimantan Barat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian kecil responden menjawab terdapat persaingan usaha di sektor real estate. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Barat. |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|---|---|
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.21. Indeks Persaingan Usaha

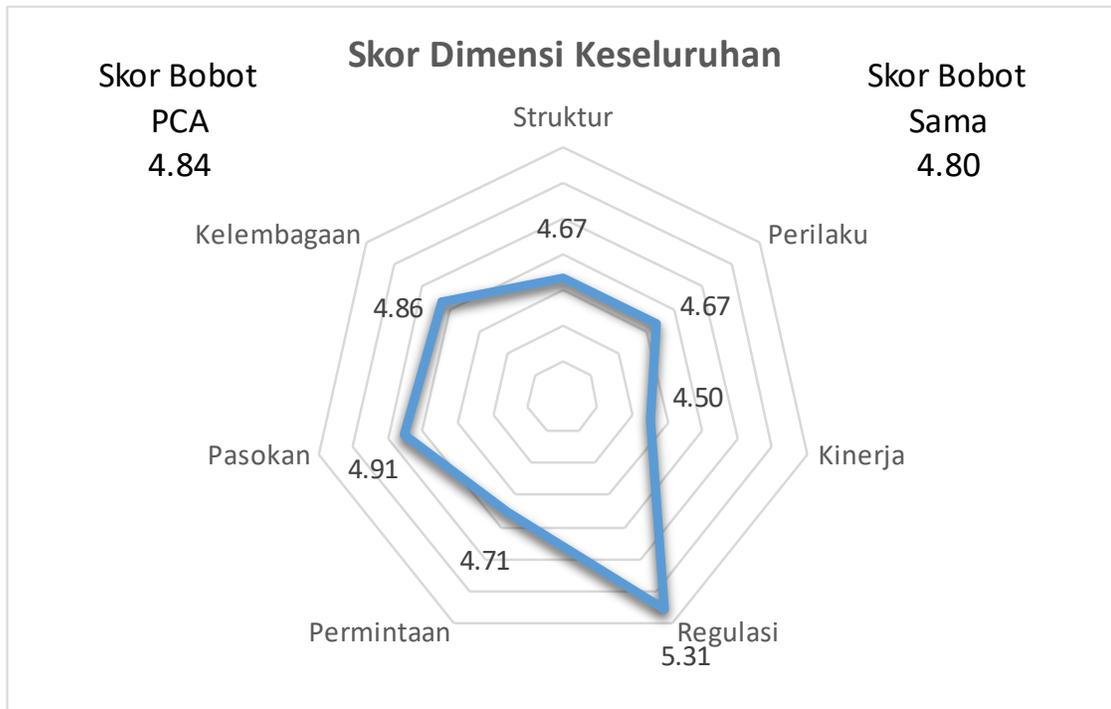
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,80 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,02. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan, pasokan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.45 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Barat tahun 2023 ini sebesar 4,84 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,80 dengan kategori yang sama. Grafik 4.45 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,31. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,50. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Provinsi

Kalimantan Barat telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kinerja menunjukkan bahwa kinerja industri yang ada di Provinsi Kalimantan Barat kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.45. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dimensi Keseluruhan

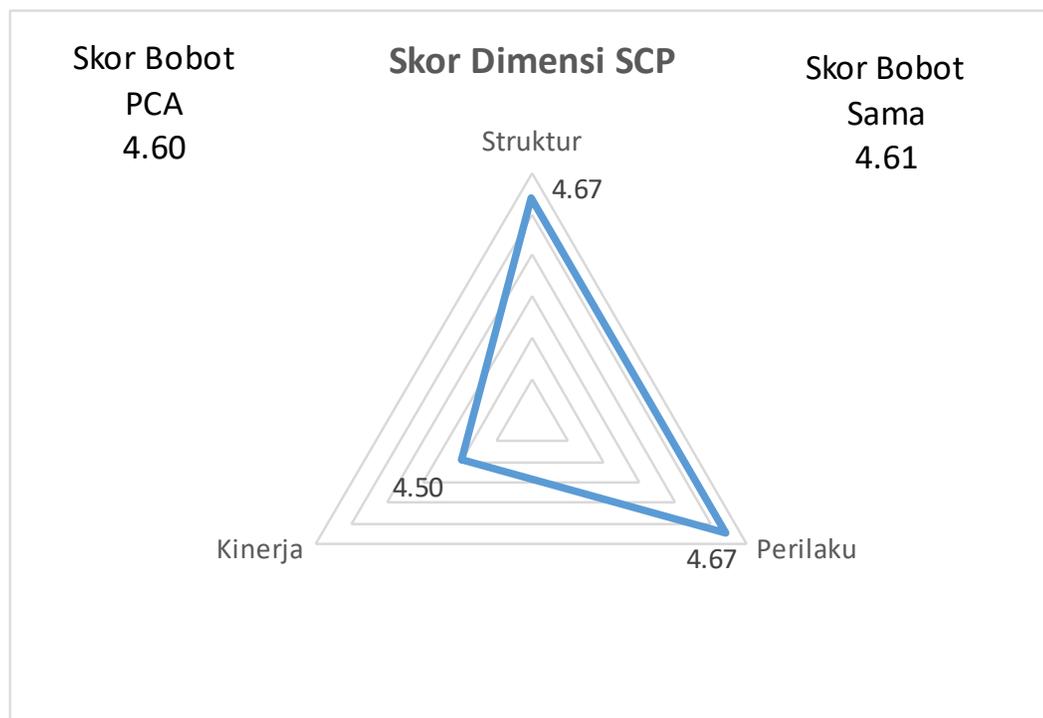


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.46 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Barat tahun 2023 ini sebesar 4,60 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,61 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.46 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi perilaku memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,67. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,50.

Tingginya skor dimensi perilaku mengindikasikan bahwa perilaku industri telah mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Selatan relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan yang sehat. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kinerja menunjukkan bahwa kinerja industri yang ada di Provinsi ini kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.46. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dimensi SCP



4.2.21. Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.21.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.24 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Tengah terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik dan gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 9 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Informasi dan Komunikasi; 6) Real Estate; 7) Jasa Perusahaan; 8) Jasa Pendidikan; dan 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 6 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan 6) Jasa Keuangan dan Asuransi.

Secara umum, sebagian kecil responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembuatan kesepakatan antar perusahaan dan asosiasi dalam penentuan harga dan produksi antara mereka.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Tengah relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya seperti Kalimantan Tengah. Sebagian kecil juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Kalimantan Tengah, dikarenakan masih adanya peraturan daerah yang mentakan minimal lahan seluas 200 m².

Masih-masing responden menyatakan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Hal ini terjadi karena pada sektor ini produksi yang dilakukan tidak semakin bertambah sehingga harga dan keuntungan menjadi semakin tinggi. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform

belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.24 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Tengah tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik, Gas 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3) Pertambangan dan Penggalian | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| 9 | Konsentrasi Rendah | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, sisanya menyebutkan masih adanya hambatan berusaha. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian; Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |
| Pertanyaan | Deskripsi | |

| | |
|--|--|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Kalimantan Tengah yakni peraturan daerah yang mentakan minimal lahan seluas 200 m2. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Tengah. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.22. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,65 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,34. Peningkatan yang signifikan terjadi pada

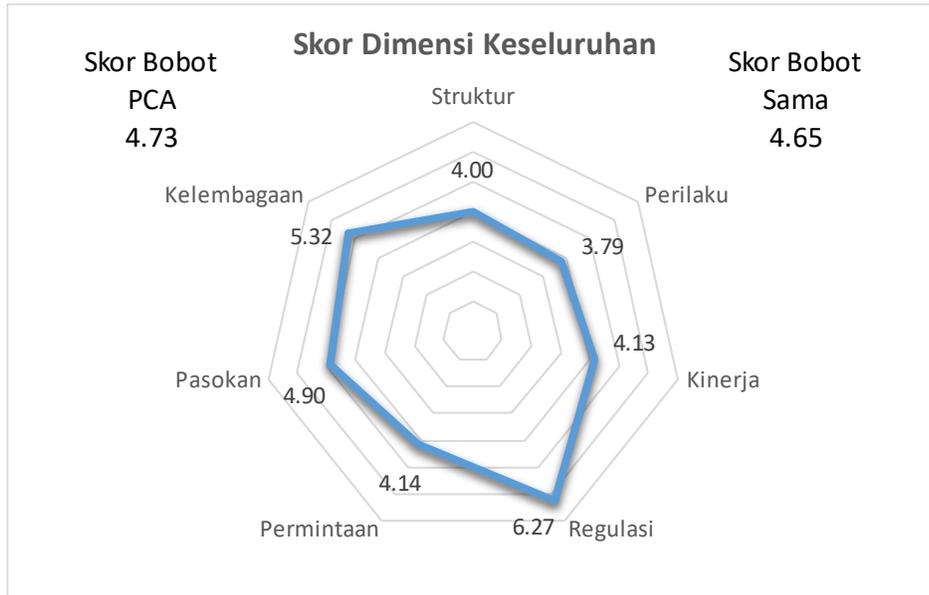
dimensi kinerja, perilaku, struktur, kelembagaan, pasokan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.47 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Tengah tahun 2023 ini sebesar 4,73 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,65 dengan kategori yang sama. Grafik 4.47 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan.

Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,27. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,79. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.47. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Dimensi Keseluruhan



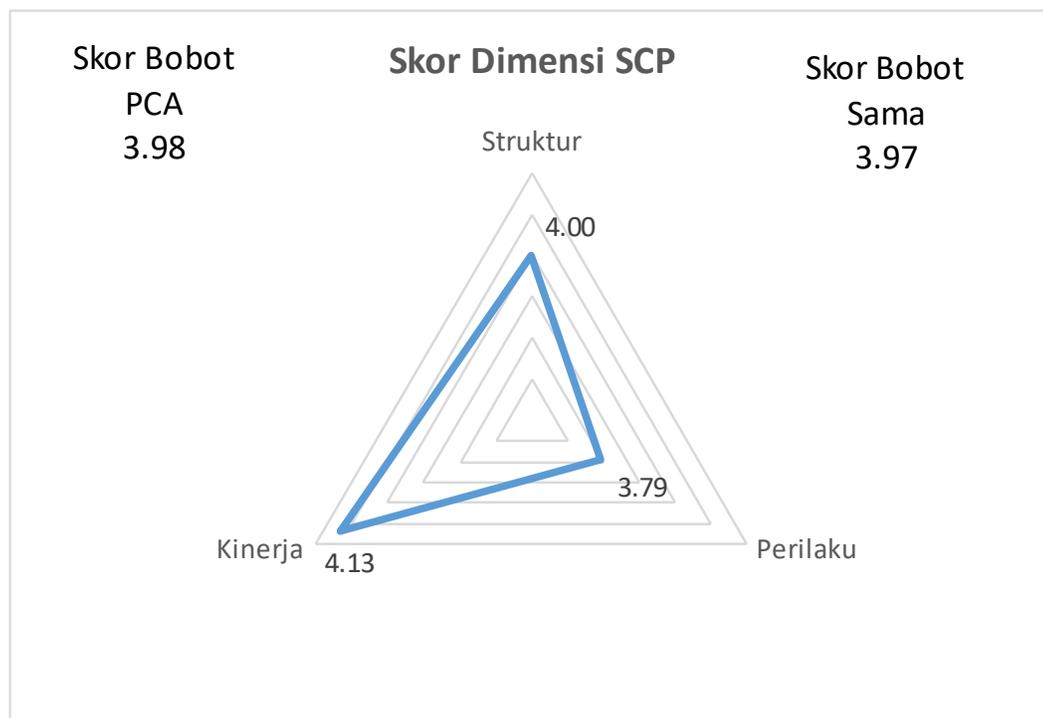
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.48 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Tengah tahun 2023 ini sebesar 3,98 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini 3,97 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.48 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,13. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,79. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Kalimantan Tengah ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski

memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.48. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Dimensi SCP



4.2.22. Provinsi Kalimantan Selatan

4.2.22.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.25 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Selatan terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan 3) Transprtasi dan Pergudangan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 4) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan 11 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; dan 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya kondisi industri dimana pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan adanya masalah dimana terdapat hambatan karena regulasi/peraturan yang sulit untuk perusahaan yang baru masuk. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat yaitu adanya kesepakatan antar Perusahaan yang membuat harga antar pasar yang tidak jauh berbeda.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Selatan relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar, utamanya produk- produk pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya. Seluruh responden juga menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kalimantan Selatan.

seluruh responden menyatakan bahwa industri pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian kecil responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian besar responden menjawab terdapat persaingan usaha seperti kesepakatan tender. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian besar responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.25 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Selatan tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3. Konstruksi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Transportasi dan Pergudangan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, terutama terkait peraturan dan regulasi di Provinsi Kalimantan Selatan. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat karena adanya kesepakatan antar perusahaan. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Seluruh responden menyatakan bahwa industri pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|---|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kalimantan Selatan. Sedangkan, sisanya menyatakan bahwa terdapat peraturan pusat (sistem zonasi industri) yang menghambat investasi. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab ada kasus persaingan usaha, seperti kesepakatan tender. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Selatan. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.23. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,92 atau

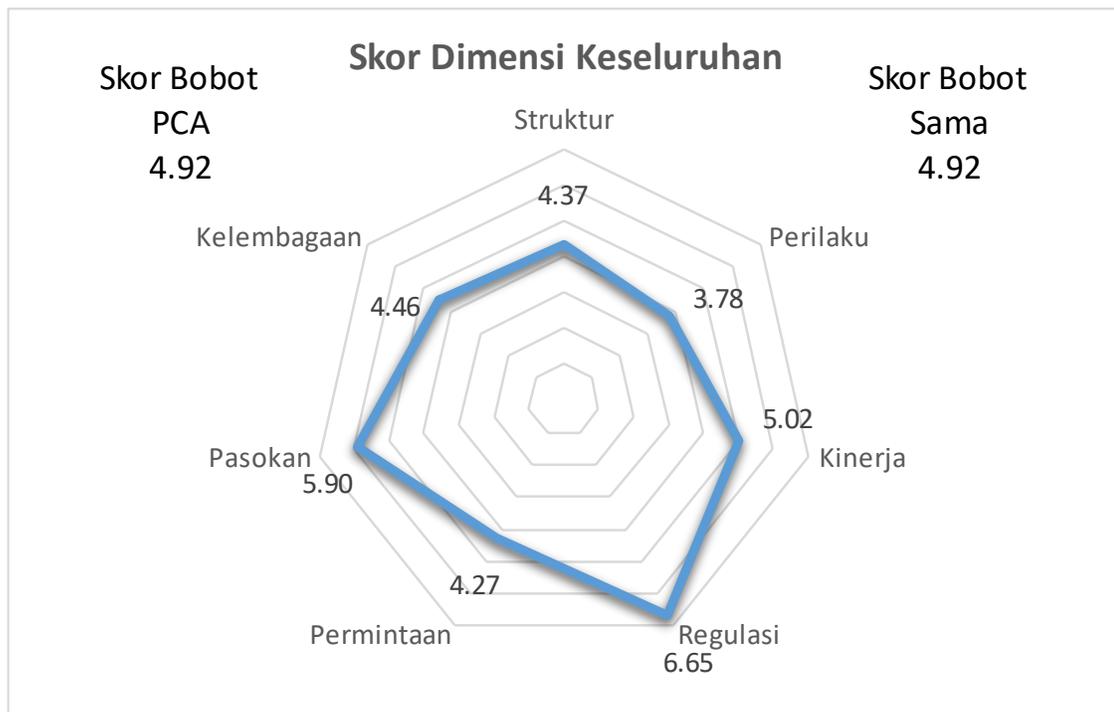
menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,02. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kelembagaan, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.49 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Selatan tahun 2023 ini sebesar 4,92 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,92 dengan kategori yang sama. Grafik 4.49 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,78.

Tingginya skor dimensi regulasi menunjukkan bahwa regulasi di Provinsi Kalimantan Selatan telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Selatan masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.49. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.50 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Selatan tahun 2023 ini sebesar 4,44 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,39 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.50 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,02. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,78. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Kalimantan Selatan telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

4.2.23. Provinsi Kalimantan Timur

4.2.23.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.26 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Kalimantan Timur berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Timur terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan, 10 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi

yang rendah, antara lain 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan; 9) Jasa Pendidikan; dan 10) Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya kondisi industri dimana pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk. Sebagian responden juga menyatakan terdapat tidak adanya hambatan investasi di Kalimantan Timur. Hal ini diakibatkan karena adanya hambatan informal dan resistensi masyarakat

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, darisisi perilaku, sebagian kecil responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti kerjasama perdagangan. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur relatif lebih murah dibanding daerah sekitar.

Masing-masing responden menyatakan bahwa industri sektor pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian kecil responden menjawab terdapat persaingan usaha. Dilihat dari platform belanja digital, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.26 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Timur

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Timur tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Konstruksi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Responden menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan tertinggi. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|--|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 50% responden terdapat hambatan investasi di Kalimantan Timur dikarenakan adanya hambatan informal (ormas pungli) dan resistensi masyarakat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Timur. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

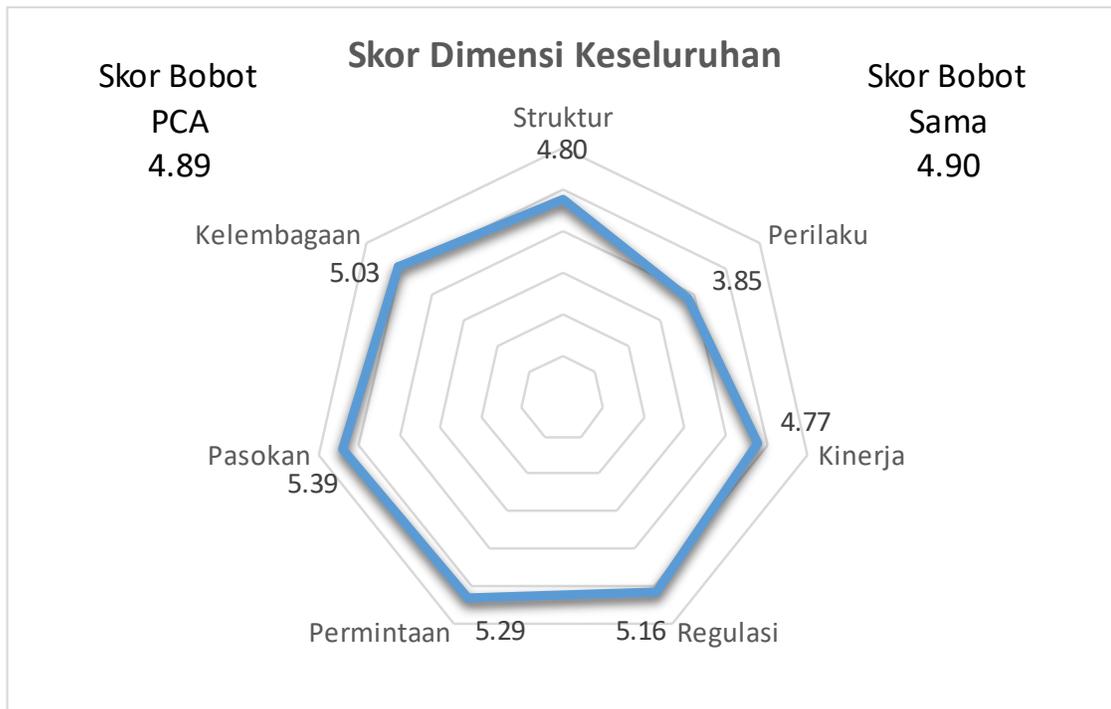
4.2.24. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,90 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,97. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, struktur, kelembagaan, dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.51 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Timur tahun 2023 ini sebesar 4.89 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,90 dengan kategori yang sama. Grafik 4.51 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi pasokan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,39. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,85. Tingginya skor dimensi pasokan mengindikasikan bahwa pasokan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.51. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Dimensi Keseluruhan

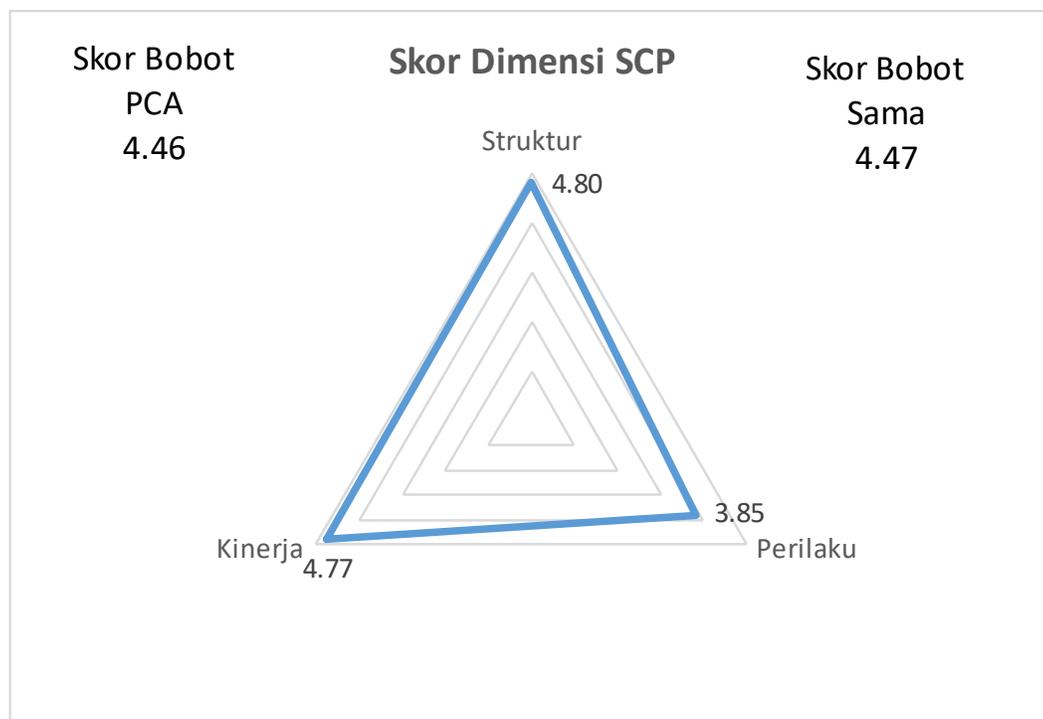


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.52 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Timur hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Timur tahun 2023 ini sebesar 4,46 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,47 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.52 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,80. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,85. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur industri yang ada di Kalimantan Timur ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.52. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Dimensi SCP



4.2.24. Provinsi Kalimantan Utara

4.2.24.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.27 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Utara terkategori moderat, di mana sebagian responden mempersepsikan rendah dan tinggi.. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;; 2) Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Transportasi dan Pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, Daur Ulang; dan 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, daur ulang cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan, 12 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kegutanan dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Jasa Keuangan dan Asuransi; 9) Real Estate; 10) Jasa Perusahaan; 11) Jasa Pendidikan; dan 12) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian kecil responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian kecil responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan seperti kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar, yaitu Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya.

Sebagian kecil responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Kalimantan Utara, dikarenakan masih adanya hambatan dari regulasi dan masyarakat. Mengenai kasus persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara, sebagian besar responden

menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian kecil responden menjawab ada pihak yang mengatur tender. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Utara. Platform belanja digital dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 4.27 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Utara

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|--------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Utara tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Transportasi dan Pergudangan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, Daur Ulang 3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | |
| | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | 5 | Konsentrasi Tinggi |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| 15 | Konsentrasi Rendah | |
| Hambatan Berusaha | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang harga. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa sektor dengan pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 25% responden terdapat hambatan investasi di Kalimantan Utara karena adanya hambatan dari regulasi dan masyarakat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Utara. Kemudian, 25% terdapat peraturan yang memberatkan persaingan usaha (tumpang tindih peraturan). |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor penyediaan makan dan minum. |

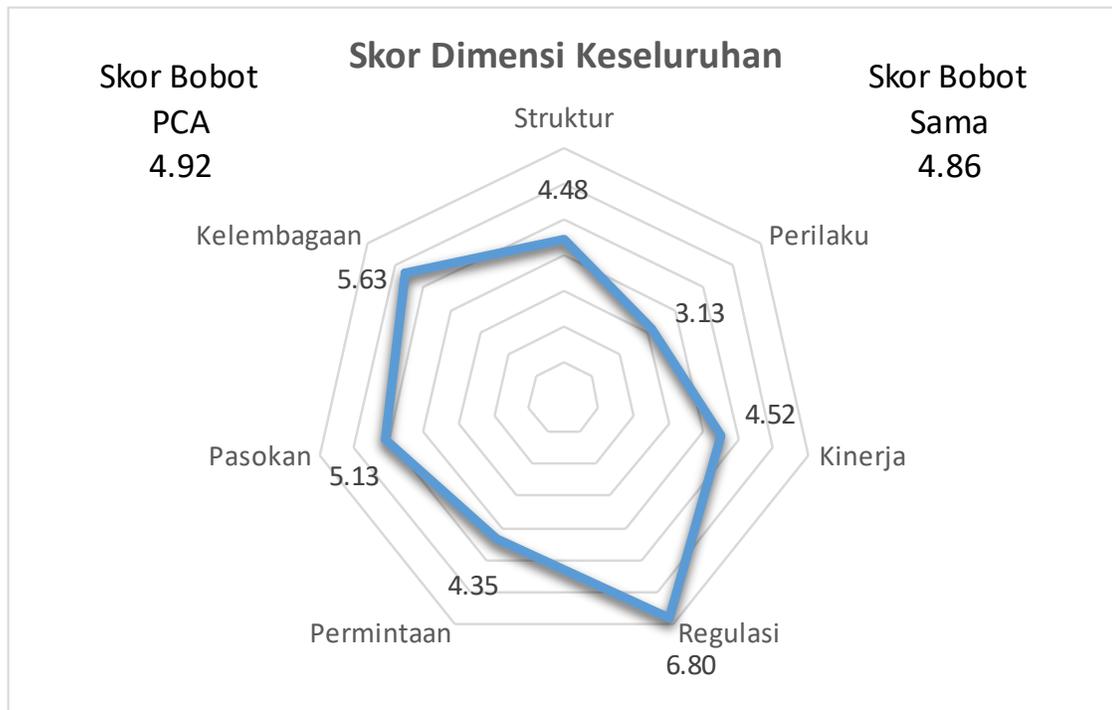
4.2.25. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,86 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,71. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku, struktur, permintaan, dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.53 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Utara tahun 2023 ini sebesar 4,92 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,86 dengan kategori yang sama. Grafik 4.53 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,80. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,13. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.53. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Dimensi Keseluruhan

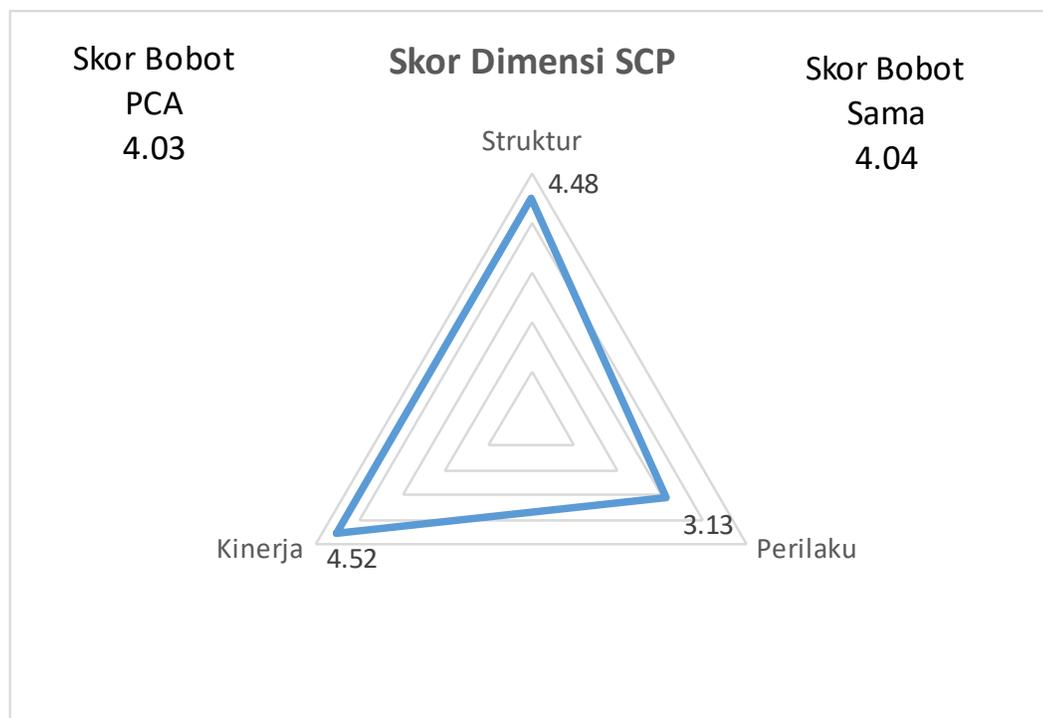


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.54 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Utara tahun 2023 ini sebesar 4,03 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,04 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.54 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,52. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,13. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Kalimantan Utara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.54. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Dimensi SCP



4.2.25. Provinsi Sulawesi Utara

4.2.25.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.28 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Utara terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Real Estate; 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Industri Pengolahan; 2) Informasi dan Komunikasi; 3) Jasa Keuangan dan Asuransi; dan 4) Real Estate. Sedangkan, 8 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi

yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Jasa Perusahaan; 7) Jasa Pendidikan; dan 8) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, dari sisi perilaku, satu responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti adanya asosiasi yang mengatur harga. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, Masing-masing responden menyatakan bahwa jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan pertambangan dan penggalan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain karena produk seperti sayuran berasal dari dataran tinggi. Seluruh responden menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Sulawesi Utara. Sebagian besar responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha di Sulawesi Utara. Dari sisi kebijakan, Sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Utara. Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh Sebagian besar responden.

Tabel 4.28 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Utara

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Utara tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Jasa Keuangan dan Asuransi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Real Estate 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Tinggi |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti adanya asosiasi yang mengatur harga. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|--|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain karena produk seperti sayuran berasal dari dataran tinggi. |
| Hambatan investasi | 100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Sulawesi Utara. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Utara. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

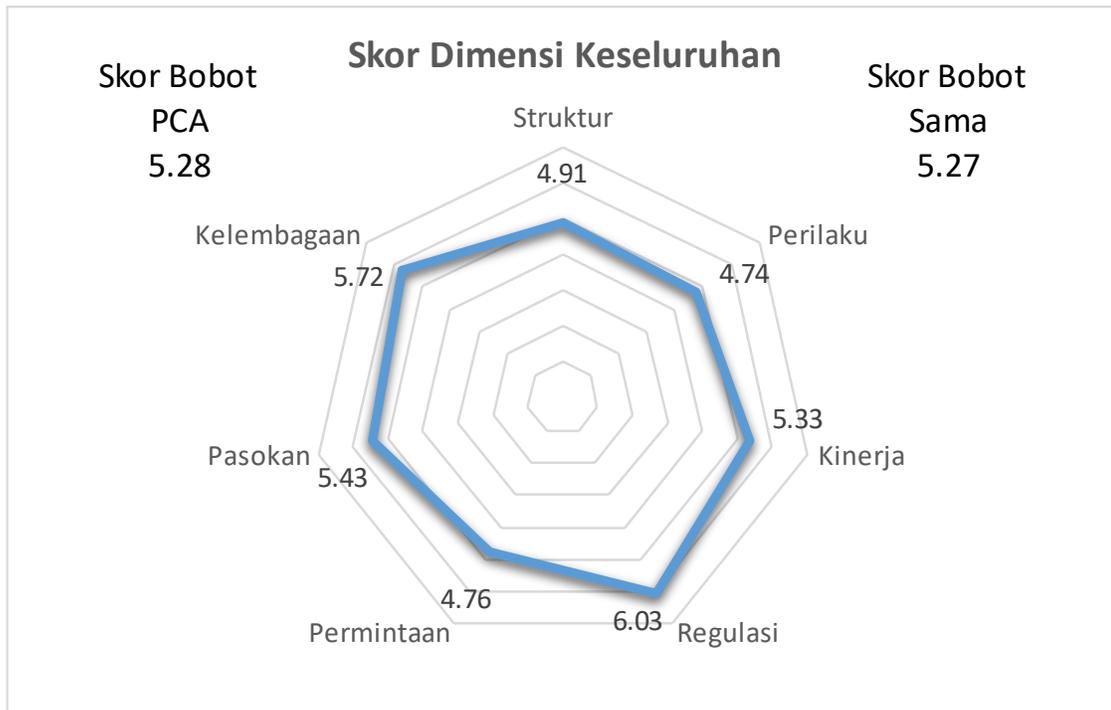
4.2.26. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,27 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,04. peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kelembagaan, pasokan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.55 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Utara tahun 2023 ini sebesar 5,28 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,27 dengan kategori yang sama. Grafik 4.55 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,03. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,74. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.55. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Utara Dimensi Keseluruhan



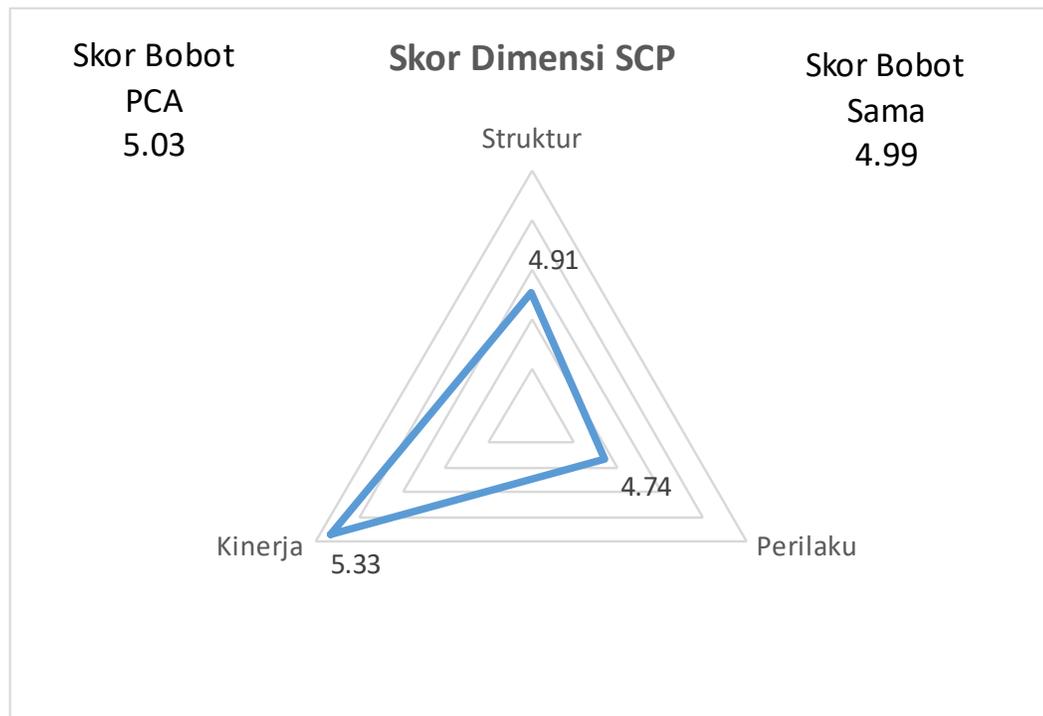
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.56 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Utara tahun 2023 ini sebesar 5,03 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,99 atau terkategori moderat. Grafik 4.56 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,33. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,74. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sulawesi Utara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien,

memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.56. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Utara Dimensi SCP



4.2.26. Provinsi Sulawesi Tengah

4.2.26.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.29 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Tengah terkategori tinggi, di mana sebagian responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 2) Jasa keuangan dan asuransi; 2) Jasa pendidikan, dan 3) Pengadaan Listrik, Gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Industri Pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Sedangkan, 10 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Konstruksi; 4)

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan; 9) Jasa Pendidikan; dan 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Hal tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, sebagian besar responden menyatakan bahwa industri pengolahan memiliki keuntungan terbesar. Sedangkan, sebagian kecil responden lainnya menyatakan pertambangan dan penggalan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian kecil responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian kecil responden menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan adanya kepastian hukum terkait pembebasan lahan, serta daerah yang rawan gempa yang menjadi penghambat dan menjadikan biaya investasi tinggi.

Sebagian responden menyatakan ada kasus persaingan usaha di Sulawesi Tengah karena ada pihak yang mengatur tender. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Tengah. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.29 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Tengah tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2. Jasa Keuangan dan Asuransi 3. Pengadaan Listrik, Gas | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa industri pengolahan, sedangkan 25% responden lainnya menyatakan pertambangan dan peenggalian adalah sektor dengan keuntungan terbesar. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|---|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 25% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 25% responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Tengah, dikarenakan kepastian hukum terkait pembebasan lahan, serta daerah yang rawan gempa membuat investor melakukan investasi |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 50% responden menjawab terdapat kasus persaingan usaha karena ada pihak yang mengatur tender. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Tengah. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

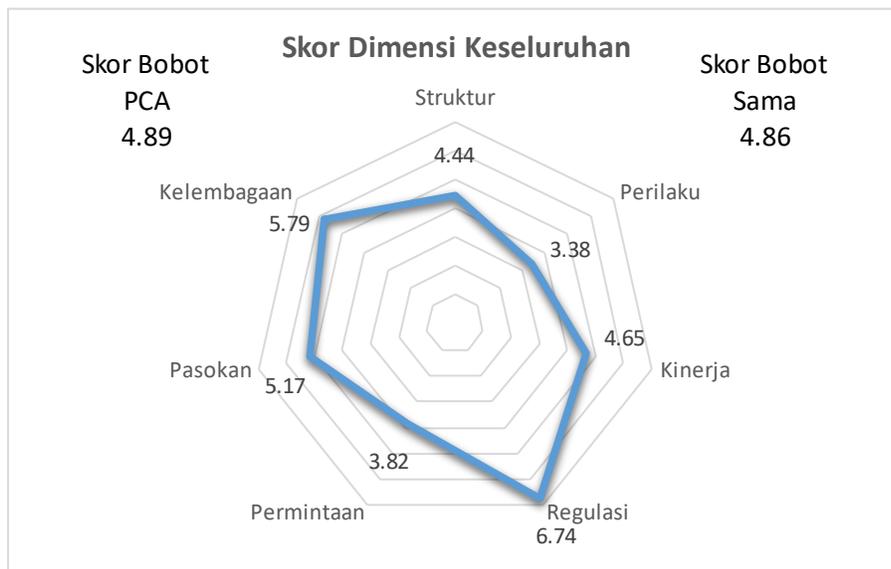
4.2.27. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,86 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,47. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, kelembagaan, pasokan, permintaan, dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.57 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Tengah tahun 2023 ini sebesar 4,89 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,86 dengan kategori yang sama. Grafik 4.57 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,74. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,38. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

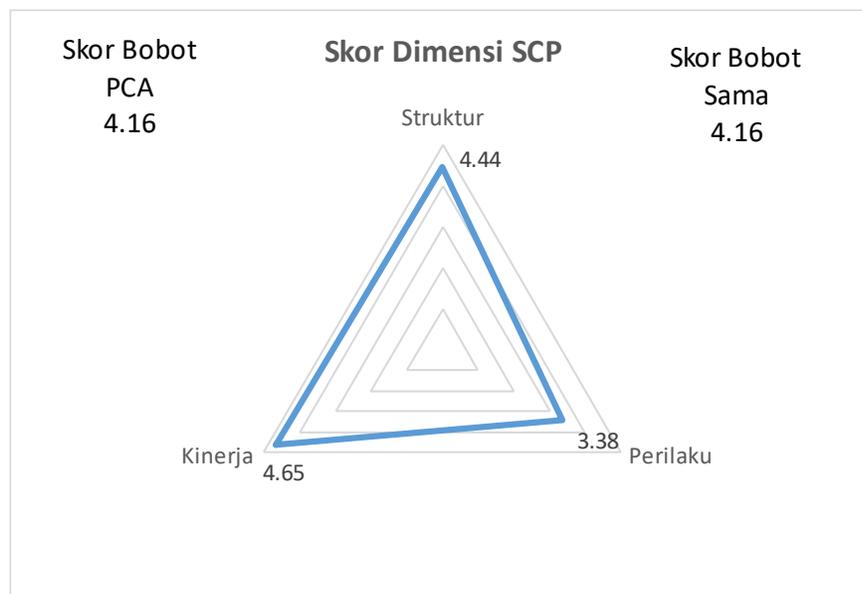
Grafik 4.57. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.58 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Tengah tahun 2023 ini sebesar 4,16 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,16 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.58 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,38. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri yang ada di Sulawesi Tengah ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.58. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Dimensi SCP



4.2.27. Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.27.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.30 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Selatan terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Transportasi dan Pergudangan; dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan, 11 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; dan 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial . Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian kecil responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh masalah permodalan dan perizinan. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian kecil responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti kesepakatan atau diatur oleh negara. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, sebagian besar responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian dan sebagian kecil responden menyatakan sektor industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih murah dibanding daerah sekitar. Sebagian responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Selatan. Hal ini, dikarenakan adanya resistensi masyarakat. Sebagian kecil responden menyatakan ada kasus persaingan usaha di Sulawesi Selatan terutama pada sektor industry konstruksi. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan. Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.30 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Selatan tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Jasa keuangan dan asuransi | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik, Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Pertambangan dan Penggalan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh masalah permodalan. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|---|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa sektor petambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, 25% responden menyatakan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran adalah sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 50% responden terdapat hambatan investasi di Sulawesi Selatan, dikarenakan adanya resistensi masyarakat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 25% responden menjawab ada kasus persaingan usaha, terutama pada bidang konstruksi. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Selatan. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.28. Indeks Persaingan Usaha

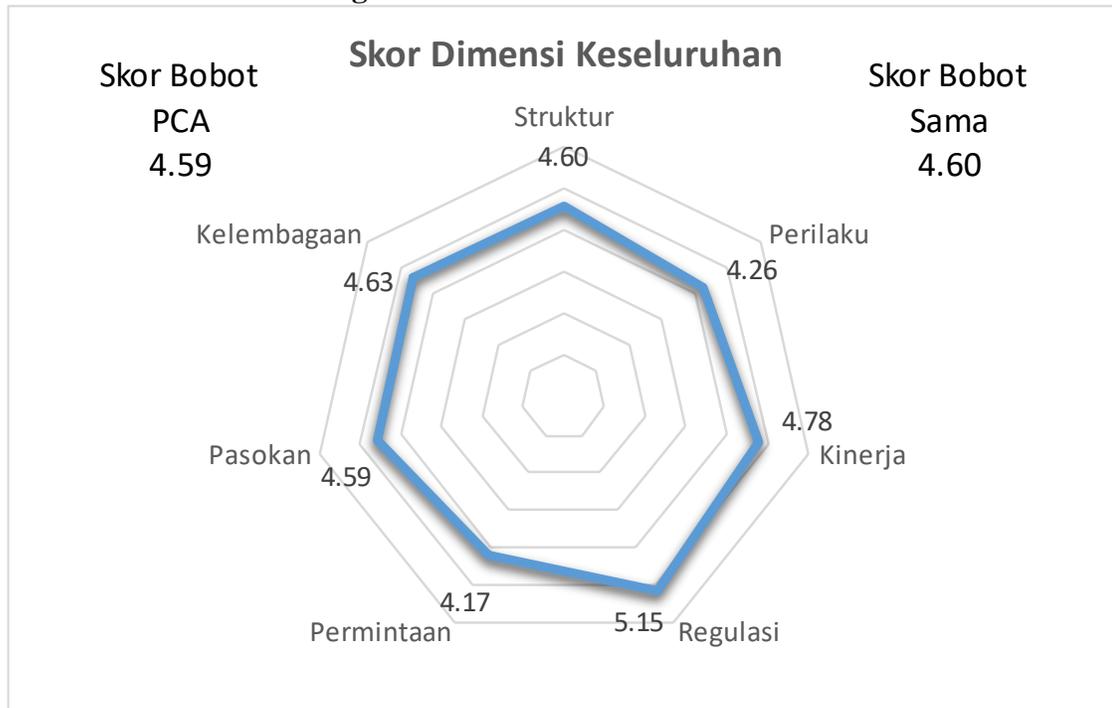
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun

pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,60 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,59. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, pasokan, regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.59 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Selatan tahun 2023 ini sebesar 4,59 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,60 dengan kategori yang sama. Grafik 4.59 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,15. Sementara, dimensi permintaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,14. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi permintaan menunjukkan bahwa dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi DKI Jakarta cenderung bersifat inelastis, relatif kurang memiliki varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif rendah.

Grafik 4.59. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Dimensi Keseluruhan

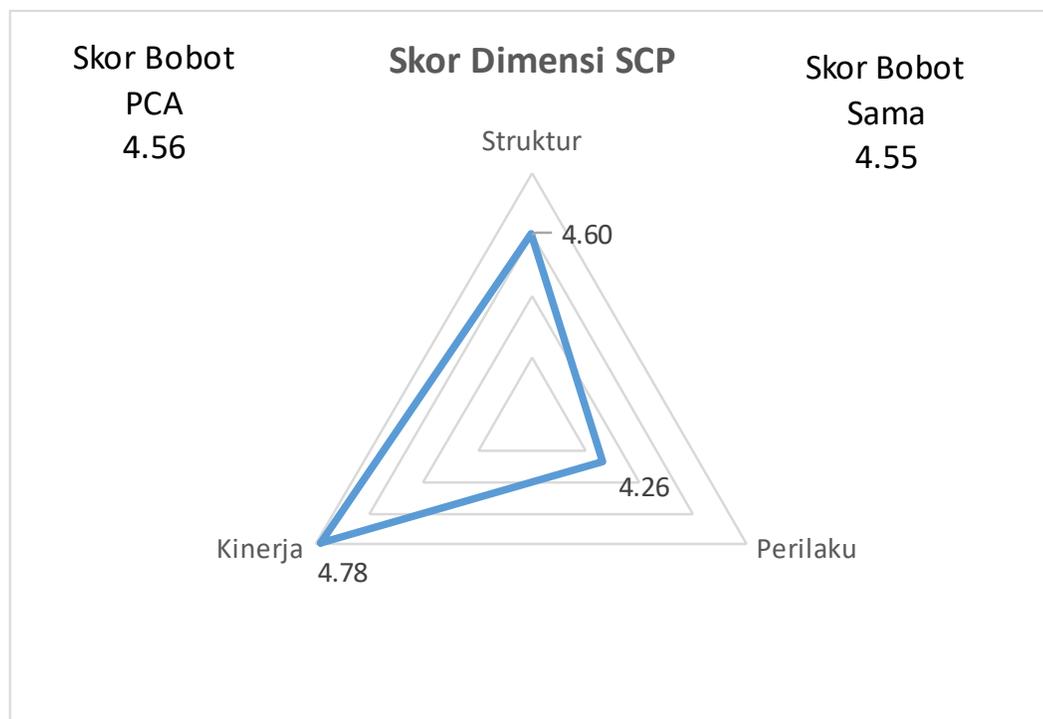


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.60 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Selatan tahun 2023 ini sebesar 4,56 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,55 atau dalam kategori yang sama. Grafik 4.60 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,78. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,26. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sulawesi Selatan ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologitinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Selatan masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.60. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Dimensi SCP



4.2.28. Provinsi Sulawesi Tenggara

4.2.28.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.31 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan persepsi responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian responden menyatakan bahwa persaingan usaha di Sulawesi Tenggara terkategori tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Akomodasi dan Makan Minum; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3) Jasa Perusahaan. Hal ini wajar jika sektor- sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Konstruksi; 3) Real Estate. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 6 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalan; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Informasi dan

Komunikasi; 5) Jasa Pendidikan; 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 7 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Transportasi dan Pergudangan; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4) Jasa Keuangan dan Asuransi; 5) Real Estate; 6) Jasa Perusahaan dan 7) Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan sebagian responden menyatakan terdapat hambatan akibat adanya masalah permodalan. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif sama dibanding daerah sekitar. Seluruh responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Sulawesi Tenggara. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian responden.

Tabel 4.31 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|--|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Tenggara tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi dan Makan Minum 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3. Jasa Perusahaan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Konstruksi 3. Real Estate | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan sebagian menyatakan terdapat adanya hambatan permodalan. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |

| | |
|--|---|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 100% responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah (relatif sama) dibandingkan dengan daerah sekitar. |
| Hambatan investasi | 50% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Sulawesi Tenggara. Sebagian responden menyatakan hambatan investasi terjadi akibat resistensi masyarakat regulasi yang sulit. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Tenggara |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 50% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

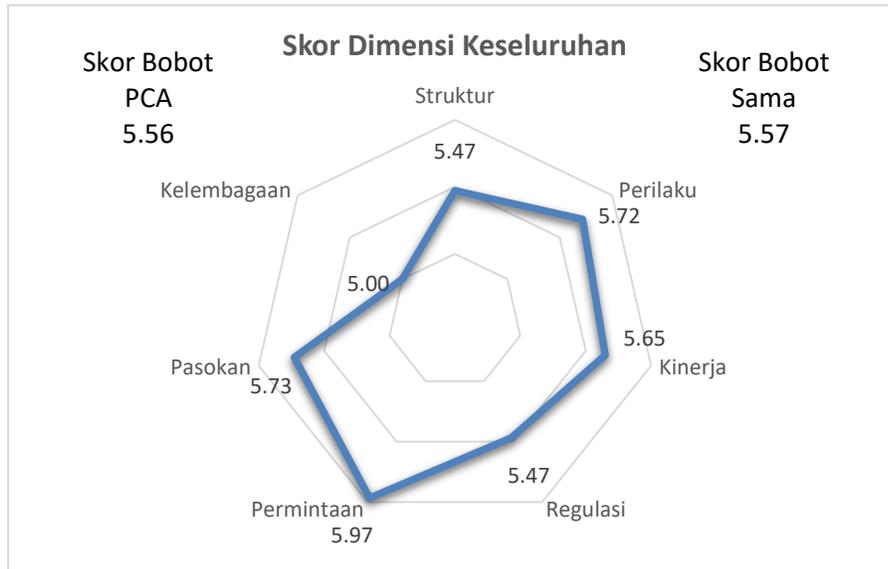
4.2.29. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,57 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,37. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, struktur, pasokan, permintaan dan regulasi.

- **Indeks Dimensi Keseluruhan**

Grafik 4.61 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Tenggara tahun 2023 ini sebesar 5,56 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobotsama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,57 dengan kategori yang sama. Grafik 4.61 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi permintaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,97. Sementara dimensi kelembagaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,00. Hal tersebut mengindikasikan dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung bersifat elastis, relatif memiliki banyak varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengarusutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

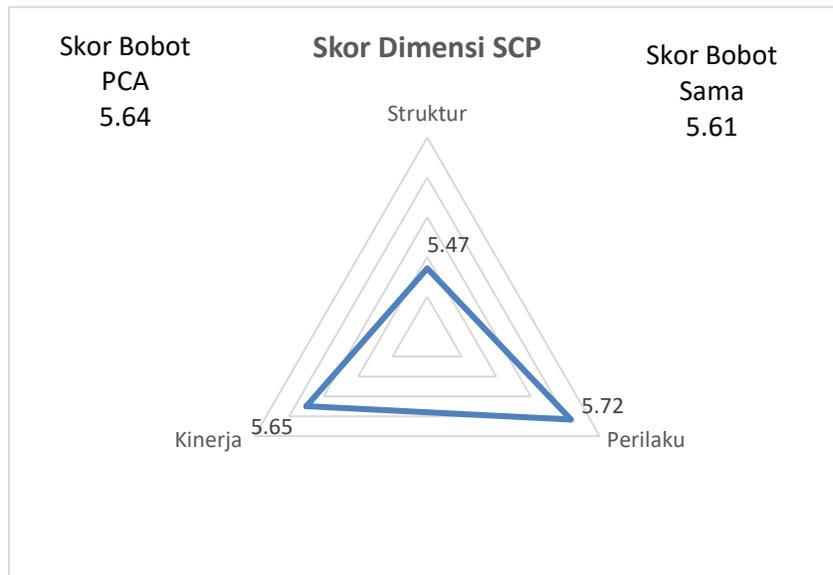
Grafik 4.61. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.62 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Tenggara tahun 2023 ini sebesar 5,64 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,61 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.62 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi perilaku memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,72. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,47. Tingginya skor dimensi perilaku mengindikasikan bahwa perilaku industri telah mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Tenggara relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan yang sehat. Sementara itu, rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Bengkulu terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

Grafik 4.61. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Dimensi SCP



4.2.29. Provinsi Gorontalo

4.2.29.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.32 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Gorontalo berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Gorontalo terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Real Estate, dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik, Gas; 5) Informasi dan Komunikasi; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; dan 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kemudian terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang; 2) Konstruksi; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Real Estate; 7) Jasa Perusahaan; 8) Jasa Pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti asosiasi. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, sebagian responden menyatakan bahwa industri pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan sebagian responden lainnya menyatakan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Gorontalo relatif lebih murah dibanding daerah sekitar. Sebagian kecil responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Gorontalo, seperti resistensi masyarakat dan regulasi perizinan. Sebagian responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Gorontalo terutama pada sektor konstruksi. Dari sisi kebijakan, sebagian responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Gorontalo dimana peraturan tersebut merupakan peraturan daerah mengenai penunjukan proyek yang langsung memihak kolega dari pemerintah daerah. Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian responden.

Tabel 4.32 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Gorontalo

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Gorontalo tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik, Gas 2. Real Estate 3. Pertambangan dan Penggalian | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Rendah |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan bahwa industri pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan 50% responden lainnya menyatakan pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar. | |

| | |
|--|--|
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Gorontalo. Sedangkan, 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Gorontalo. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 50% responden menjawab ada kasus persaingan usaha dibidang konstruksi |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 50% responden menyatakan ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Gorontalo. Peraturan tersebut merupakan peraturan daerah mengenai penunjukan proyek yang langsung memihak kolega dari pemerintah daerah. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.30. Indeks Persaingan Usaha

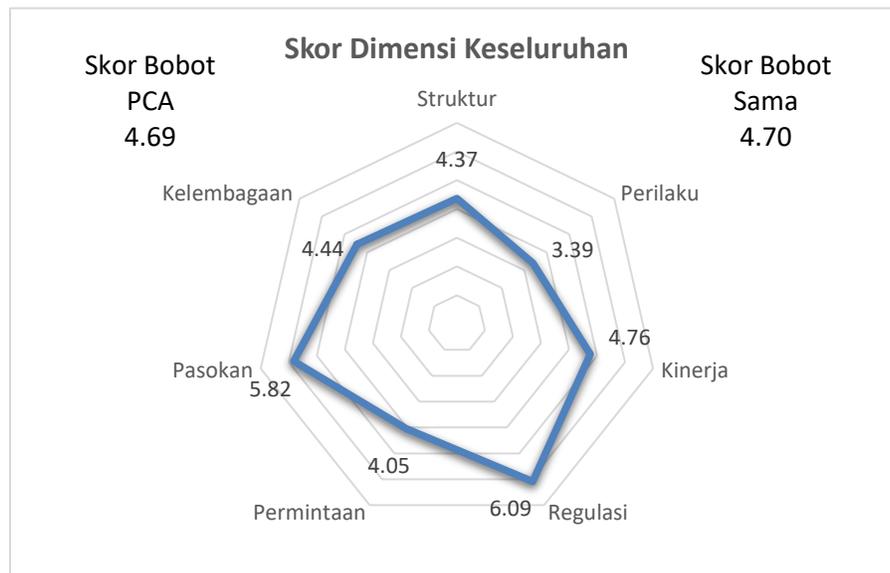
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Gorontalo dengan

menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,70 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,19. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, struktur, kelembagaan, pasokan, dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.63 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Gorontalo tahun 2023 ini sebesar 4,69 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,70 dengan kategori yang sama. Grafik 4.63 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,09. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,39. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Gorontalo masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.63. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Gorontalo Dimensi Keseluruhan



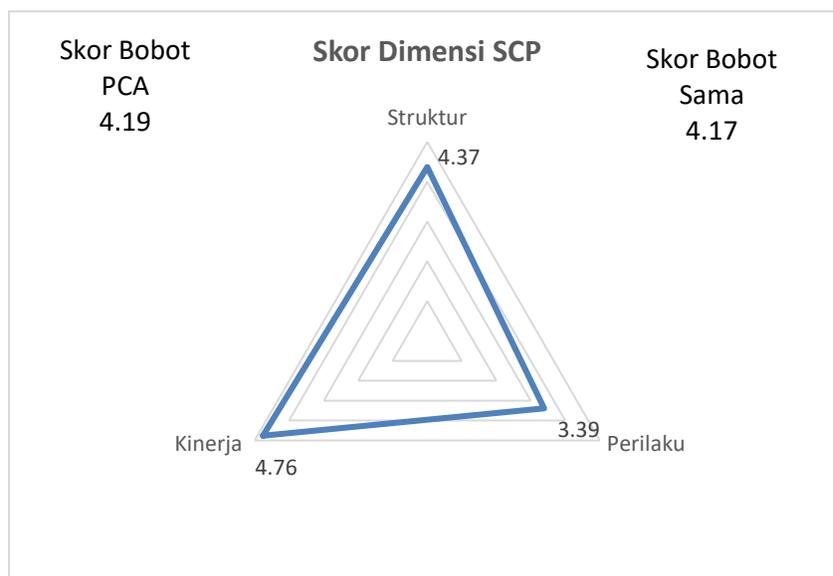
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.64 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Gorontalo hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Gorontalo tahun 2023 ini sebesar 4,19 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,17 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.64 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,76. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,39. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri yang ada di Gorontalo ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa

meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Gorontalo masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.64. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Gorontalo Dimensi SCP



4.2.30. Provinsi Sulawesi Barat

4.2.30.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.33 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Barat terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Transportasi dan Pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan 3) Jasa Perusahaan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 11 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Industri Pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Informasi dan Komunikasi; 8) Jasa Keuangan dan Asuransi; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; dan 11)

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Transportasi dan Pergudangan; dan 4) Real Estate. Hal tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, seluruh responden menyatakan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar khususnya pada industry sawit.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, khususnya pada bahan-bahan pokok. Sebagian besar responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Barat, khususnya terkait regulasi dan resistensi masyarakat. Sebagian responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Sulawesi Barat. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Barat. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.33 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Barat

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Barat tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Transportasi dan Pergudangan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Jasa Perusahaan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Moderat |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 100% responden menyatakan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar, khususnya pada indsutri sawit. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|---|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, khususnya pada bahan-bahan pokok. |
| Hambatan investasi | 75% responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Barat, khususnya terkait regulasi dan resistensi masyarakat. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 50% responden menjawab ada kasus persaingan usaha. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Barat. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

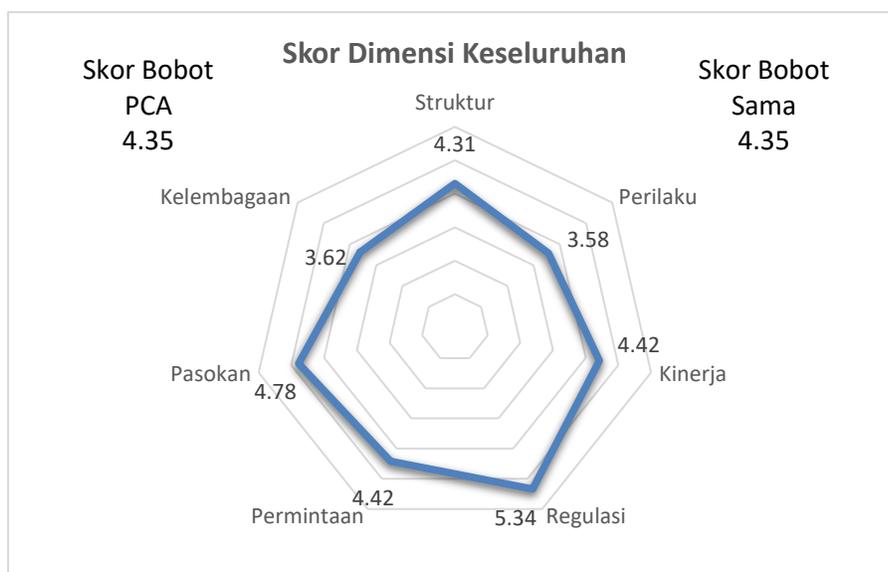
4.2.31. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,35 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,43. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, kelembagaan dan pasokan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.65 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Barat tahun 2023 ini sebesar 4,35 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,35 dengan kategori yang sama. Grafik 4.65 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,34. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,58. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.65. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Dimensi Keseluruhan



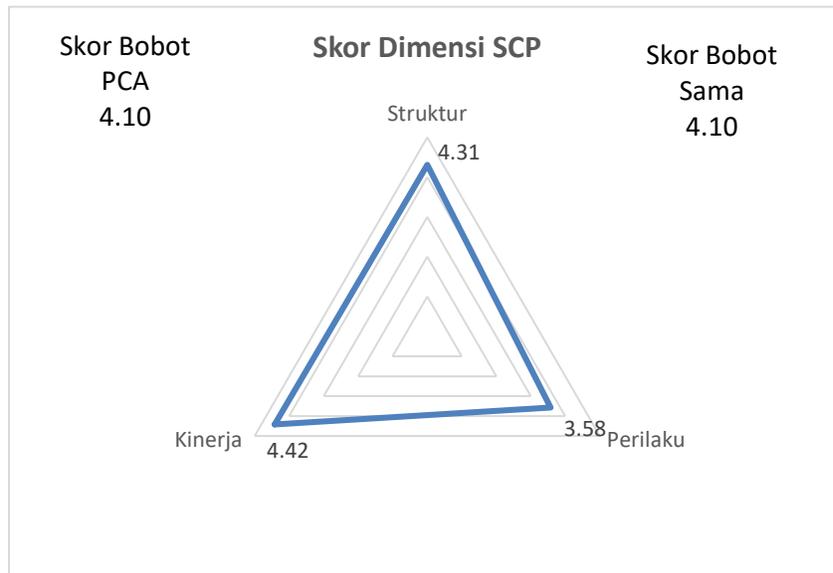
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.66 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Barat tahun 2023 ini sebesar 4,10 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,10 dengan kategori yang sama. Grafik 4.66 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan.

Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,42. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,58. Tingginya skor dimensi kinerja pasar yang ada di Sulawesi Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.66. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Dimensi SCP



4.2.31. Provinsi Maluku

4.2.31.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.34 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Maluku berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Maluku terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan 3) Industri pengolahan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Transportasi dan Pergudangan, dan 3) Pengadaan Listrik dan Gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik, Gas; 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6) Konstruksi; dan 7) Transportasi dan Pergudangan. Kemudian terdapat 8 sektor

yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 3) Informasi dan Komunikasi; 4) Jasa Keuangan dan Asuransi; 5) Real Estate; 6) Jasa Perusahaan; 7) Jasa Pendidikan; dan 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Maluku. Sedangkan sebagian kecil responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh administrasi. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, sebagian responden menyatakan bahwa industri Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Maluku relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Maluku, dikarenakan adanya kasus resistensi masyarakat, dan perizinan. Sebagian responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Maluku, seperti dalam proses tender. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku. Sedangkan sebagian kecil responden menyatakan terdapat kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha, seperti peraturan investasi, kebijakan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.34 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Maluku

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Maluku tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3) Industri Pengolahan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | 1) Pertambangan dan Penggalian 2) Trasportasi dan Pergudangan 3) Pengadaan Listrik dan Gas | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Moderat |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh adanya perizinan yang rumit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 50% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. | |

| Pertanyaan | Deskripsi |
|--|--|
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 75% responden menyatakan bahwa industri Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Maluku, dikarenakan adanya kasus resistensi masyarakat, dan perizinan. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 25% responden menjawab ada kasus persaingan usaha seperti dalam proses tender. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

4.2.32. Indeks Persaingan Usaha

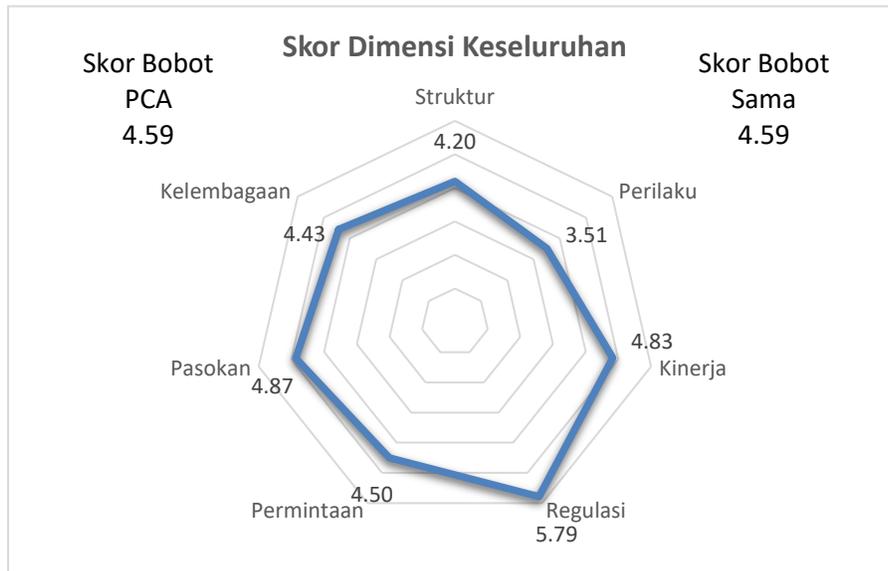
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku dengan

menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,59 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,56. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi permintaan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.67 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Maluku tahun 2023 ini sebesar 4,59 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,59 dengan kategori yang sama. Grafik 4.67 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,79. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,51. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Provinsi Maluku masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.67. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Dimensi Keseluruhan



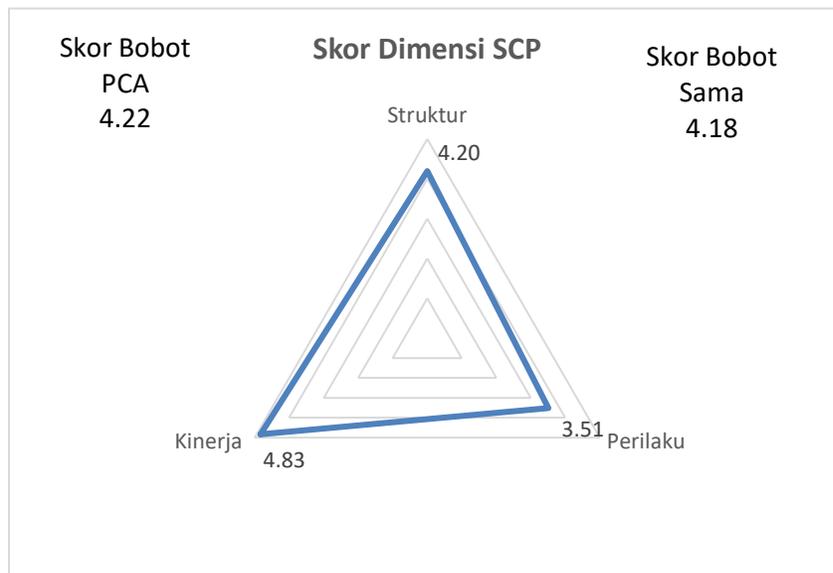
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.68 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Maluku tahun 2023 ini sebesar 4,22 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,18 dengan kategori yang sama. Grafik 4.18 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan.

Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,83. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,51. Tingginya skor dimensi kinerja pasar yang ada di Maluku ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki perilaku industri yang baik, namun kinerja industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah belum mampu beroperasi secara relatif efisien, belummemiliki produktifitas yang relatif baik, relatif belum mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan belum menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Grafik 4.68. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Dimensi SCP



4.2.32. Provinsi Maluku Utara

4.2.32.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.35 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Maluku Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Maluku Utara terkategori moderat, di mana sebagian responden mempersepsikan rendah dan tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Informasi dan komunikasi, dan 3) Pengadaan listrik dan gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 5) Real estate. Kemudian terdapat 10 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni

1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri pengolahan; 4) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 5) Konstruksi; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Informasi dan komunikasi; 7) Jasa Keuangan dan asuransi 8) Jasa perusahaan; dan 9) Jasa pendidikan; dan 10) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan, 50% responden lainnya menyatakan masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, 50% responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, sisanya menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian besar responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Maluku Utara, dikarenakan adanya resistensi masyarakat, isu lingkungan, institusi dan klasifikasi SDM. Sebagian responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Maluku Utara, seperti dalam proses tender. Sedangkan, sebagian lain menjawab sering kali antara pemegang proyek, seperti lobi-lobi atau kesepakatan dibelakang meja, dan pemerintah yang tidak konsisten dalam kebijakan. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku Utara. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.35 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Maluku Utara tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan Penggalian 2) Informasi dan Komunikasi 3) Pengadaan Listrik dan Gas | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Moderat |
| | 2 | Konsentrasi Rendah |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Rendah |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 9 | Konsentrasi Moderat |
| | 10 | Konsentrasi Rendah |
| | 11 | Konsentrasi Rendah |
| | 12 | Konsentrasi Moderat |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Rendah |
| | 15 | Konsentrasi Rendah |
| Hambatan Berusaha | 50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, 50% responden lainnya menyatakan masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, sisanya menyatakan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |

| | |
|--|---|
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. |
| Hambatan investasi | 75% responden terdapat hambatan investasi di Maluku Utara, dikarenakan adanya resistensi masyarakat, isu lingkungan, institusi dan klasifikasi SDM. |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, 50% lainnya menjawab sering kali antara pemegang proyek, seperti lobi-lobi atau kesepakatan dibelakang meja, dan pemerintah yang tidak konsisten dalam kebijakan. |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku Utara. |
| Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. |

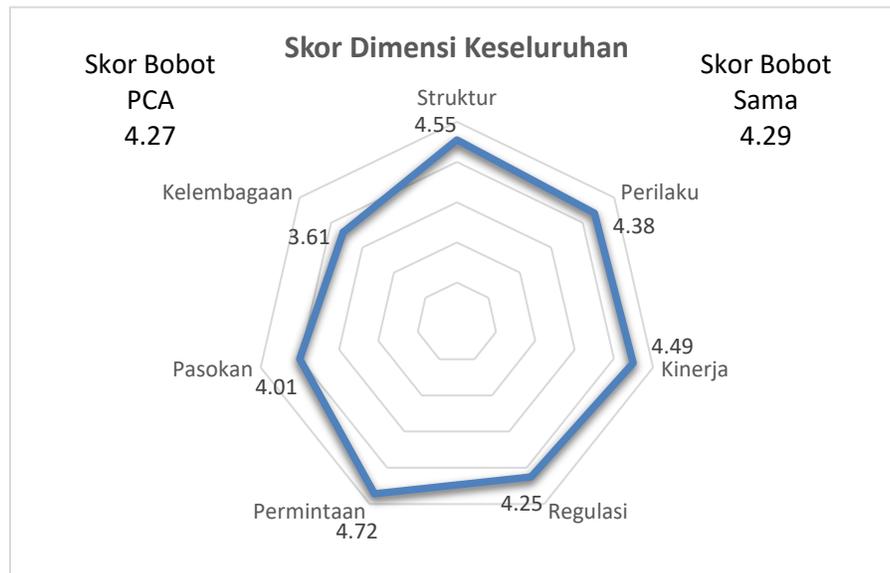
4.2.33. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4.29 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,22. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, perilaku, kelembagaan dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.69 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Maluku Utara tahun 2023 ini sebesar 4,27 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,29 dengan kategori yang sama. Grafik 4.69 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi permintaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,72. Sementara dimensi kelembagaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,61. Hal tersebut mengindikasikan dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi Maluku Utara cenderung bersifat elastis, relatif memiliki banyak varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengarusutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah belum dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.69. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara Dimensi Keseluruhan



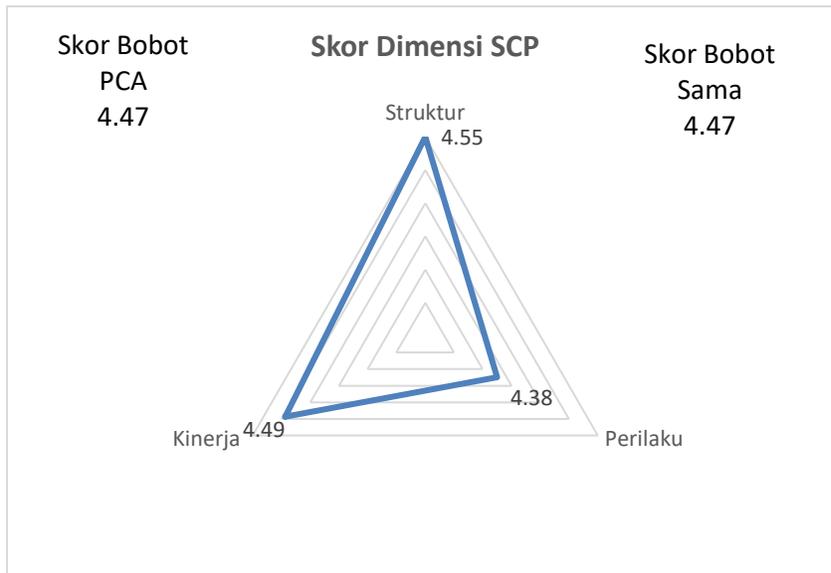
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.70 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Maluku Utara tahun 2023 ini sebesar 4,47 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,47 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.70 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,55. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,38. Tingginya skor dimensi struktur mengindikasikan bahwa struktur industri yang ada di Maluku Utara telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa

meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Maluku Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.70. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara Dimensi SCP



4.2.33. Provinsi Papua Barat

4.2.33.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.36 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Papua Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Papua Barat terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, 2) Konstruksi, dan 3) Transportasi dan Pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, dan 3) Informasi dan Komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Jasa Keuangan dan Asuransi; 3) Real Estate; 4) Jasa Perusahaan; dan 5) Jasa Pendidikan. Kemudian, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Industri Pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Informasi dan Komunikasi; 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 3 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi rendah, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan adanya masalah perizinan, permodalan, dan konektivitas yang terhambat. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Papua Barat relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Seluruh responden juga menyatakan bahwa terdapat adanya hambatan investasi di Papua Barat, khususnya masalah resistensi masyarakat. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.36 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Papua Barat

| Pertanyaan | Deskripsi |
|------------------------------------|--|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Papua Barat tinggi. |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Konstruksi 3) Transportasi dan Pergudangan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaam Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3. Informasi dan Komunikasi | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Tinggi |
| | 3 | Konsentrasi Moderat |
| | 4 | Konsentrasi Moderat |
| | 5 | Konsentrasi Moderat |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Moderat |
| | 8 | Konsentrasi Moderat |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |
| | 10 | Konsentrasi Moderat |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 11 | Konsentrasi Tinggi |
| | 12 | Konsentrasi Tinggi |
| | 13 | Konsentrasi Tinggi |
| | 14 | Konsentrasi Tinggi |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar akibat mahalannya permodalan, konektivitas yang terhambat, dan perizinan. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena dipasok dari daerah lain. | |
| Hambatan investasi | 50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Papua Barat, khususnya terkait resistensi masyarakat. | |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. | |
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Papua Barat. | |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha. | |

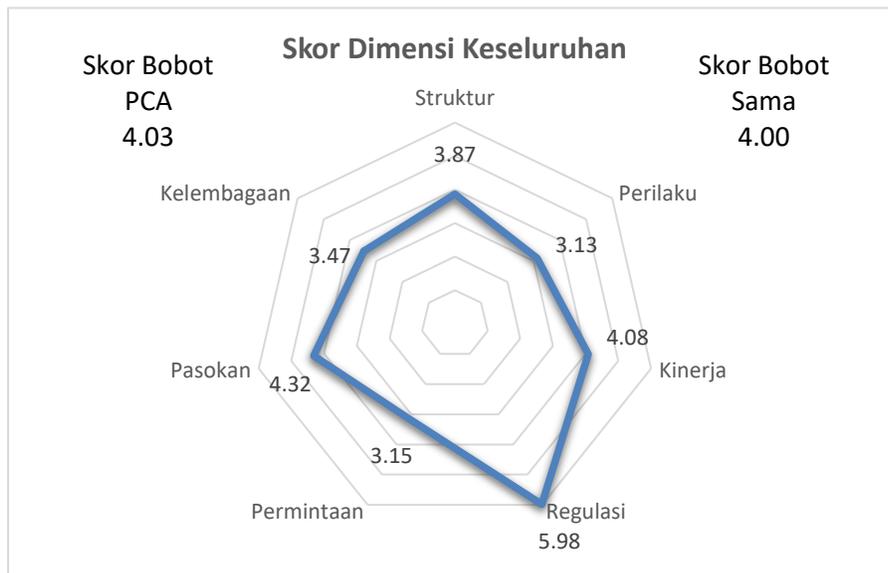
4.2.34. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,00 atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,07. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku, struktur, kelembagaan dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.71 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Papua Barat tahun 2023 ini sebesar 4,03 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,00 dengan kategori yang sama. Grafik 4.71 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,98. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,13. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.71. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Barat Dimensi Keseluruhan



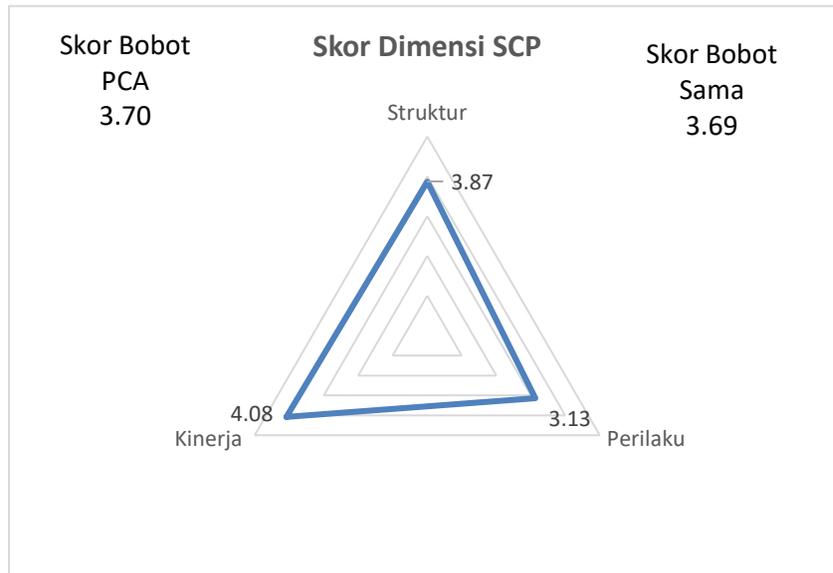
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.72 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Papua Barat tahun 2023 ini sebesar 3,70 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 3,69 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.72 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,08. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,13. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Papua Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa

meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.72. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Barat Dimensi SCP



4.2.34. Provinsi Papua

4.2.34.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.37 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Papua berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Papua terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik dan gas; 2) Industri Pengolahan; dan 3) Jasa Perusahaan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Pengalihan; 2) Informasi dan Komunikasi; 3) Jasa Keuangan dan Asuransi; 4) Jasa Pendidikan; dan 5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan terdapat 8 sektor yang

dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Real Estate; dan 8) Jasa Perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Papua. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan dalam menentukan kesepakatan harga. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, sebagian responden menyatakan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Papua relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Seluruh responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Papua, dikarenakan adanya hak ulayat dan adat. Sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat kasus persaingan usaha di Papua. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Papua, seperti UU Otonomi Khusus yang memprioritaskan masyarakat asli Papua. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden, khususnya dalam kebutuhan rumah tangga.

Tabel 4.37 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Papua

| Pertanyaan | Deskripsi | |
|---|---|---------------------|
| Kondisi Persaingan Usaha di Daerah | 100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Papua tinggi. | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Petrtanian, Kehutanan dan Perikanan | |
| 3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Industri Pengolahan 3. Jasa Perusahaan | |
| Rata-rata Konsentrasi Industri*) | Sektor | Rata-rata |
| | 1 | Konsentrasi Rendah |
| | 2 | Konsentrasi Moderat |
| | 3 | Konsentrasi Rendah |
| | 4 | Konsentrasi Tinggi |
| | 5 | Konsentrasi Tinggi |
| | 6 | Konsentrasi Rendah |
| | 7 | Konsentrasi Rendah |
| | 8 | Konsentrasi Rendah |
| | 9 | Konsentrasi Rendah |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | 10 | Konsentrasi Moderat |
| | 11 | Konsentrasi Moderat |
| | 12 | Konsentrasi Rendah |
| | 13 | Konsentrasi Rendah |
| | 14 | Konsentrasi Moderat |
| | 15 | Konsentrasi Moderat |
| Hambatan Berusaha | 75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. | |
| Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat | 75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan dalam menentukan kesepakatan harga. | |
| Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar | 50% responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. | |
| Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain | 100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena mayoritas dipasok dari wilayah lain. | |
| Hambatan investasi | 100% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Papua, dikarenakan adanya hak ulayat dan adat. | |
| Kasus persaingan usaha yang pernah ada | 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. | |

| | |
|---|---|
| Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat | 75% responden menyatakan ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Papua, seperti UU Otonomi Khusus yang memprioritaskan masyarakat asli Papua |
| Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha | 75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya dalam kebutuhan rumah tangga. |

4.2.35. Indeks Persaingan Usaha

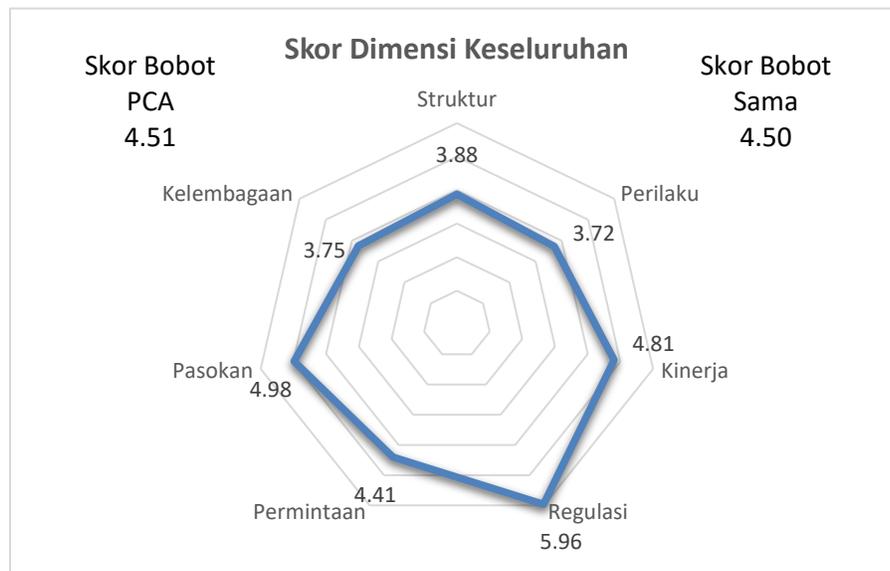
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha di Provinsi Papua dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,50 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.45. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi pasokan, permintaan dan regulasi.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.73 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Papua tahun 2023 ini sebesar 4,50 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,51 dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.73 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,96. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,72. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usahayang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.73. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Dimensi Keseluruhan

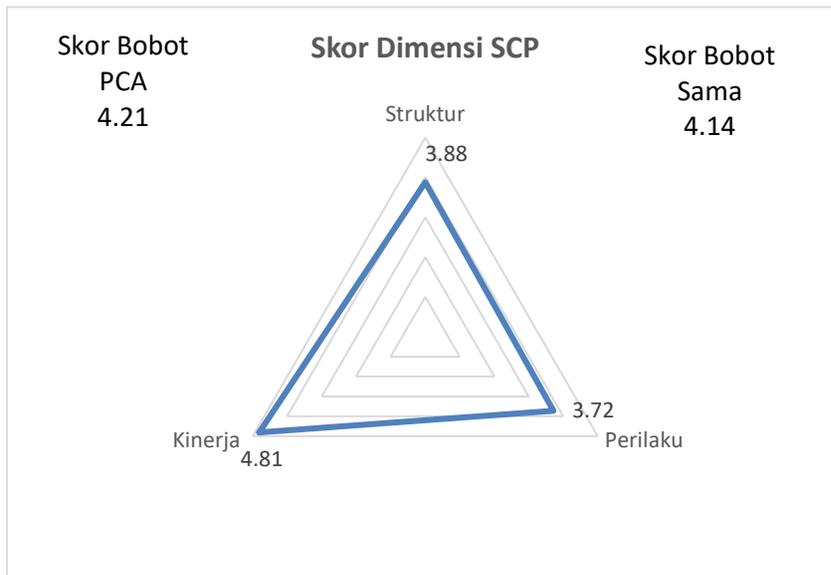


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.74 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Papua tahun 2023 ini sebesar 4,21 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,14 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.74 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,81.

Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Papua telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.83. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Dimensi SCP



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan survei dan analisis untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diagregasi melalui pengukuran persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di daerah yang dilakukan dengan menggunakan survei persepsi terhadap pelaku usaha, pengambil kebijakan dan akademisi dengan menggunakan dimensi dan indikator dalam persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Dimensi lainnya dari lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk penting untuk indeks persaingan usaha.

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

- Dimensi struktur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan.
- Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas.
- Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar.
- Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input.
- Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan memfasilitasi monopoli.

- Dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

Penelitian ini dilakukan melalui survei terhadap 34 provinsi dengan responden Kadin, Akademisi, BankIndonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan akhir untuk indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor dengan pembobotan sama untuk seluruh indikator atau pembobotan menggunakan *principal component analysis*. Metode yang digunakan untuk penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan metode *Additive Aggregation Method* (AAM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Kenaikan indeks persaingan usaha pada tahun 2023 melanjutkan kenaikan pada tahun tahun 2021 dimana hal ini diduga karena Pandemi Covid-19 diduga tidak lagi berpengaruh secara signifikan dan perekonomian Kembali normal. Dimensi kinerja dan perilaku tersebut memiliki kontribusi sekitar 25 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2023 menunjukkan adanya sedikit perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah pada tahun 2021. Sebagai contoh, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan pada tahun ini masuk menjadi 10 provinsi dengan persaingan usaha

yang paling tinggi. Provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur tetap konsisten berada pada 10 (sepuluh) besar provinsi dengan skor indeks persaingan usaha tertinggi. Daftar 10 (sepuluh) provinsi dengan skor indeks persaingan usaha terendah juga tetap konsisten setiap tahunnya memasukan Papua Barat, Maluku Utara dan Gorontalo..

Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah masih tidak mengalami perubahan. Tahun 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minuman merupakan sektor yang tetap memiliki persaingan usaha paling tinggi diikuti oleh sektor dengan urutan kedua setelah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor-sektor yang memiliki persaingan usaha yang rendah merupakan sektor-sektor yang masih sedikit pelaku usaha yang beroperasi di sektor-sektor tersebut.

5.2 Implikasi Kebijakan

Dari hasil indeks persaingan usaha ini diperoleh beberapa kesimpulan penting yang dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk memberikan implikasi kebijakan dan proses penindakan lebih lanjut.

1. Berdasarkan hasil survei persepsi tahun 2023, Papua Barat, Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang dapat menjadi perhatian utama KPPU untuk memberikan sosialisasi kebijakan persaingan usaha.
2. Kajian dan advokasi kebijakan maupun proses inisiatif penyelidikan sangat mungkin dilakukan pada wilayah Provinsi Papua Barat, Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Tengah. Kebijakan ini perlu dilakukan terutama kepada provinsi yang memiliki ranking indeks yang turun dari tahun 2022.
3. Diperlukan adanya advokasi dan investigasi kepada sektor-sektor yang memiliki nilai

indeks yang rendah seperti Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan Pengadaan Listrik dan Gas karena sektor-sektor tersebut secara konsisten memiliki nilai ranking indeks yang rendah.

REFERENSI

- Azzam, A.M., 1997. Measuring Market Power and Cost-Efficiency Effects on Industrial Concentration, *Journal of Industrial Economics*, XLV(4): 377-386.
- Bain, J.S., 1951. Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940, *Quarterly Journal of Economics*, 65:293-324
- Bain, J.S., 1956. *Barriers to New Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Bain, J.S., 1959. *Industrial Organization*. New York: John Wiley
- Bresnahan, T. F., 1982. The oligopoly solution is identified, *Economic Letters*, 10: 87-92.
- Clarke, R, & S.W. Davies, 1982. Market Structure and Price-cost Margins, *Economica*, New Series, 49 (195):277-287
- Cowling, K. & M. Waterson, 1976. Price-cost Margin and Market Structure, *Economica*, 43:267-274
- Demsetz, H., 1973. Industry, structure, market rivalry, and public policy. *Journal of Law and Economics*, 16:1-9
- Griffith, R., Boone, J., Harrison, R., 2005. Measuring Competition, AIM Research Working Paper Series, ISSN, 1744-0009
- LP3E FEB, 2001. Identifikasi faktor-faktor penentu serta pemeringkatan daya saing antar daerah propinsi indonesia, Kerjasama Bank Indonesia dengan LP3E FEB UNPAD.
- Lipczynski, J. & J. Wilson, 2001. *Industrial Organization: An Analysis of Competitive Markets*.
Prentice Hall
- Lopez, R.A, Azzam, A.M., and Liron-Espana, C., 2002. Market Power and/Or Efficiency: A Structural Approach, *Review of Industrial Organization*, 20:115-126
- Marsden, P., 2006. *Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust*. Edward Elgar Publishing
- Nickell, SJ, 1996. Competition and Firm Performance, *Journal of political economy*, 104(4): 724-746
- OECD, 2008. A Policy Framework for Investment: Competition Policy, OECD Conference Investment for Development, Europe
- Polder, M., E. Veldhuizen, D. van den Bergen, & E. van der Pijll, 2009. Micro and Macro Indicators of Competition: Comparison and Relation with Productivity Change, Discussion paper 09024, Statistics Netherland
- Porter, Michael E., “*The Competitive Advantage of Nations*”, The Free Press, 1990.
- Porter, Michael E., Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner, Peter K. Cornelius, Macha Levinson, and Klaus Schwab, “*The Global Competitiveness Report 2000*”, Oxford University Press, 2000.
- Setiawan, M., Purnagunawan, R.M., Hermawan, W., Suara, Y.I., Heriyaldi, and Pradono, T.D., 2013.
Estimating the Effects of Competition on the Sectoral Performances of the Major Industries in Indonesia, Working Paper Faculty of Economics, University of Padjadjaran.

- Setiawan, M, Emvalomatis, G, Oude Lansink, A (2012a) Industrial Concentration and Price Cost Margin in Indonesian Food and Beverages Industry, *Applied Economics*, 44:3805-3814
- Setiawan, M, Emvalomatis, G, Oude Lansink, A (2012b) The Relationship Between Technical Efficiency and Industrial Concentration: Evidence from the Indonesian Food and Beverages Industry, *Journal of Asian Economics*, 23 (4):466-75
- Setiawan, M, Emvalomatis, G, Oude Lansink, A (2013) Market Structure, Conduct, and Performance: Evidence from the Indonesian Food and Beverages Industry, *Empirical Economics*, Vol 45 (3) pp 1149-1165
- Heise, D. R. (1970) The Semantic Differential and Attitude Research, Chapter 14 in Attitude Measurement edited by Gene F. Summers, Chicago
- Volkerink, B., P. de Bass, N. van Grop & N. Philipsen, 2007. Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacies. *Ecorys Netherlands BV*
- World Economic Forum (WEF), 2011. The Global Competitiveness Report 2011/2012. World Economic Forum (WEF), 2012. The Global Competitiveness Report 2012/2013. World Economic Forum (WEF), 2013. The Global Competitiveness Report 2013/2014. World Bank, “*World Development Report 1997; Private Sector Surveys*”, 1997.